

**GLOBALISASI, PERTELEVISIAN
DAN REDEFINISI KONSEP RUANG PUBLIK :
Implementasi Kebijakan Direktif *Television Without Frontiers* 1989
dan Implikasinya di Negara Prancis**

TESIS

**FAHMI TAFTAZANI
0806449986**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH EROPA
JAKARTA
JULI 2011**

**GLOBALISASI, PERTELEVISIAN
DAN REDEFINISI KONSEP RUANG PUBLIK :
Implementasi Kebijakan Direktif *Television Without Frontiers*
1989 dan Implikasinya di Negara Prancis**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sain (M.Si) Pada Program Studi Kajian Wilayah Eropa
Program Pascasarjana Universitas Indonesia**

**FAHMI TAFTAZANI
0806449986**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN WILAYAH EROPA
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fahmi Taftazani

NPM : 0806449986

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Fahmi Taftazani

NPM : 0806449986

Jurusan : Kajian Wilayah Eropa

Judul Tesis : Globalisasi, Pertelevisian Eropa dan Redefinisi Konsep Ruang Publik: Implementasi Kebijakan Direktif Television Without Frontiers 1989 dan Implikasinya di Negara Prancis

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sain pada jurusan Kajian Wilayah Eropa, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Polit.Sc. Henny Saptatia DN (.....)

Pembimbing : Dr. Risa permanadeli (.....)

Penguji : Prof. Dr. Okke K.S. Zaimar (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya, saya bisa menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Sain Jurusan Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Okke K.S. Zaimar sebagai *proof-reader* penulis, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membaca dan menelaah tulisan ini.
2. Dr. Polit. Sc. Henny Saptatia DN selaku ketua jurusan Kajian Wilayah Eropa sekaligus sebagai pembimbing saya yang dorongan dan kesabarannya membantu saya untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Dr. Risa Permanadeli selaku pembimbing saya yang sabar dan perhatian terhadap penyelesaian tesis ini.
4. Kedua orang tua saya, sahabat dan semua pihak yang saya sebutkan dalam hati.

Jakarta 13 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Taftazani
NPM : 0806449986
Program Studi : Kajian Wilayah Eropa
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

GLOBALISASI, PERTELEVISIAN DAN REDEFINISI KONSEP RUANG PUBLIK : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIREKTIF TELEVISION WITHOUT FRONTIERS 1989 DAN IMPLIKASINYA DI NEGARA PRANCIS

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Fahmi Taftazani)

ABSTRACT

Name : FAHMI TAFTAZANI
Study Programme : European Studies
Title : Globalisation, Television, and Redefinition of Public Sphere: Implementation of Television Without Frontiers Directive 1989 and its Implication in French

Television Without Frontiers Directive is a cornerstone of the European Community audiovisual policy, related to the subsidy schemes, the European product distribution, the advertising and the protection of minors. Globalization and the development of satellite had altered the direction and vision of the European Community sectoral policies. Inversely, political and cultural dynamics occurred at the National level, related to the implementation of the Directive. Efforts to protect television sector were carried out by the French government by setting up rules of broadcasting. It represents the government's role in the protection of cultural content or cultural exception *vis à vis* policy imposed by the European Community. As a result, the concept of public space in European television had shifted, related to its functions in the context of globalization and as policy choices of a neoliberalism dimension.

Keywords: Television Without Frontiers Directive, television, globalization and public sphere

ABSTRAK

Nama : FAHMI TAFTAZANI
Program Studi : Kajian Wilayah Eropa
Judul : Globalisasi, Pertelevisian, dan Redefinisi Konsep Ruang Publik: Implementasi Kebijakan Direktif *Television Without Frontiers* 1989 dan Implikasinya di Negara Prancis

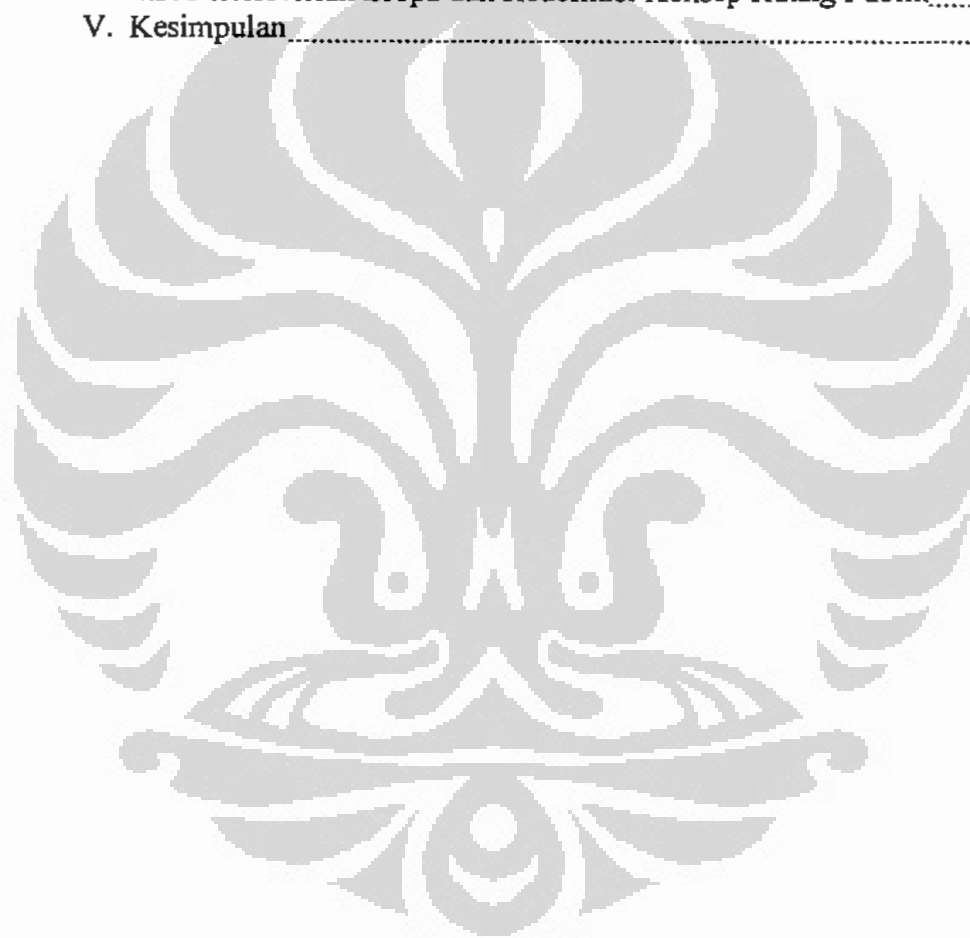
Kebijakan Direktif *Television Without Frontiers* merupakan fondasi kebijakan audiovisual Komunitas Eropa, terkait skema subsidi, distribusi produk, dan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Globalisasi telah mengubah arah dan visi kebijakan sektoral. Sisi lain, dinamika politik dan budaya muncul pada tingkat Negara Nasional, terkait tahap implementasi kebijakan tersebut. Upaya perlindungan terhadap sektor pertelevisian kemudian dilakukan oleh pemerintah Prancis, dengan mengatur tatapenyiaran dan kuota acara televisi. Hal ini merepresentasikan peran Negara dalam perlindungan konten kultural terhadap kebijakan pada tingkat supranasional. Sebagai hasilnya, konsep ruang publik dalam pertelevisian berubah, terkait fungsinya dalam konteks globalisasi dan sebagai salah satu pilihan kebijakan Komunitas Eropa yang berdimensi sistem ekonomi neoliberalisme.

Katakunci: Kebijakan Direktif *Television Without Frontiers*, pertelevisian, globalisasi, dan ruang publik

DAFTAR ISI

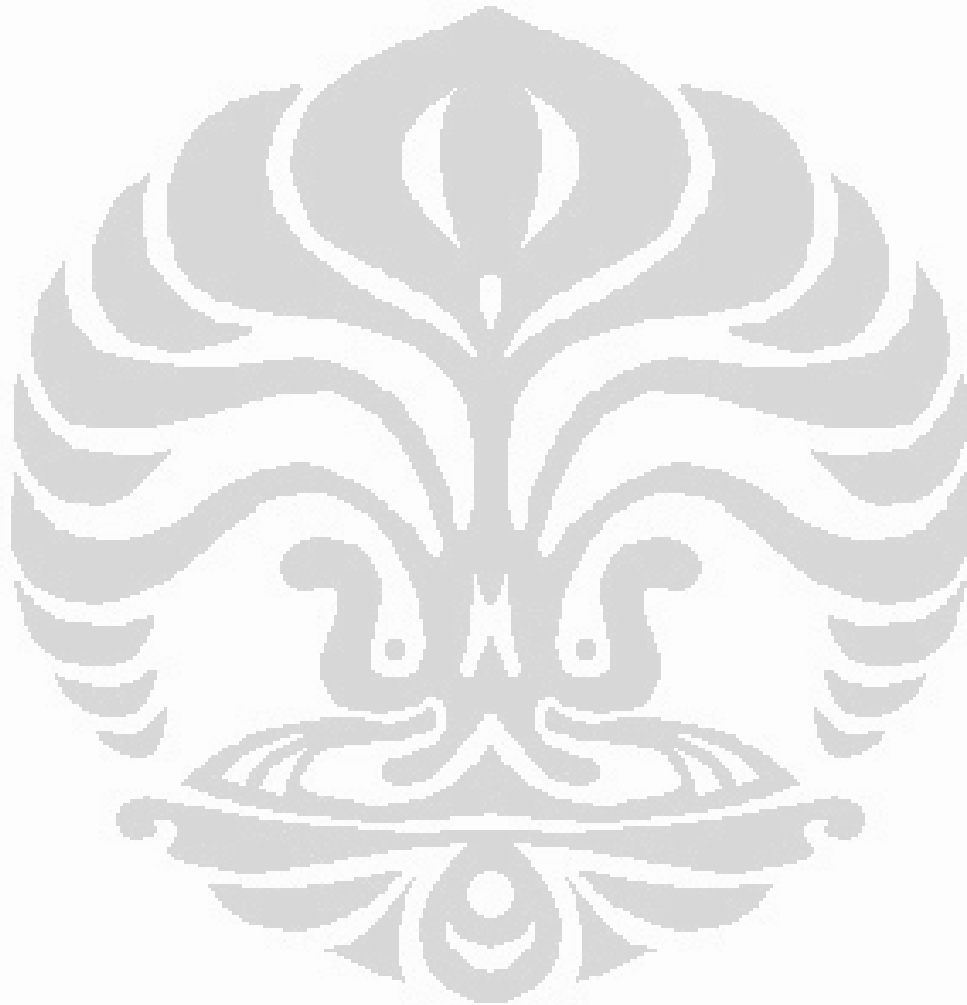
Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Kerangka Teori	7
1.7 Kerangka Pemikiran	7
II. Tinjauan Pustaka	
2.1. Globalisasi, Pertelevisian dan World System Theory	9
2.1.1. Globalisasi: Perkembangan Ekonomi dan Politik	10
2.1.2. Perkembangan Teknologi Satelit, Pertelevisian dan Perubahan Arah Kebijakan	11
2.1.3. Dimensi Konsensus Neoliberalisme	11
2.2. World System Theory	14
2.2.1. Konsep Core dan Periphery	14
2.3. Pertelevisian dan Redefinisi Konsep Ruang Publik	16
2.3.1. Ruang Publik dan Pertelevisian	17
2.3.2. Perspektif Alternatif Ruang Publik & Pertelevisian	19
III. Penyajian Obyek Penelitian	
3.1. Globalisasi, Pertelevisian Eropa, dan Kebijakan Direktif Television Without Frontiers 1989	21
3.1.1. Globalisasi dan Pertelevisian Eropa	22
3.1.2. Pilihan dan Arah Kebijakan	24
3.1.3. Pertelevisian Pan-Eropa	25
3.1.4. Skema Pertelevisian Bersama Eurikon	26
3.2. Kebijakan Direktif TWF 1989	29
3.2.1. Tatapenyiaran	32
3.2.2. Kuota Distribusi	34
3.2.3. Komunitas Eropa dan GATS	37
3.3. Implementasi Kebijakan Direktif TWF di Prancis	40
3.3.1. CSA: Tatapenyiaran dan Subsidi	41
3.3.2. Pertelevisian Prancis: Konvergensi Modus Penyiaran Dan Konversi Format Pertelevisian	42
IV. Pembahasan	
4.1 Posisi Pertelevisian Eropa dan Dominasi Media Amerika	45

4.1.1. Dominasi Pertelevisian Amerika.....	46
4.1.2. Pertelevisian Satelit dan Dominasi Sistem Distribusi.....	49
4.1.3. Integrasi Pertelevisian Eropa: Integrasi Berbasis Kultur.....	51
4.1.4. Pertelevisian Berbasis Kultur & Kreasi Masyarakat Informasi.....	52
4.2 Pertelevisian Prancis dan Pergeseran Ruang Publik.....	56
4.2.1. Canal Plus: Mitterand dan Media Amerika.....	60
4.2.2. Jack Lang dan Subsidi Perfilman.....	64
4.2.3. Dominasi Firma Nonmedia.....	66
4.2.4. Proteksi Kultural: Strategi Lokal <i>Vis à Vis</i> Globalisasi.....	66
4.2.5. Eksepsi Kultural (<i>l'exception culturelle</i>).....	69
4.3. Pertelevisian Eropa dan Redefinisi Konsep Ruang Publik.....	70
V. Kesimpulan.....	73



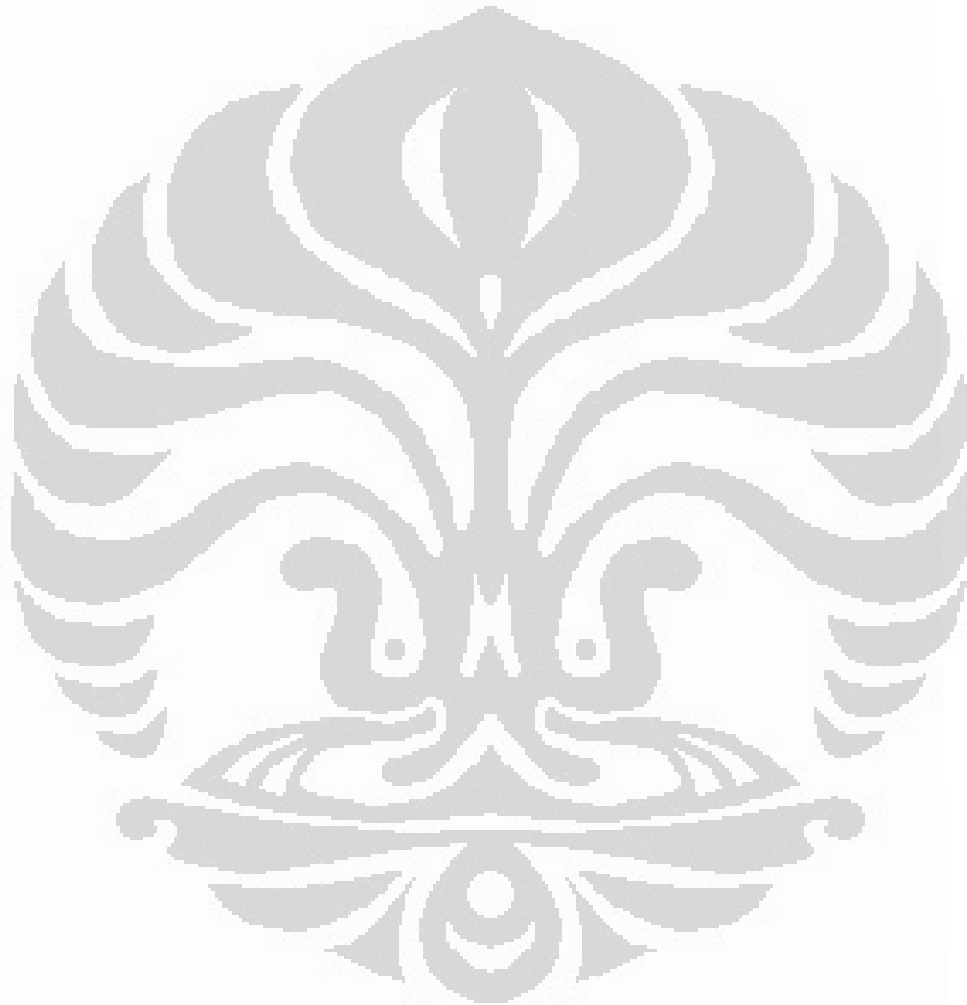
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.2. Kebijakan Perdagangan Kultural.....	25
Gambar 4.1.5. Jumlah Program Siaran Televisi Bersama.....	27
Gambar 4.1.5. Asal Film Fiksi.....	50
Gambar 4.1.2. Kebijakan Film Nasional.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kebijakan Direktif Television Without Frontiers tahun 1989
2. Kronologi Pertelevisian Prancis



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Globalisasi, Pertelevisionan Eropa dan Redefinisi Konsep Ruang Publik

Penelitian ini terkait hubungan antara globalisasi, pertelevisian Eropa, dan redefinisi konsep ruang publik. Kebijakan Direktif Television Without Frontiers akan dilihat sebagai studi kasus, terkait implementasi dan implikasinya pada tingkat Negara Nasional, khususnya Prancis. Dari hubungan tersebut diperoleh bahwa globalisasi menuntut perubahan arah kebijakan pertelevisian dalam bentuk integrasi sektoral yang turut merubah fungsi pertelevisian pada tingkat Negara Nasional dalam konteks pergeseran konsep ruang publik. Globalisasi kemudian akan dijelaskan sebagai latar belakang penelitian.

Globalisasi merupakan proses unifikasi tataekonomi baru melalui penghilangan berbagai hambatan ekonomi internasional, seperti tarif, biaya ekspor dan kuota impor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekayaan material, barang, dan jasa melalui pembagian berdasarkan sektornya (Jagdish, 2004, h. 3). Hal ini untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, membentuk spesialisasi dan menciptakan iklim kompetisi. Ekonomi regional, masyarakat dan budaya kemudian berintegrasi dalam ranah budaya, komunikasi, transportasi maupun perdagangan. Kondisi ini secara tidak langsung merubah arah kebijakan pada tingkat domestik.

Pada tahun 1980-an, pilihan kebijakan kemudian dibuat untuk menyelaraskan dengan kondisi ini. Komunitas Eropa contohnya, menyusun kebijakan pertelevisian yang mengatur tatapenyiaran di Negara Nasional melalui kebijakan Direktif Television Without Frontiers pada tahun 1989.¹ Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan sektor pertelevisian ke dalam skema perekonomian Pasar Tunggal yang diresmikan secara bersamaan pada tahun yang sama. Pertelevisionan diarahkan ke dalam skema promosi dan penciptaan iklim kompetitif dalam konteks perdagangan global. Sisi lain, pada tingkat Negara

¹ Council Directive, "Television Without Frontiers Directive", 3 Oktober 1989
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:298:0023:0030:EN:PDF>

Nasional, kebijakan ini mendapatkan tentangan, khususnya dari negara Prancis yang memiliki tradisi proteksi atas konten kultural.

Prancis merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi perlindungan terhadap kekayaan kultural (Levy, 2005, h. 14). Pertelevision adalah salah satu media yang berfungsi mempromosikan kekayaan tersebut, dalam bentuk film, seni, kesusastraan, musik, dsb. Upaya Komunitas Eropa untuk mengintegrasikan pertelevisian ke dalam skema komersialisasi tersebut, dianggap oleh pemerintah Prancis dapat mengancam sektor pertelevisiannya. Pelbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah Prancis untuk melindungi sektor ini, seperti pengaturan penyiaran, pemberian subsidi dan pengaturan distribusi program televisi, dsb (Cocq & Messerlin, 2003, h. 16). Istilah eksepsi budaya merupakan salah satu bagian dari prinsip perlindungan ini, dalam konteks skema perdagangan GATS yang berlangsung pada tahun 1986-1994. Akan tetapi, prinsip ini secara historis telah berlangsung lama. Sisi lain, usaha pemerintah Prancis untuk melindungi sektor pertelevisiannya belum berhasil, terkait globalisasi dan menguatnya kekuatan supranasional (Komunitas Eropa) yang berusaha mengintegrasikan semua sektor pada tingkat Negara Nasional. Globalisasi yang terjadi pada tahun 1980-an maupun perubahan arah kebijakan pertelevisian (kebijakan Direktif TWF 1989), turut merubah fungsi pertelevisian sebagai ruang publik. Fungsi pertelevisian yang semula sebagai media informasi menjadi media komersialisasi.

1.1.1. Kebijakan Direktif Television Without Frontiers: Implementasi

Kebijakan Direktif Television Without Frontiers (89/552/EEC) atau yang kemudian disebut sebagai kebijakan Direktif TWF 1989 merupakan fondasi kebijakan audiovisual Komunitas Eropa yang mengatur tatapenyiaran bagi stasiun televisi Negara Nasional. Secara umum, kebijakan Direktif *Television Without Frontiers* (TWF) terdiri dari 27 Pasal dan 7 bab.² Bab pertama membahas tentang definisi penyiaran. Bab kedua menjelaskan perihal yang bersifat umum (*general provisions*). Bab ketiga menjelaskan tentang promosi, distribusi dan produksi program televisi. Bab keempat menjelaskan tentang iklan dan dukungan sponsor. Bab kelima menjelaskan tentang perlindungan anak di bawah umur. Bab keenam

² Council Directive, "Television Without Frontiers Directive", 3 Oktober 1989
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:298:0023:0030:EN:PDF>

menjelaskan tentang hak seseorang untuk mengambil upaya hukum jika ia telah dirugikan oleh media (*right to reply*). Bab terakhir adalah penutup. Pada tingkat negara nasional, ada dua permasalahan dalam kebijakan Direktif ini, yaitu masalah definisi penyiaran dan kuota siaran.

Perihal definisi penyiaran, Negara Nasional tidak boleh menghambat transmisi penyiaran dari negara lain. Aturan ini dalam praktiknya tidak bisa membendung program televisi dari Amerika Serikat, khususnya siaran televisi TNT-Cartoon Network yang dioperasikan oleh stasiun televisi kabel Belgia, Croditel Brabant.³ Program televisi ini tersiarkan ke Negara Nasional Eropa, termasuk Prancis.

Kasus ini kemudian dibawa ke tingkat Peradilan Eropa, sesuai dengan aturan *right-to-reply*.⁴ Badan Peradilan Eropa kemudian memutuskan stasiun televisi ini tidak melanggar yurisdiksi penyiaran, terkait letak stasiun penyiaran itu, walaupun acara yang ditampilkan bukan produk Eropa. Menurut Badan tersebut, penentuan posisi stasiun penyiaran tersebut terletak pada aktifitas stasiun televisi itu, yaitu di Belgia dan bukan dari negara asalnya. Menurut Wilkins (1991) dan Conley (1993), definisi penyiaran merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Konvensi hak Asasi manusia Eropa (*European Convention of Human Rights*), khususnya pasal 10 yang menyebutkan kebebasan ekspresi dan menerima informasi”.⁵ Oleh karena itu, larangan untuk mentransmisikan siaran pertelevisian bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Perihal kuota siaran, Pasal 4 kebijakan Direktif TWF mewajibkan stasiun televisi menyiarkan produk Eropa sebesar 60 %, termasuk di dalamnya program berita, iklan, acara ringan, olah raga dan program berbasis *teletext* (Wilkins, 1991, h. 201 dan Conley, 1993, h. 89). Hal ini kemudian ditentang oleh Prancis, karena

³ *Request for a Preliminary Ruling of the EC Court of Justice in Case Against TNT Cartoon Network.*

<http://merlin.obs.coe.int/iris/1995/1/article15.en.html>

⁴ *“The Television Without Frontiers: Cornerstone European Broadcasting Policy”*

Right to Reply merupakan hak seseorang untuk melakukan upaya hukum jika ia merasa dirugikan oleh media.

http://www.global.asc.upenn.edu/docs/anox06/secure/july18/valcke/18_valcke_reading1.pdf

⁵ *“Everyone has the right to freedom of expression. this right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises”.*

<http://www.hri.org/docs/ECHR50.html>

aturan tersebut dapat memengaruhi sektor pertelevisiannya. Pada bulan Mei tahun 1989, enam Negara Nasional menolak proposal yang ditawarkan oleh Komisi Eropa tersebut, Negara yang menolak usulan tersebut adalah Belgia, Denmark, Prancis, Yunani, Italia dan Luxembourg. Penolakan ini kemudian ditengahi oleh Komisi Eropa dengan menurunkan jumlah kuota tersebut menjadi 50,1%.

Sisi lain, penolakan Prancis itu atas kuota tersebut memiliki alasan, sebab pertelevisian Prancis pada dasarnya bertujuan untuk promosi kultural ke Negara Nasional yang lain. Hal ini terkait bagaimana pemerintah memfungsikan sektor pertelevisian itu untuk membantu produksi konten audiovisual (Levy, 2005, h. 20). Industri pertelevisian Prancis secara tidak langsung mendorong industri perfilman. Upaya perlindungan terhadap sektor pertelevisian domestik kemudian dilakukan oleh pemerintah Prancis, di antaranya adalah penyusunan skema subsidi dan kuota produksi.

1.1.2. Implikasi Kebijakan Direktif TWF 1989 di Prancis

Kebijakan Direktif Television Without Frontiers secara tidak langsung menekan sektor pertelevisian Negara Nasional untuk segera mengharmonisasikan sektor tersebut pada tingkat domestik. Pada tingkat Negara Nasional, pemerintah Prancis melakukan upaya-upaya untuk melindungi sektor ini, khususnya dari pengaruh dan dominasi produk serupa dari Amerika Serikat. Upaya harmonisasi ini dilakukan oleh *Conseil du Service de l'Audiovisuel* (CSA), sebagai lembaga resmi pada tingkat nasional yang ditunjuk oleh Komunitas Eropa untuk mengatur tatapenyiaran. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Prancis adalah penyusunan skema subsidi bagi sektor perfilman dan sektor audiovisual yang lain. Yang kedua adalah skema kuota distribusi siaran yang mengatur konten program, baik dari Eropa maupun Prancis.

Skema subsidi mengatur sistem pembiayaan bagi stasiun televisi. Skema ini memiliki dua sasaran, yaitu produk Eropa dan produk Prancis sendiri. Skema tersebut memiliki dua pilihan. Skema pertama mengatur stasiun televisi untuk menginvestasikan pendapatan mereka sebesar 15% untuk produk Prancis dan sebesar 20% untuk produk Eropa (Levy, 2005, h. 20). Pilihan yang kedua adalah investasi sebesar 15% untuk produk Prancis dan menyiarkan selama 120 jam produk Eropa pada jam tayang khusus.

Sebagai tambahan, setiap stasiun televisi diwajibkan untuk memberikan subsidi silang sebesar 3% untuk produksi film Prancis atau Eropa (Levy, 2005, h. 20). Sisi lain, subsidi finansial juga diberikan pada stasiun televisi privat, Canal Plus dan subsidi untuk film-film berbiaya besar yang dikenal sebagai “*Plan Lang*”, istilah yang diambil dari Menteri Kebudayaan Prancis pada masa pemerintahan François Mitterrand.

Terkait masalah kuota produksi, setiap stasiun televisi di Prancis diwajibkan oleh pemerintah untuk menyiarkan program Eropa sebesar 60% (Levy, 2005, h. 20). Jumlah saluran stasiun televisi dibatasi oleh pemerintah secara ketat. Setiap saluran televisi hanya boleh menyiarkan film feature sejumlah 192 film per tahun. Pada hari tertentu, penyiaran film ditiadakan, khususnya hari Rabu, Jum’at dan Sabtu. Jam penayangan film pun dibatasi, antara jam 20.30 dan 20.30. tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah penonton di bioskop.

Sisi lain, kebijakan pemerintah Prancis untuk melindungi pertelevisian nasional bertolakbelakang dengan kebijakan selanjutnya, yaitu subsidi perfilman berbiaya besar pada masa Menteri Kebudayaan era Mitterrand, Lang (Messerlin & Cocq, 2003, h. 12). Pemberian keistimewaan terhadap stasiun televisi privat Canal Plus (Messerlin & Cocq, 2003, h. 16) juga mengindikasikan kebijakan pemerintah Prancis yang paradoksal.

Masalah Penelitian

1. Bagaimana posisi pertelevisian Eropa pada tingkat global dan implementasi kebijakan Direktif TWF 1989 di Negara Nasional (Prancis)?
2. Bagaimana implikasi kebijakan Direktif TWF 1989 itu di Negara Nasional (Prancis) dan pergeseran konsep ruang publik dalam pertelevisian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi pertelevisian Eropa dan implementasi kebijakan Direktif TWF 1989 di Negara Nasional, khususnya Prancis.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran konsep ruang publik dalam pertelevisian, implikasi kebijakan Direktif TWF 1989 di negara Prancis,

dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Prancis untuk melindungi sektor pertelevisiannya.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini terbatas pada posisi pertelevisian Eropa pada tahun 1980-an, Kebijakan Direktif Television Without Frontiers tahun 1989, kebijakan penyiaran Eropa dan kondisi pertelevisian Prancis pada masa pemerintahan François Mitterand.

1.5. Metode Penelitian

Tulisan ini berlandaskan penelitian kualitatif yang bertujuan dua hal, yaitu untuk menjelaskan dan memberi pemahaman terhadap obyek yang diteliti (Stake, 2010, h.19). Penelitian kuantitatif bersifat interpretatif, empiris, situasional, dan subyektif. Sifat interpretatif bermakna: temuan penelitian merupakan hasil interaksi antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Sifat empiris bermakna: realita yang diteliti merupakan hasil konstruksi manusia atau pengetahuan. Sifat situasional bermakna temuan penelitian merupakan hal yang bersifat spesifik dan kontekstual, bukan generalisasi. Yang terakhir, peneliti memiliki peran sentral untuk menjelaskan dan menginterpretasi secara subyektif temuan-temuan penelitian. Teknik yang digunakan adalah pemeriksaan dokumen, dalam hal ini referensi yang terkait dengan obyek yang akan diteliti, meneliti hubungan sebab-akibat (globalisasi dan perubahan arah kebijakan), dan studi kasus (kebijakan Direktif TWF 1989 dan stasiun televisi privat Canal Plus). Data primer penelitian ini adalah kebijakan Direktif TWF tahun 1989. Data sekunder penelitian ini adalah buku yang terkait dan informasi yang berasal dari situs internet maupun jurnal online.

1.6. Kerangka Teori

World System Theory dan Konsep Ruang Publik dalam Teori Komunikasi Jürgen Habermas

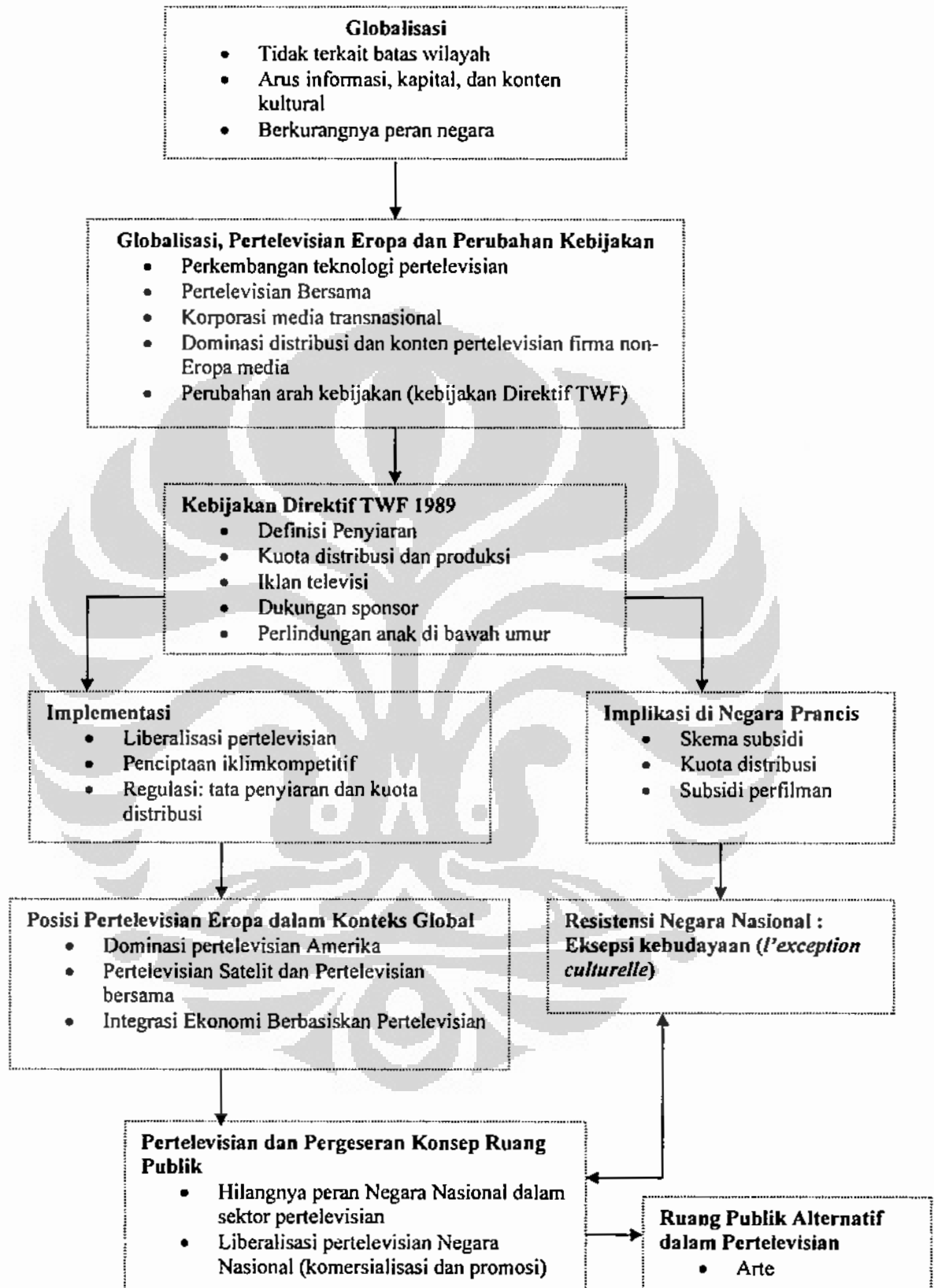
World System Theory atau yang disebut sebagai WST digunakan untuk menjelaskan posisi pertelevisian Eropa pada tahun 1980-an, terutama posisinya terhadap pertelevisian Amerika yang mendominasi pada tingkat global. Posisinya tersebut akan dijelaskan melalui pergeseran sektor pertelevisian Eropa yang

semula dikuasai oleh Negara Nasional menjadi perhatian pengambil kebijakan pada tingkat supranasional (Komunitas Eropa). Istilah globalisasi kemudian akan digunakan sebagai latar belakang untuk memahami pergeseran posisi pertelevisian Eropa pada tahun 1980-an. Pola pergeseran tersebut dapat dikenali melalui dimensi ekonomi liberalisme yang mengarahkan sektor pertelevisian menuju liberalisasi perdagangan tingkat global, penciptaan iklim kompetitif, hilangnya peran Negara Nasional dan menguatnya kekuatan korporasi media pada tingkat global.

Selain pergeseran posisi, pertelevisian Eropa juga mengalami perubahan visi dan tujuan, yang semula termasuk dalam kerangka pelayanan publik menjadi kerangka komersial. Konsep ruang publik kemudian akan digunakan untuk melihat perubahan yang dimaksud. Konsep ini termasuk ke dalam teori komunikasi Habermas yang terkait hubungan antara Negara dan kehidupan privat warga Negara dalam diskursus ruang publik, dalam hal ini pertelevisian. Terkait konteks pertelevisian Eropa, hal ini terkait kepemilikan dan kontrol Komunitas Eropa atas alat produksi (pertelevisian) Negara Nasional yang diarahkan ke skema liberalisasi.

1.7. Kerangka Pemikiran

Globalisasi akan dijelaskan pada bagian awal sebagai latar belakang perubahan arah kebijakan pertelevisian Komunitas Eropa pada tahun 1980-an. Selanjutnya, kebijakan Direktif TWF 1989 akan diterangkan, terkait implementasi dan implikasinya di Negara Nasional, Prancis. Dua level analisis kemudian dilakukan, pertelevisian Eropa pada tingkat global dan pertelevisian Prancis, termasuk istilah eksepsi kebudayaan. Yang selanjutnya adalah bagaimana meredefinisikan konsep ruang publik dalam pertelevisian Eropa dan hubungannya dengan pertelevisian Negara nasional, Prancis. Yang terakhir pertelevisian berbasis budaya dan pembentukan Masyarakat Informasi merupakan skema ruang publik alternatif dalam konteks perkembangan media dan informasi pada tingkat global.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Globalisasi, Pertelevisionan dan World System Theory

Globalisasi merupakan perubahan ekonomi eksternal yang berdampak pada tingkat global. Kondisi ini turut mendorong para aktor politik pada tingkat domestik dan negara untuk menyusun kebijakan dalam ranah ekonomi dan sosial yang bersifat “*top down*” dan “*outside in*” (Cerny et. al., 2005, h. 2). Gerak para aktor politik kemudian dibatasi dalam proses pengambilan model ini. Sisi lain, menurut Cerny respon atas globalisasi itu bisa pula bersifat “*bottom up*” dan “*inside out*”. Para aktor politik dalam konteks ini dapat bertindak secara individual maupun kolektif, untuk memertahankan kepentingan dan merealisasikan tujuan mereka. Dengan demikian mereka berupaya menginternalisasikan nilai-nilai globalisasi tersebut dan merealisasikannya menjadi suatu tindakan praktis pada tingkat institusi, dalam konteks pengambilan kebijakan. Proses ini dalam perkembangannya memberi pengaruh terhadap perkembangan masyarakat dan ranah politik, baik melalui perkembangan teknologi, pola perdagangan, sistem produksi, pasar finansial, dsb.

Secara definitif globalisasi terdiri dari tiga kategori, yang bersifat esensial, definisi sempit dalam ranah ekonomi, dan globalisasi sebagai proses politik (Cerny et. al., 2005, h. 5). Yang pertama terkait definisi makro globalisasi yang berasal dari ide berakhirnya atau berkurangnya peran negara. Sisi lain, menurut Cerny, konsep mengenai dunia menjadi entitas sosial tunggal, ekonomi, dan politik hanyalah sebuah metafora yang tidak dapat menjelaskan keterkaitan antarranah dan dinamika yang terdapat di dalamnya. Definisi yang baik kemudian dirumuskan oleh Kenichi Ohmae, Jan Aart Scholte, dan Roland Robertson (dalam Cerny, 2005). Ohmae berpendapat bahwa kita bergerak ke arah dunia nirbatas (*borderless world*). Perdagangan, finansial, produksi, konsumsi, regulasi, beroperasi di dalam ranah yang sama. Pemerintah Negara Nasional dalam hal ini secara perlahan kehilangan kemampuannya untuk mengadaptasikan dan menjalankan aktivitas ekonominya pada tingkat nasional dan lokal. Sedangkan

Scholte menyatakan: globalisasi bermakna deteritorialisasi. Bentuk teritorial pemerintahan dan politik berada dalam ketegangan dengan ranah ekonomi, politik dan aktivitas sosial yang perlahan mengalami deteritorialisasi.

2.1.1. Globalisasi: Perkembangan Ekonomi dan Politik

Krisis ekonomi dan finansial yang terjadi pada akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an memiliki beberapa dimensi. Yang pertama adalah krisis fiskal, timpangnya sektor pemasukan pajak dengan sektor pembiayaan kebijakan sosial, pelayanan publik, nasionalisasi industri, dan sistem birokrasi yang bergerak cepat. Kondisi ini kemudian mendorong para pengambil kebijakan untuk melakukan upaya perlindungan terhadap sektor domestik. Untuk mengurangi dampak ini, banyak negara melakukan proteksi untuk meningkatkan angka stagflasi (Cerny, 2005, h. 9). Krisis pertumbuhan ini disebabkan oleh perubahan standar mata uang dari Dollar menjadi emas pada tahun 1971-1973 oleh lembaga keuangan Bretton Woods. Kondisi ini menciptakan resesi ekonomi, dalam konteks penurunan volume perdagangan dan metode pembayaran (*debt-of-payment*). Resesi ekonomi yang terjadi pada periode tersebut turut membawa dampak naiknya inflasi, angka keuntungan (*interest rate*) meningkat, namun dalam konteks negatif, perdagangan dunia menjadi stagnan.

Para pengambil kebijakan kemudian mencari solusi atas kondisi ini. Di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, skema finansial, terkait mengurangi angka inflasi, kemudian diterapkan, dengan mengurangi peran negara dalam sektor ini (Cerny, 2005, h. 10). Sisi lain, kontrol terhadap arus kapital dan beralih kepada ekspansi perdagangan, yang semula mengadopsi kebijakan protektif, merupakan upaya penting untuk mengatasi resesi ekonomi tersebut. Hal inilah yang bisa menjelaskan mengapa sektor perdagangan Amerika Serikat, khususnya dalam konteks industri konten audiovisual begitu ekspansif melakukan dominasi ke pasar audiovisual negara dan benua lain, khususnya Eropa. Skema ekonomi yang diterapkan ini merupakan perkembangan dari sistem ekonomi liberalisme yang berusaha menghilangkan siklus investasi dengan membebaskan sektor keuangan internasional.

2.1.2. Perkembangan Teknologi Satelit, Pertelevisian dan Perubahan Arah Kebijakan

Perkembangan teknologi satelit pada tahun 1980-an turut mengubah aturan penyiaran dan modus penyiaran tradisional, khususnya pertelevisian Eropa. Selain memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan modus tradisional, pengadopsian teknologi baru ini kemudian dilakukan untuk menyerasikan sistem penyiaran stasiun televisi intraeropa. Perkembangan teknologi satelit ini kemudian diikuti oleh upaya-upaya untuk mengintegrasikan pertelevisian ke dalam satu skema bersama, salah satunya adalah pertelevisian Eurikon dan Europa TV.

Perkembangan teknologi satelit turut mengubah arah kebijakan sektoral, khususnya pertelevisian Negara Nasional Komunitas Eropa, sebab pertelevisian terkait konten ekonomi dan kultural. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam konteks pertelevisian, Komunitas eropa kemudian menyusun suatu kebijakan yang sejalan dengan visi skema Pasar Tunggal, melalui penghilangan hambatan ekonomi dalam konteks penyiaran. Kebijakan Direktif Television Without Frontiers yang disusun oleh Komisi Eropa merupakan salah satu respon atas kondisi ini, terkait sektor audiovisual yang stagnan, khususnya masa depan pertelevisian di Negara Nasional Komunitas Eropa dari ancaman produk dari luar Eropa. Sisi lain, upaya untuk merumuskan pertelevisian Eropa pada tahun 1980-an mengadopsi sistem ekonomi neoliberalisme yang menekankan liberalisasi perdagangan, penciptaan iklim kompetitif dan komersialisasi (promosi).

2.1.3. Dimensi Konsensus Neoliberalisme Dalam Pertelevisian Eropa

Istilah neoliberalisme mengacu sebuah bentuk baru sistem ekonomi-politik yang berfokus pada konsep pasar dan kerap dikaitkan dengan proyeksi politik pemerintahan tertentu, seperti Thatcherisme, Reagenomics, Rogernomics, dsb (Larner: 199). Sisi lain, neoliberalisme dalam konteks kebijakan menekankan peran minimal negara terhadap sektor pelayanan publik. Konsep pasar dipahami sebagai jalan keluar untuk mengatur aktivitas ekonomi yang menekankan iklim kompetisi, efisiensi, dan pilihan dalam penyusunan suatu kebijakan. Neoliberalisme dikaitkan pula dengan proses restrukturasi *Welfare State*, namun

penekanannya bukan pada kebijakan yang menjamin pasar tenaga kerja dan sistem kesejahteraan sosial yang bersifat inklusif. Neoliberalisme dalam konteks kebijakan memberi peran lebih pada pengambil kebijakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kompetitif pada tingkat global (Lerner: 201). Sebagai kelanjutannya, neoliberalisme membuka selebar mungkin pasar komoditi dalam iklim kompetitif. Deregulasi maupun privatisasi merupakan tema sentral yang kerap diperdebatkan dalam proses pembentukan *Welfare State* ini.

Beberapa dimensi lain neoliberalisme dalam konteks Komunitas Eropa dirumuskan pula oleh Cerny. Konsep pasar merupakan inti liberalisme dalam konteks masyarakat kapitalis, entitas politik maupun institusi modern. Pada tingkat domestik maupun global, penyusunan kebijakan disesuaikan dengan karakter pasar (Cerny: 12). Dimensi serupa dalam neoliberalisme diungkapkan pula oleh Cerny, yang antara lain terkait privatisasi pelayanan sosial dan publik, mendorong komoditi ke arah iklim kompetisi, deregulasi dan liberalisasi sektor dan pasar tertentu, dan penghilangan hambatan ekonomi.

Berikut beberapa dimensi utama sistem ekonomi neoliberalisme. Seperti yang akan dipaparkan berikut ini, dimensi kebijakan tersebut, baik dalam konteks ukuran kebijakan maupun tingkat konvergensi berdasarkan sisi geografis, bergantung pada: (a) institusi domestik (b) hubungan grup atau kelompok yang memiliki kepentingan (dan hubungannya dengan grup lain yang lintas-wilayah) dan (c) dampak perkembangan sektor publik/privat atau penyatuan keduanya pada tingkat internasional dan transnasional (Cerny: 14-15). Ada empat dimensi yang akan dirumuskan satu persatu dengan singkat, terkait bagaimana dimensi itu merupakan inti dari sistem ekonomi neoliberalisme.

Dimensi pertama neoliberalisme ini terkait penghilangan hambatan perdagangan dan arus kapital. Upaya ini telah dimulai oleh Uni Eropa sejak tahun 1947 dan pada tahun 1970-an, Uni Eropa berhasil mengurangi tarif bea masuk. Upaya tersebut dilanjutkan dengan penghilangan hambatan nontarif. Transformasi GATT pada tingkat WTO dan negosiasi yang berlangsung pada tingkat regional dan perdagangan bilateral merupakan indikasi sistem ekonomi yang bersifat terbuka itu bekerja.

Dimensi kedua neoliberalisme adalah perubahan karakter negara dalam konteks ekonomi domestik, yang semula bersifat intervensionis dalam sektor publik, dikurangi perannya dalam sektor tersebut. Sektor yang dimaksud kemudian diarahkan ke dalam skema perdagangan bebas dan penciptaan iklim kompetisi. Pada periode ini, tujuan utama kebijakan publik adalah pertumbuhan ekonomi, promosi industrialisasi, pasar tenaga kerja, dan redistribusi kekayaan dan pendapatan melalui sistem pajak dalam konsep *Welfare State*.

Karakter sistem ekonomi neoliberal selanjutnya adalah regulasi. Regulasi dalam konteks ini merupakan definisi umum, yang merupakan gabungan dari dua hal. Yang pertama adalah model tradisional, terkait kontrol publik terhadap sektor ekonomi yang bersifat langsung dan tidak langsung dan kontrol terhadap pelayanan sosial maupun publik yang dapat memengaruhi kepentingan publik. Model kedua adalah regulasi "*arm's-length*", yang dikembangkan di Amerika Serikat. Model ini menekankan para "*regulator*" untuk tidak mencampuri produk yang diproduksi, tapi peran para "*regulator*" ini lebih diarahkan ke penyusunan dan penerapan aturan umum untuk sektor tertentu, industri maupun pelayanan, untuk memproduksi "*level playing field*" bagi pasar. Dua hal ini merupakan bagian dari regulasi sistem ekonomi neoliberal.

Dimensi yang keempat neoliberalisme adalah peran sektor privat. Perkembangan struktural dalam ranah ekonomi, khususnya perkembangan teknologi informasi merubah persepsi kita bagaimana firma yang terkait teknologi informasi berfungsi sebagai sektor privat, sekaligus sebagai sektor publik. Kombinasi antara dua hal ini kemudian mengacu bagaimana sektor pelayanan publik itu diletakkan.

Empat dimensi konsensus neoliberalisme tersebut sejalan dengan visi pertelevisian Eropa pada tahun 1980-an. Melalui kebijakan Direktif Television Without Frontiers pertelevisian Eropa diarahkan ke arah skema liberalisasi perdagangan. Untuk mengetahui posisi pertelevisian Eropa, World System Theory dapat digunakan untuk melihat perkembangannya terhadap kondisi pertelevisian lain, khususnya pertelevisian Amerika.

2.2. World System Theory

World System Theory atau yang disebut sebagai World System Analysis merupakan buah pemikiran Immanuel Wellerstein yang ingin menjelaskan bagaimana karakter perekonomian masyarakat kapitalis yang ia sebut sebagai *world economy*, kosakata yang ia pinjam dari Fernand Braudel, *économie du monde* (Wallerstein, 2004, h. 22). Istilah *world economy* menurut Wellerstein, dapat dijumpai di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika. Perkembangan *économie du monde* atau sistem ekonomi kapitalis ini kemudian dijelaskan oleh Wallerstein melalui dua hal: ekspansi atas wilayah geografis melalui kerjasama eksternal dan pengaruhnya terhadap pembentukan wilayah sosial baru (Wallerstein & Hopkins, 1982, h.123). Yang pertama terkait bagaimana sistem ekonomi masyarakat kapitalis meluaskan cakupan dominasinya dari yang semula bersifat terbatas dan berlandaskan pembagian kerja aksis (*axial labour division*) pada abad ke-XVI, bertambah luas cakupannya menjadi penguasaan yang bersifat global. Wallerstein juga menyinggung bagaimana peran satelit turut mempercepat sistem ekonomi kapitalis ini bekerja dalam konteks media. Yang kedua terkait bagaimana sistem ekonomi kapitalis ini mengakar kuat secara sosial di wilayah geografis yang dikuasai dan dominasi tersebut turut memengaruhi kehidupan manusia masa kini.

Sembari mengaitkannya dengan kondisi pertelevisian Eropa pada tahun 1980-an, teori World System dapat menjelaskan bagaimana sistem ekonomi kapitalis tersebut beroperasi dalam sektor media, khususnya penetrasi produk audiovisual Amerika terhadap pangsa pasar audiovisual Eropa. Perkembangan teknologi satelit turut merubah modus penyiaran secara teknis. Pada sisi yang lain, teknologi ini turut menciptakan arus informasi dan konten audiovisual yang tidak terkontrol. Secara tidak langsung hal ini turut memengaruhi sistem sosial di wilayah geografis yang dirambah oleh teknologi itu dan menimbulkan masalah kultural baru, terkait konteks konten audiovisual yang berasal dari luar Eropa dan skema pertelevisian bersama.

2.2.1. Konsep *Core*, *Periphery* dan *Semi-Periphery*

Wallerstein (2004) memperkenalkan konsep *core* dan *periphery* untuk menggantikan Negara atau entitas politik. *Core* merupakan sesuatu yang berada di

pusat dan *periphery* merupakan sesuatu yang berada di pinggiran. Core merupakan pusat atau basis produksi. Periphery merupakan penyedia sumber daya untuk produksi. Sedangkan Semi-periphery berperan ganda, sebagai basis produksi dan penyedia sumber daya. Hubungan antara *core* dan *periphery* dapat dijelaskan melalui matriks pembagian kelas berdasarkan distribusi geografis dan kerjasama perdagangan. Wellerstein menawarkan empat macam hubungan terkait hal tersebut: (a) hubungan antara pemilik wilayah *core* (*core owner*) dan pemilik wilayah *periphery* (*peripheral owner*), (b) hubungan pemilik wilayah *periphery* (*peripheral owner*) dan pekerja wilayah *periphery* (*peripheral worker*), (c) hubungan pemilik wilayah *core* (*core owner*) dan pekerja wilayah *core* (*core worker*), dan (d) hubungan pekerja wilayah *core* (*core worker*) dan pekerja wilayah *periphery* (*peripheral worker*).

Posisi pertelevisian Eropa menurut konteks ini, berada dalam tegangan antara wilayah pusat dan pinggiran, yang menurut definisi Wellerstein adalah semi-pinggiran (*semi-periphery*). Istilah semi-pinggiran untuk mengidentifikasi pertelevisian Eropa tidak terkait hubungan antara *core* dan *semi-periphery* yang bersifat pasif dalam konteks dominasi tunggal (*World Empire*), namun hubungan ini bersifat kolaboratif, antara firma media Amerika dan firma media Eropa. Media Amerika dalam konteks ini bukan pemain tunggal dalam dunia pertelevisian. Keberadaan media Amerika terkait hubungannya dengan firma media Eropa, dalam konteks dominasi yang bersifat aktif dan kolaboratif.

Dari hubungan tersebut, dapat diuraikan bagaimana mekanisme dominasi pertelevisian Amerika (*core*) terhadap pertelevisian Eropa (*semi-periphery*) melalui kerjasama perdagangan dalam konten kultural. beberapa mekanisme tersebut adalah penguasaan distribusi konten audiovisual (satelit), pembentukan skema perdagangan internasional yang menempatkan posisi sektor audiovisual Eropa dalam posisi yang tidak menguntungkan (GATS), dan pengaruh firma media Inggris dalam Komunitas Eropa. Sisi lain, kebijakan Direktif Television Without Frontiers merupakan bagian dari siklus yang diramalkan oleh Nikolai Kondratiev yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks inovasi pada masanya.

		Inovasi
1	A. 1780/90 – 1810/17 B. 1814/17 – 1844/51	Tenaga Uap (steam power)
2	A. 1844/51 – 1871/75 B. 1870/75 – 1890/96	Jalan Kereta Api/ Baja (railways/steel)
3	A. 1890/96 – 1914/20 B. 1914/20 – 1940/45	Gas, Tenaga Listrik dan Kimia (gas, electrical power, chemical)
4	A. 1940/45 – 1967/73 B. 1967/73 – 1989/92	Petrokimia, Elektronik (petrochemicals, electronic)
5	1989/92 -	Teknologi Informasi dan Bioteknologi (IT, biotech)

Siklus Ekonomi Kondratiev

2.3. Pertelevisian dan Redefinisi Konsep Ruang Publik

Hubungan antara pertelevisian dan konsep ruang publik terkait bagaimana pertelevisian berfungsi sebagai basis informasi yang bersifat publik, sebagai media informasi yang progresif dan pembentukan opini publik. Sisi lain, pertelevisian Eropa pada tahun 1980-an, diarahkan ke skema liberalisasi dalam kebijakan Direktif Television Without Frontiers. Pertelevisian Negara Nasional terintegrasi ke dalam satu skema pertelevisian Eropa. Dengan demikian pertelevisian memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai media informasi pada tingkat nasional dan pada tingkat supranasional (Komunitas Eropa). Selain penambahan fungsi, pergeseran visi pertelevisian pun berubah. Pertelevisian Negara Nasional diarahkan pula ke skema komersialisasi dengan tujuan untuk mempromosikan nilai kultural maupun sisi keeropaan yang telah dirumuskan oleh Komisi Eropa.

Kondisi ini turut mengubah definisi konsep ruang publik yang menurut Habermas tidak terkait sisi komersialisasi atau jual beli. Konsep ruang publik Habermas terdapat dalam teori komunikasi yang menekankan pertelevisian sebagai basis pembentukan wacana rasional antara ruang publik dan partisipasi individual. Fungsi media menurut Habermas kemudian bertransformasi dari basis produksi wacana rasional ke arah pembentukan dan pembatasan produksi wacana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh korporasi media. Hubungan antara ruang publik dan partisipasi individual kemudian terputus oleh relasi tersebut yang

menempatkan individu bersikap pasif terhadap tontonan maupun elemen hiburan yang ditampilkan dalam media. Hal ini kemudian mereduksi fungsi media yang seharusnya memiliki fungsi yang bersifat progresif. Individu kemudian menjadi obyek berita, informasi dan relasi publik yang dalam pernyataan Habermas dirumuskan sebagai berikut:” *“Inasmuch as the mass media today strip away the literary husks from the kind of bourgeois self-interpretation and utilize them as marketable forms for the public services provided in a culture of consumers, the original meaning is reversed (Habermas, 1989a, h. 171).*

2.3.1. Ruang Publik dan Pertelevisian

Ruang publik⁶ menurut Habermas merupakan sebuah wilayah sosial di mana individu berkumpul dan mendiskusikan dan mengidentifikasi problem sosial. Melalui diskusi tersebut terbentuk kemudian suatu tindakan politik (*praxis* dan *lexis*). Ruang publik ini memediasi antara ruang privat dan ruang publik otoritas, dalam konteks ini negara, atau penegak hukum, dan kelas dominan (Habermas; 1989: 30). Opini publik yang dihasilkan oleh kaum Borjuasi ini diteruskan kepada negara. Ruang publik secara konseptual berbeda dari konsep negara. Ruang ini merupakan tempat produksi dan sirkulasi wacana yang secara mendasar merupakan kritik terhadap pemerintah. Ruang publik kemudian berbeda dari ranah ekonomi dan bukan terkait relasi pasar, namun ruang ini merupakan relasi yang bersifat diskursif, sebuah tempat untuk berdebat dan membebaskan diri, dan bukan tempat untuk menjual dan membeli (Habermas; 1989: 57). Perbedaan antara otoritas negara, pasar ekonomi, maupun demokrasi merupakan hal penting bagi perkembangan teori demokrasi, sebab masyarakat cenderung melihat ruang publik sebagai institusi pengatur terhadap otoritas negara. Studi

⁶ Konsep ruang publik diperkenalkan oleh Jürgen Habermas, seorang sosiolog dan filsuf berkebangsaan Jerman. Konsep ini terdapat dalam karyanya yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft)*, yang diterbitkan pada tahun 1962 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1989. Karyanya ini menjelaskan transformasi konsep ruang publik di Eropa pada abad ke-XVIII dan awal abad ke-XIX dan deklinasinya pada abad ke-XX.

tentang ruang publik ini merupakan ide utama dalam teori demokrasi partisipatoris dan bagaimana opini publik menjadi tindakan politik.

Pemikiran Habermas tentang konsep ruang publik kemudian merevitalisasi proses komunikasi publik secara kritis (Habermas, 1989a, h. 232). Ia menyimpulkan bahwa publisitas (*publicity*) dapat membawa konsep ruang publik menuju demokatisasi terhadap institusi masyarakat madani (*civil society*), walaupun ia tidak memberikan contoh nyata, menawarkan strategi, maupun meramalkan bagaimana kondisi ruang publik pascaborjuasi, terkait perkembangan teknologi dewasa ini.

Terkait media, pemikiran Habermas berfokus pada bagaimana pengaruh komersialisasi ruang publik melalui media massa, relasi publik dan budaya konsumtif. Budaya massa menurut Habermas hanya memuaskan hasrat konsumen semata, tidak mendidik dan tidak menampilkan nilai-nilai apresiasi terhadap konten kultural. Masyarakat kemudian terbuai oleh media, yang menurut Habermas hanyalah ilusi semata dan ruang privat yang dihadirkan oleh media juga tidak menawarkan apa-apa.

“Mass culture has earned its rather dubious name precisely by achieving increased sales by adapting to the need for relaxation and entertainment on the part of consumer strata with relatively little education, rather than through the guidance of an enlarged public toward the appreciation of a culture undamaged in its substance.” (Habermas 1962/1989, h. 165.)

“The world fashioned by the mass media is a public sphere in appearance only. By the same token the integrity of the private sphere which they promise to their consumers is also an illusion.” (Habermas 1962/1989, 171.)

Mengenai radio, televisi dan film, Habermas berpendapat serupa. Ketiga hal tersebut, menurutnya hanya mereduksi jarak di mana pemirsa/pembaca harus mempertahankan jarak itu, dalam bentuk apropriasi yang bersifat privat dan pemirsa/pembaca itu justru tidak dapat memperoleh sesuatu pun darinya (Habermas 1962/1989, h. 170).

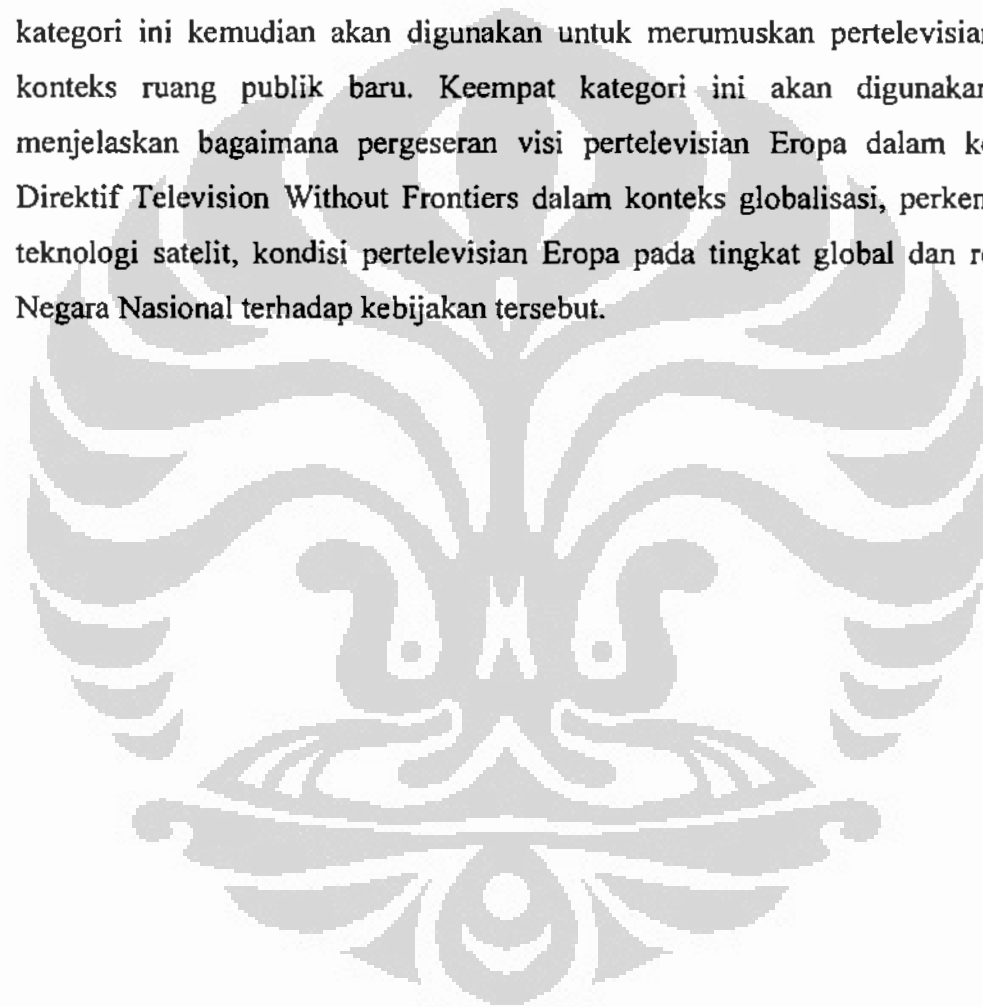
2.3.2. Perspektif Alternatif Mengenai Konsep Ruang Publik dan Pertelevisian

Sisi lain, pendekatan Habermas terkait konsep ruang publik dan media tersebut, tidak menjelaskan bagaimana konsep tersebut dioperasikan melalui struktur masyarakat kapitalis. Sebagai konsekuensinya hubungan media dan masyarakat luas tidak terlihat (Curran dalam Dahlgren & Sparks; 2005: 29). Menurut Curran, Habermas juga mengabaikan bagaimana konsep keuntungan dalam konteks struktur ekonomi kapitalis itu diakumulasikan dan diorganisasikan. Hal itu kemudian tidak menjawab bagaimana hubungan media dengan sistem representasi dalam demokrasi liberal. Curran kemudian mengajukan sebuah model yang merupakan pengembangan konsep ruang publik Habermasian ini.

Konsep ruang publik dan pelayanan publik berbasis penyiaran memiliki hubungan yang jelas. Sisi lain, konsep ruang publik Habermas hanya menekankan dua kutub yang saling bertegangan, antara pihak korporasi dan kontrol negara (Collins, 2002). Hal ini secara kontras mengoposisikan dua hal, antara pasar bebas dan media yang dikuasai oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan oleh Habermas ini kemudian dianggap mereduksi mekanisme dan hubungan korporasi media dalam konteks masyarakat kapitalis di Eropa. Pemetaan ini berguna untuk melihat secara lebih intensif peran masing-masing agen yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, pendekatan Habermas yang menekankan bagaimana relasi korporasi media dan kontrol negara bersifat relevan dengan kondisi pertelevisian pada tahun 1980-an.

Terkait ruang publik dalam pertelevisian, Dahlgren (1995) memformulasikan empat kategori pembentukan ruang publik dalam pertelevisian, yaitu: *struktur sosial, institusi media, interaksi sosiokultural dan konten media*. Kategori pertama menekankan struktur sosial dapat menciptakan aspek lain dalam konsep ruang publik melalui dinamika pada tingkat kesepakatan masyarakat yang bersifat institusional, interaksinya, dan representasi. Dahlgren kemudian menekankan dimensi yang luas untuk bisa memahami pembentukan ruang publik ini, termasuk pengaruh politik, ekonomi dan aspek hukum dalam pembentukan ruang publik ini (Dahlgren, 1995, h. 18). Yang kedua adalah media institusi yang

terkait institusi atau organisasi yang membiayai sektor pertelevisian, baik pemerintah yang juga berfungsi sebagai pengontrol maupun pihak independen yang memberikan kebebasan komunikasi. Yang ketiga adalah interaksi sosiokultural yang terkait bagaimana fungsi media sebagai perekat warga negara dalam hal pembentukan identitas (Ibid: 23). Yang keempat adalah konten media yang terkait upaya warga negara untuk memahami representasi yang terkandung dalam media dan sikap kritis warga negara terhadap hal itu. Keempat dimensi atau kategori ini kemudian akan digunakan untuk merumuskan pertelevisian dalam konteks ruang publik baru. Keempat kategori ini akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pergeseran visi pertelevisian Eropa dalam kebijakan Direktif Television Without Frontiers dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi satelit, kondisi pertelevisian Eropa pada tingkat global dan resistensi Negara Nasional terhadap kebijakan tersebut.



BAB III

PENYAJIAN OBYEK PENELITIAN

3.1. Globalisasi, Pertelevisian Eropa dan Kebijakan Direktif Television Without Frontiers 1989

Tahun 1980-an merupakan periode penting untuk memahami respon pengambilan kebijakan atas perubahan ekonomi global yang turut membawa dampak pada tingkat lokal. Respon ini terkait bagaimana sistem ekonomi neoliberal yang diadopsikan oleh Komunitas Eropa, merupakan solusi atas resesi ekonomi yang terjadi pada tersebut, dengan menempatkan komoditi ke dalam iklim kompetisi dan skema perdagangan bebas. Kondisi ekonomi yang stagnan, baik dalam konteks volume perdagangan maupun dalam konteks produksi konten audiovisual, para pengambil kebijakan kemudian menyusun suatu kebijakan yang berorientasi memiliki nilai tambah, yaitu konten kultural.

Pertelevisian merupakan media alternatif, selain media cetak dan audio (radio). Sisi lain, pertumbuhan kepemilikan televisi dan perkembangan jumlah stasiun televisi pada tahun 1980-an, tidak diikuti oleh reformasi kebijakan dan aturan. Sebelum kebijakan pertelevisian Eropa disusun, skema pertelevisian bersama dibentuk pada tahun 1980-an untuk menyatukan visi pertelevisian Eropa yang pada waktu itu didominasi oleh program televisi Amerika.

Kebijakan Direktif Television Without Frontiers kemudian disusun sebagai respon untuk mengatur lalu-lintas siaran dan melindungi sektor pertelevisian Eropa dari dominasi perdagangan konten audiovisual dari luar Eropa. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai fondasi kebijakan pertelevisian Negara Nasional Komunitas Eropa.

Pada tingkat Negara Nasional, implementasi kebijakan yang bersifat sektoral, khususnya pertelevisian, mendapat resistensi dari pemerintah Prancis yang memiliki tradisi panjang atas perlindungan konten kultural. Pemerintah Prancis kemudian melakukan upaya untuk melindungi sektor ini dari pengaruh produk sejenis dari luar, dengan mengatur skema subsidi perfilman dan menerapkan kuota distribusi siaran. Upaya ini kemudian bertolakbelakang dengan realita pertelevisian Prancis pada tahun 1980-an, baik dalam konteks pemberian

keistimewaan terhadap stasiun televisi privat Canal Plus dan dukungan terhadap film berbiaya besar dalam “*Plan Lang*” yang dianggap sebagai proyek Amerikanisasi. Oleh karena itu pertelevisionan Eropa dan Prancis pada tahun 1980-an sebagai basis pembentukan opini publik perlu didefinisikan kembali. Sebagai langkah awal, akan dijabarkan mengenai globalisasi dan pertelevisionan Eropa.

3.1.1. Globalisasi dan Pertelevisionan Eropa

Globalisasi terkait perubahan ekonomi yang terjadi pada tingkat global dan membawa dampak pada tingkat lokal, yang ditandai oleh perubahan arah kebijakan dalam bentuk penyusunan kebijakan maupun harmonisasi yang bersifat sektoral. Fenomena krisis finansial Bretton Woods yang terjadi pada tahun 1971 dan diikuti oleh krisis minyak pada tahun 1979-1980, merupakan beberapa pemicu globalisasi yang menuntut para pengambil kebijakan untuk mengambil beberapa alternatif solusi, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, kultur, dsb. Terkait pertelevisionan, perkembangan teknologi satelit pada tahun 1980-an mengubah modus penyiaran dan memicu pertumbuhan stasiun televisi baru. Ketiga hal ini, dalam konteks perubahan kebijakan pertelevisionan Eropa, kemudian akan diulas secara singkat satu persatu.

Resesi finansial terjadi pada tahun 1970-an, khususnya semenjak Bretton-Woods mengganti mata uang Dollar sebagai nilai tukar dengan emas pada tahun 1971. Perekonomian dunia kemudian merosot tajam, terkait defisit sistem pembayaran (*balance-of-payments*) maupun defisit volume perdagangan (Cerny et. al., 2005, h. 12). Upaya lembaga keuangan yang dibentuk pascaperang Dunia Kedua ini membawa dampak ketidakpastian nilai tukar (*floating-rate*) dalam pasar mata uang yang menyebabkan defisit volume perdagangan internasional.

Krisis minyak yang terjadi pada tahun 1979-1980 turut membawa perubahan eksternal dalam ranah ekonomi pada tahun 1980-an yang menciptakan tekanan politik pada tingkat domestik, baik di Eropa, Amerika Serikat maupun negara lainnya. Meningkatnya angka inflasi (stagflasi) menciptakan mekanisme ekonomi baru, utamanya penerapan kuota, skema ekspor terbatas, aturan pada tingkat domestik, proteksi industri, pemberian subsidi untuk menanggulangi dampak impor, dsb (Cerny, 2005, h. 9). Para pengambil kebijakan maupun aktor politik, dalam konteks ini kemudian mencari solusi untuk menanggulunginya.

Hasilnya adalah pengurangan peran negara dalam sektor ekonomi yang awalnya melakukan kontrol atas kapital. Firma-firma kemudian diarahkan untuk melakukan ekspansi perdagangan pada tingkat global.

Perkembangan teknologi satelit pada tahun 1980-an menawarkan jangkauan pangsa pasar yang lebih luas. Teknologi ini dapat menjadi acuan untuk berekspansi secara global dalam bidang media sejak negara mengurangi perannya dalam sektor ini di beberapa negara Eropa, khususnya Prancis. Sisi lain, pemanfaatan modus digital via satelit turut merubah standardisasi penyiaran yang berakibat meningkatnya iklim kompetisi antarstasiun penyiaran. Pertumbuhan televisi satelit Eropa yang semula kurang dari 100 saluran televisi, meningkat pada tahun 1990 menjadi 600 saluran pada tahun 1998 (Doyle, 2002, h. 87). peningkatan jumlah saluran ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi kompresi digital yang dapat mengakomodasi 10 saluran dalam satu jalur data (*bandwidth*) yang sama. Hal ini berbeda dengan modus analog yang hanya mengakomodasi satu saluran saja. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan layanan jasa televisi modus digital berkembang pesat. Para penyedia layanan ini kemudian memperoleh keuntungan besar. Nilai total penjualan televisi, baik saluran televisi yang bersifat gratis maupun yang berbayar (*pay-TV*) di Eropa saja berjumlah 2 milyar Dollar pada tahun 1995 dan 3,5 milyar Dollar pada tahun 1999. Sisi lain, sebagian program dan acara yang ditawarkan merupakan produk luar Eropa, khususnya Amerika Serikat.

Kebijakan Direktif TWF 1989 kemudian disusun oleh Komisi Eropa untuk mengintegrasikan sektor pertelevisian Negara Nasional, sebab pada tingkat global, sektor pertelevisian Eropa memiliki posisi lemah dibandingkan dengan pertelevisian lain, contohnya pertelevisian Amerika yang melakukan ekspansi media melalui firma-firma media transnasionalnya. Pada saat yang sama, skema perdagangan layanan dan jasa GATS mengindikasikan posisi pertelevisian Eropa, yang menempatkan produk audiovisual Eropa dalam skema perdagangan bebas. Skema ini kemudian mengilustrasikan sebuah pertarungan kepentingan antara pihak *Motion Pictures Exporter Association of America* (MPEAA) yang mewakili firma media Amerika dan pihak Komunitas Eropa yang dipimpin oleh Prancis.

Masing-masing pihak memiliki pendapat masing-masing atas produk audiovisual, apakah komoditi ekonomi atau produk kultural.

Menanggapi hal tersebut, Komunitas Eropa kemudian mempersiapkan sektor pertelevisian untuk menghadapi fenomena global ini dengan membawa sektor tersebut ke skema perdagangan bebas dan iklim yang kompetitif. Upaya tersebut terkait bagaimana sektor pertelevisian, dalam konteks pilihan dan arah kebijakan, difungsikan sebagai media promosi.

3.1.2. Pilihan dan Arah Kebijakan

Pada dasarnya, pilihan suatu kebijakan terkait dua hal, yaitu upaya proteksi atau promosi. Sektor pertelevisian merupakan salah satu sektor yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus kultural seperti yang dikemukakan oleh Jacques Delors dari Komisi Eropa sebelum peresmian kebijakan Direktif TWF 1989, terkait kesiapan pegiat audiovisual Eropa menghadapi perkembangan teknologi penyiaran via satelit yang dikuasai oleh negara-negara maju: "Ketika teknologi satelit telah siap untuk dimanfaatkan dengan beratus siaran, namun kita semakin jauh tertinggal dari para pelaku industri audiovisual Amerika Serikat dan Jepang" (Theiler, 2001, h. 120). Sektor pertelevisian kemudian diberikan perhatian khusus oleh para pengambil keputusan di Komunitas Eropa, sebab ia memiliki nilai strategis dalam konteks promosi nilai-nilai kultural.

Upaya promosi kemudian diterapkan pada tingkat Uni Eropa. Sedangkan upaya proteksi diterapkan oleh Negara Nasional, contohnya Prancis dengan mengacu perlindungan terhadap kekayaan kultural pada tingkat nasional (*cultural protectionism*). Upaya promosi menciptakan iklim yang kondusif terhadap sektor audiovisual dengan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan mengikutsertakan produk audiovisual dalam konteks liberalisasi perdagangan (Human Development Report, 2004, h. 99). Sedangkan upaya proteksi menciptakan hambatan-hambatan ekonomi yang memiliki implikasi berkurangnya produk impor yang masuk ke dalam skema Pasar Tunggal Uni Eropa. Proteksi terkait bagaimana mengatur arus masuk dan arus keluar produk audiovisual melalui konsep kuota yang melindungi pasar domestik dari ancaman produk luar Eropa. Dengan demikian, produk audiovisual tidak dapat terukur kualitasnya dalam ranah kompetisi ekonomi.

Alih-alih menerapkan skema proteksi, pertelevisian Komunitas Eropa melalui kebijakan Direktif Television Without Frontiers diarahkan ke skema kebijakan yang bersifat promotif, untuk mengenalkan nilai-nilai kultural ke antarnegara Nasional maupun negara di luar Eropa. Tabel berikut menjelaskan arah dan kebijakan Komunitas Eropa terhadap sektor pertelevisiannya.

Perdagangan dan Kebijakan Kultural dalam Konteks Globalisasi

Market Structure		
	I Monopolistic	II Competitive
High	Least Global Protectionist Trade policy Promotive Cultural Policy	Economically Global Liberal Trade policy Promotive Cultural Policy
Institutional Parity		
Low	III Culturally Global Protectionist Trade Policy Laissez-faire Cultural Policy	IV Most Global Liberal Trade Policy Laissez-faire Cultural policy

Dikutip dari Flibbert, Andrew., J., *Commerce in Culture*, h.19

3.1.3. Pertelevisian Pan-Eropa: Integrasi Awal Sektor Pertelevisian Transnasional

Sebelum adanya kebijakan Direktif TWF 1989, telah ada skema pertelevisian bersama yang berusaha mengintegrasikan saluran televisi negara-negara Eropa. Pembentukan skema ini memiliki alasan khusus, karena belum ada kebijakan yang menyatukan visi dan misi saluran televisi negara-negara tersebut dalam konteks pertelevisian transnasional. Skema ini juga tidak memiliki landasan hukum untuk mengikat stasiun televisi Negara Nasional dalam visi maupun misi skema pertelevisian tersebut. Akan tetapi, pembentukan skema ini merupakan inisiatif penting untuk mengetahui bagaimana posisi pertelevisian negara-negara Eropa pada tingkat global. Skema pertelevisian ini dalam penerapannya gagal

dilanjutkan, terkait masalah bahasa, kuota penyiaran yang berbeda untuk setiap negara anggota, dan penguasaan satelit oleh korporasi media.

Bergabungnya stasiun-stasiun televisi dalam skema pertelevisian bersama merupakan respon stasiun televisi Eropa atas globalisasi media yang terjadi pada tahun 1980-an. Menurut Chalaby (2005), kesepakatan bersama yang mengatur distribusi konten program ke negara-negara tujuan ini bertujuan untuk mengadopsikan teknologi satelit yang mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1982. Skema pertelevisian bersama kemudian dibuat, walaupun dalam praktiknya banyak ditemukan kendala yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala teknis terkait kuota penyusunan acara bagi masing-masing televisi. Kendala nonteknis terkait kendala linguistik dalam siaran dan sektor pembiayaan yang merupakan elemen penting pengoperasian skema tersebut. Di lain pihak, perkembangan pertelevisian satelit tidak diikuti oleh apresiasi oleh pangsa pasar Eropa sendiri. Menurut Doyle (2002), hal ini disebabkan oleh permasalahan linguistik saluran televisi Negara Nasional. Masing-masing stasiun televisi berlomba untuk memuat program berbahasa sesuai dengan bahasa nasional mereka. Skema pertelevisian bersama merupakan inisiatif *European Broadcasting Union*, lembaga yang menaungi stasiun televisi publik negara-negara Eropa sejak tahun 1950.

3.1.4. Pertelevisian Bersama Eurikon

Eurikon merupakan sebuah proyek pertelevisian eksperimental yang dibentuk oleh *European Broadcasting Union* pada tahun 1982 (Chalaby, 2005, h. 45). Proyek ini merupakan kolaborasi beberapa Negara Nasional Komunitas Eropa, di antaranya adalah stasiun televisi IBA (Inggris), RAI (Italia), ORF (Austria), NOS (Belanda), dan ARD (Jerman Barat). Secara teknis stasiun televisi Pan-Eropa ini mentransmisikan program acaranya ke 15 negara Eropa selama seminggu bergantian. Konten acaranya bersifat variatif misalnya program berita, berdasarkan sudut pandang Negara Nasional dan bahasa komunikasinya yang bersifat multilingual. Sisi lain, tidak ada satupun stasiun televisi Prancis yang tergabung ke dalam skema pertelevisian bersama Eurikon.

Eurikon dioperasikan oleh sekelompok kecil stasiun penyiaran yang dinamakan *The Group of Experts* yang juga bekerja dalam struktur EBU (Collins, 1998, h. 58). Kelompok ini didirikan pada bulan November tahun 1980 di kota

Venice atas inisiatif stasiun televisi RAI dari Italia. Kelompok ini berjasa mengoperasikan dan mengembangkan Eurikon ke negara-negara yang tergabung ke dalam skema pertelevisian bersama tersebut. Jaringan pertelevisiannya kemudian dimanfaatkan oleh institusi Komunitas Eropa, khususnya Parlemen Eropa untuk berkomunikasi dengan para pemilih di Negara Nasional. Selain sebagai media komunikasi dan penyampai informasi, jaringan pertelevisian ini menawarkan pelbagai jenis acara variatif yang disiarkan oleh stasiun televisi anggota Eurikon. Acara-acara ini meliputi berita, dokumenter, drama, seni, olahraga, hiburan ringan, program untuk anak-anak, film *feature*, dan program religius.

Jumlah Program Yang Disiarkan Oleh Proyek Eksperimental Eurikon Berdasarkan Stasiun Siaran dan Program

Tipe Program	NOS	ORF	RAI	ARD	IBA	Total
Berita	397	376	556	698	395	2.422
Dokumenter	455	244	216	360	372	1.647
Drama	86	188	260	20	287	841
Seni	77	292	270	147	172	958
Olah raga	82	58	150	147	105	542
Hiburan ringan	194	192	320	154	407	1.267
Program anak	138	185	176	90	82	671
Film feature	90	221	110	97	112	630
Program religius				15	60	75
Kelanjutan		221	2	20	24	267
Total	1.519	1.577	2.060	1.748	2.016	9.320

Dikutip dari Collins, *From Satellite to Single Market: New Communication Technology and European Public Television*, h. 62

Stasiun televisi eksperimental tersebut secara teknis berhasil dioperasikan. Sisi lain, pelbagai upaya untuk mengembangkan skema pertelevisian bersama ini dilakukan. Enam negara anggota Eurikon memberikan sumber daya finansial bagi kelangsungan Eurikon dan melakukan studi kelayakan guna membuka peluang bantuan dari beberapa institusi Komunitas Eropa (Chalaby, 2005, h. 45). Upaya tersebut membuahkan hasil. Skema pertelevisian itu bertransformasi menjadi skema yang baru, Europa TV pada tanggal 5 Oktober 1985. Sisi lain, keanggotaannya berubah. Austria (ORF) dan Inggris (IBA) keluar dari keanggotaan Eurikon. Anggota yang baru Europa TV adalah, NOS (Belanda), RAI (Italia), RTE (Irlandia), RTP (Portugal), dan ARD (Jerman). Europa TV bermarkas di NOS Studio Hilversum, Belanda. Keberhasilan ini tidak terlepas dari

peran European Broadcasting Union, sebuah konsorsium pertelevisian yang didirikan pada tahun 1950-an.

Pada tahun 1980, EBU menyiapkan infrastruktur untuk Eurikon via satelit L-SAT yang ditempatkan di Italia untuk penggunaan selama tiga tahun (Collins, 1998, h. 57). Biaya operasional sebesar dua pertiga dibebankan kepada pihak Inggris dan Italia. Sedangkan satu pertiga dibebankan kepada Austria, Belgia, Belanda, Denmark, Spanyol, Swiss, dan Canada. Dua tahun kemudian EBU mempertimbangkan kembali untuk memperpanjang masa penggunaan satelit tersebut, sebab menurut pihak EBU biaya pengeluaran dan operasional tidak seimbang (Ibid). Pihak EBU juga mempermasalahkan konten program stasiun televisi Inggris yang bersifat komersial dan tidak mencerminkan segi keeropeaan.

EBU kemudian merancang proposal untuk membangun infrastruktur satelit baru yang bervisi keeropeaan sesuai garis besar rekomendasi *Parliamentary Assembly of Council of Europe* (Rekomendasi bernomor 749) pada tahun 1975 tentang fungsi penyiaran yang menekankan: "Penyiaran memiliki fungsi lebih lanjut untuk menyatukan Eropa dan merekomendasikan kebijakan yang lebih aktif terhadap pertukaran acara pertelevisian antarnegara Nasional, di mana alih bahasa dalam suatu acara diutamakan ketimbang alih suara (Collins, 1998, h. 59). Stasiun penyiaran Negara Nasional juga harus menginformasikan aktifitas institusi Eropa" (Council of Europe 1991, h. 23, dikutip dari Collins, 1998, h. 59).

Hal inilah yang menyebabkan Inggris keluar dari keanggotaan Eurikon. Konten acara stasiun penyiaran Inggris tidak sesuai visi dan misi Eurikon. Hal ini terkait keinginan Inggris untuk membawa sektor pertelevisian satelitnya ke skema komersial melalui perantara Sky Television yang kemudian beralih nama menjadi Satellite Television Limited. Kondisi ini segera ditanggapi oleh Dewan Administratif EBU pada bulan Januari 1982 (*Decisions of the Administrative Council* tanggal 18 Januari 1982, dikutip dari Collins, 1997, h. 52), beberapa bulan sebelum satelit Sky Television beroperasi, dengan menginformasikan kepada stasiun penyiaran Negara Nasional agar tidak ikut bergabung bersama Inggris. Pada saat yang sama, Sky Television yang telah berganti nama menjadi Satellite Television Limited mendaftarkan untuk masuk ke dalam keanggotaan EBU; namun keinginan Inggris ini ditolak oleh EBU.

Perkembangan pertelevisian bersama tersebut kemudian gagal untuk dilanjutkan, karena kontrol distribusi, khususnya satelit dikuasai oleh firma media dari luar Eropa, khususnya dari Amerika Serikat dan keinginan Inggris untuk membawa Eurikon ke dalam skema komersial pertelevisian. Oleh karena itu, landasan hukum untuk mengintegrasikan pertelevisian Negara Nasional disusun oleh Komunitas Eropa dalam kebijakan Direktif Television Without Frontiers pada tahun 1989.

3.2. Kebijakan Direktif Television Without Frontiers 1989

Kebijakan Direktif⁷ Television Without Frontiers (89/552/EEC) atau yang kemudian disebut sebagai kebijakan Direktif TWF 1989, merupakan cetak-biru kebijakan audiovisual Komunitas Eropa yang diresmikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1989. Kebijakan ini bertujuan untuk melengkapi skema Pasar Tunggal, dalam hal pelayanan berbasis penyiaran dan aktivitas yang terkait lainnya.⁸ Kebijakan ini menyusun aturan berbasis penyiaran bagi stasiun televisi yang ingin menyiarkan programnya ke seluruh negara Komunitas Eropa. Kebijakan ini juga mengatur harmonisasi dengan aturan pada tingkat Negara Nasional.

Kerangka hukum kebijakan Direktif TWF 1989 adalah Traktat Roma, khususnya pasal 59 dan 60.⁹ Landasan hukum lainnya terdapat dalam Konvensi

⁷ Kebijakan Direktif merupakan bagian dari legislasi sekunder (*secondary legislation*) yang bersifat *direct effect*, yaitu kebijakan yang mengikat Negara Nasional, namun Negara Nasional tetap diberikan kebebasan untuk memilih bentuk dan metode dalam mencapai suatu tujuan. "(...) *A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods (...)*" (Pasal 189, Traktat Roma, 1957)

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf

⁸ *EC Consultation on the Television Without Frontiers Directive.*

<http://www.fub.it/files/ECconsultationontheTelevisionWithoutFrontiersDirective.pdf>

⁹ Pasal 59 (Perihal Pelayanan): "*Within the framework of the provisions set out below, restrictions on freedom to provide services within the Community shall be progressively abolished during the transitional period in respect of nationals of Member States who are established in a State of the Community other than that of the person for whom the services are intended. The Council may, acting unanimously on a proposal from the Commission, extend the provisions of this Chapter to nationals of a third country who provide services and who are established within the Community*".
Pasal 60: "*Services shall be considered to be "services" within the meaning of this Treaty where they are normally provided for remuneration, in so far as they are not governed by the provisions relating to freedom of movement for goods, capital and persons. "Services" shall in particular include: (a) activities of an industrial character; (b) activities of a commercial character; (c) activities of craftsmen; (d) activities of the professions. Without prejudice to the provisions of the Chapter relating to the right of establishment, the person providing a service may, in order to do*

Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*) pasal 10, terkait kebebasan menerima informasi,¹⁰ yang dirumuskan pada tahun 1949 oleh European Council dan landasan hukum ini merupakan prinsip yang diadopsi oleh 45 negara Eropa (Collins, 1997, h. 176).

Kerangka hukum kebijakan ini ditegaskan kembali dalam *European Community Treaty*, utamanya untuk mengaitkan produk audiovisual dengan konteks liberalisasi perdagangan dalam skema Pasar Tunggal. Pasal-pasal yang terkait hal tersebut adalah pasal 23, 25, 28-29 (tentang kebebasan masuknya barang), pasal 39-55 (tentang kebebasan manusia, pelayanan dan modal), pasal 81-89 (tentang kebijakan kompetisi), pasal 95 (tentang harmonisasi yang bersifat teknis, termasuk pelayanan televisi yang terpadu), pasal 149 (tentang pendidikan), pasal 150 (tentang pelatihan profesional dalam sektor audiovisual), pasal 151 (tentang budaya), dan pasal 157 (tentang industri).

Pasal 128 dalam Traktat Maastricht (1992) kemudian memberikan landasan hukum baru bagi Komisi Eropa untuk mengadopsikan secara penuh kebijakan audiovisual, khususnya sektor pertelevisian. Sedangkan pada Traktat Amsterdam (1997) kebijakan penyiaran terdapat dalam bagian *Protocol on the System of Public Broadcasting* (Tatacara Penyiaran Publik).¹¹ Kebijakan ini dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan. Revisi pertama adalah pembentukan Masyarakat Informasi (*Information Society*) pada tahun 1997. Revisi kedua adalah penyusunan kebijakan Direktif *Audiovisual Media Services* (AVMS) dan MEDIA sebagai programnya pada tahun 2007.¹² Revisi kedua diatur

so, temporarily pursue his activity in the State where the service is provided, under the same conditions as are imposed by that State on its own nationals". (Traktat Roma, 25 Maret 1957).

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf

¹⁰ Pasal 10 (Perihal kebebasan ide, pemikiran, dan agama) Freedom of thought, conscience and religion

(1) "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance
(2) The right to conscientious objection is recognised, in accordance with the national laws governing the exercise of this right". (Charter of Fundamental Rights of the European Union(2000/C364/01))

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

¹¹ EN C 364/10 Official Journal of the European Communities 18.12.2000

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en//FTU_4.17.5.pdf

¹² Ibid

dalam *European Community Treaty*, khususnya pasal 151 dan 157. Kedua pasal tersebut secara resmi diberlakukan pada tahun 2007. *Penelitian ini kemudian berfokus pada awal mula kebijakan ini diberlakukan, yaitu pada tahun 1989 sampai revisi pertama kebijakan Direktif ini pada tahun 1997.*

Kebijakan Direktif Television Without Frontiers (TWF) 1989 terdiri dari 27 Pasal dan 7 bab. Bab pertama membahas tentang definisi penyiaran. Bab kedua menjelaskan perihal umum (*general provisions*). Bab ketiga menjelaskan tentang promosi distribusi dan produksi program audiovisual. Bab keempat menjelaskan tentang iklan televisi dan dukungan sponsor. Bab kelima menjelaskan tentang perlindungan anak di bawah umur. Bab keenam menjelaskan tentang hak untuk menjawab (*right of reply*). Bab terakhir adalah penutup. Secara umum kebijakan Direktif ini mencakup lima hal, yaitu tatapenyiaran, perihal iklan, perlindungan anak-anak di bawah umur, produksi, termasuk distribusi konten audiovisual Eropa dan hak untuk menjawab, yaitu hak seseorang untuk mengambil upaya hukum jika seseorang tersebut telah dirugikan oleh media.

Secara umum, beberapa pasal dalam kebijakan ini dipatuhi oleh Negara Nasional, khususnya terkait iklan televisi, dukungan sponsor, perlindungan anak di bawah umur, pelarangan iklan rokok, dan pembatasan iklan minuman beralkohol. Akan tetapi, pada tingkat Negara Nasional, enam negara (Belgia, Denmark, Prancis, Yunani, Italia dan Luxembourg) menolak usulan kebijakan Direktif ini, khususnya terkait klausul dalam pasal 4 dan 5 tentang aturan kuota. Beberapa pasal dalam kebijakan ini juga ditafsirkan secara berbeda oleh negara pihak ketiga (Amerika Serikat), terkait kesepakatan kebebasan ekspresi dalam konteks penyiaran kembali program televisi. Sebelum sampai pada penjelasan tersebut, berikut ini beberapa hal yang terdapat dalam kebijakan TWF.

Perihal iklan, dalam Pasal 11 kebijakan Direktif TWF 1989 mengatur durasi maksimum iklan dalam suatu program televisi, sebesar 15% dari jumlah total waktu penyiaran atau maksimum 20% dalam satu jam penyiaran. Iklan disisipkan pada saat jeda antarprogram. Tayangan iklan yang dapat memengaruhi anak-anak di bawah umur juga diawasi. Iklan minuman beralkohol dibatasi, dengan kriteria tertentu (Pasal 15). Untuk iklan produk rokok dan obat yang membutuhkan resep dokter dilarang untuk ditampilkan (Pasal 13). Sedangkan

dukungan sponsor untuk program televisi diperbolehkan, asalkan hal itu tidak memengaruhi kebebasan editorial program televisi (Pasal 17). Dukungan sponsor itu juga tidak memengaruhi pemirsa agar membeli produknya dan dukungan tersebut tidak termasuk program berita.

Perihal perlindungan anak di bawah umur, kebijakan ini melarang tayangan kekerasan di televisi dan pornografi, kecuali tayangan itu disiarkan pada jam tertentu dengan asumsi si anak tidak dapat menontonnya pada jam tersebut (Pasal 22). Pada saat si anak menonton, diperlukan pendampingan teknis. Simbol visual dan peringatan ditampilkan dalam setiap program untuk memberikan informasi mengenai jenis tayangan, apakah segala umur, anak-anak, ataupun untuk orang dewasa.

3.2.1. Tatapenyiaran

Perihal tatapenyiaran diatur dalam Pasal 2, bab aturan umum (*general provisions*). Pada pasal 2 setiap Negara Nasional menjamin transmisi siaran televisi di wilayah yurisdiksinya, memanfaatkan sarana satelit dan jalur frekuensi yang berada di Negara Nasional. Butir kedua menyebutkan kebebasan penerimaan sinyal dan Negara Nasional tidak menghalangi pentransmisi kembali oleh stasiun penyiaran Negara Nasional yang lain. Akan tetapi jika stasiun televisi negara lain itu menyiarkan program yang bertentangan dengan Pasal 22 (perlindungan anak terhadap konten kekerasan dan pornografi), pentransmisi kembali itu bisa ditunda. Bab kedua, Pasal 2 kebijakan Direktif TWF 1989:

1. *Each Member State shall ensure that all television broadcasts transmitted by broadcasters under its jurisdiction, or by broadcasters who, while not being under jurisdictions of any Member State, make use of frequency or a satellite capacity granted by, or a satellite up-link situated in, that Member State.*

Comply with the law applicable to broadcasts intended for the public in that Member State.

2. *Member State shall ensure freedom of reception and shall not restrict retransmission on their territory of television broadcast from other Member States for reasons which fall within the fields coordinated by this Directive. Member States may provisionally suspend retransmissions of television broadcasts if following conditions are fulfilled: (a) a television broadcast coming from another Member State manifestly, seriously and gravely infringes Article 22; (b) during the previous 12 months, the broadcaster has infringed the same provision on at least two prior occasions; (c)*

the Member State concerned has notified the broadcaster and the Commission in writing of the alleged infringements and of its intention to restrict retransmission should any such infringement occur again; (d) consultations with the transmitting State and the Commission have not produced an amicable settlement within 15 days of the notification provided for in point (c), and allege infringement persists (Council Directive, 3 Octobre 1989, Official Journal of European Communities, No. L 298/23)¹³

Perihal tatapenyiaran ini telah sesuai dengan Konvensi hak Asasi manusia Eroopa (*European Convention of Human Rights*), khususnya pasal 10 mengenai kebebasan ekspresi dan menerima informasi: "Setiap orang berhak memperoleh kebebasan ekspresi. Hak tersebut termasuk memertahankan pendapat dan menerima informasi dan ide tanpa gangguan dari otoritas publik, terkait batas wilayah" (Wilkins: 205). Hal ini memberikan dasar hukum bagi Negara Nasional untuk menerima transmisi siaran dari Negara Nasional yang lain. Akan tetapi, kebebasan ini tidak menjamin keberadaan negara ketiga, khususnya Amerika Serikat atau negara selain Negara Nasional Eropa yang memiliki sarana dan transmisi lebih baik untuk menyiarkan program televisinya di negara-negara Eropa.

Aturan tatapenyiaran ini dalam praktiknya tidak bisa membendung produk audiovisual dari Amerika Serikat, khususnya siaran televisi TNT-Cartoon Network. Kasus ini kemudian dibawa ke tingkat Peradilan Eropa, sesuai dengan aturan *right-to-reply*.¹⁴ Badan Peradilan Eropa kemudian memutuskan program televisi tersebut tidak melanggar yurisdiksi penyiaran, terkait letak stasiun penyiaran itu, walaupun acara yang ditampilkan bukan produk Eropa. Menurut Badan tersebut, penentuan posisi stasiun penyiaran tersebut terletak pada pusat aktifitas stasiun televisi itu di salah satu Negara Nasional. Negara Nasional kemudian mengambil peran untuk menentukan posisi stasiun televisi itu, apakah di Negara Nasional Eropa atau di luar Eropa.

Oleh karena itu, penyiaran program tersebut tidak dilarang. Negara Nasional, sesuai aturan yurisdiksi tatapenyiaran, tidak dapat melarang konten

¹⁴ "The Television Without Frontiers: Cornerstone European Broadcasting Policy"
http://www.global.asc.upenn.edu/docs/anox06/secure/july18/valcke/18_valcke_reading1.pdf

televisi, sepanjang hal itu tidak melanggar aturan yang lain, misalnya perlindungan untuk anak di bawah umur, khususnya Pasal 22. Kasus tersebut kemudian menampilkan bagaimana dominasi konten audiovisual Amerika Serikat bukan melalui penguasaan satelit semata, namun melalui kerjasama dengan firma media Eropa untuk bisa masuk pasar domestik di Negara Nasional. Contoh yang paling nyata adalah kasus stasiun televisi Canal Plus di Prancis yang akan dipaparkan di bagian selanjutnya.

Aturan kuota penyiaran kemudian dirumuskan oleh Komunitas Eropa untuk melindungi pertelevisian nasional dari dominasi pasar audiovisual Amerika Serikat, terutama film dan program televisi. Setiap saluran televisi kemudian diwajibkan untuk menyiarkan program asli Eropa dengan besaran yang telah ditentukan. Sisi lain, besaran ini kemudian ditolak oleh beberapa Negara Nasional, karena dianggap dapat memengaruhi produksi audiovisual domestik.

3.2.2. Kuota Distribusi dan Produksi Program Televisi

Pasal 4 kebijakan Direktif TW mengatur penyiaran produk Eropa yang harus dipenuhi oleh stasiun televisi publik sebesar 50,1 %. Sebelumnya pada bulan Mei tahun 1989, beberapa bulan sebelum kebijakan TWF disahkan, enam Negara Nasional menolak proposal yang ditawarkan oleh Komisi Eropa, terkait aturan kuota penyiaran yang awalnya sebesar 60% dan hal itu harus dipenuhi oleh stasiun televisi, termasuk di dalamnya program berita, iklan, acara ringan, olah raga dan program berbasis *teletext* (Wilkins, 1991, h. 201). Negara yang menolak usulan tersebut adalah Belgia, Denmark, Prancis, Yunani, Italia dan Luxembourg. Penolakan ini kemudian ditengahi oleh Komisi Eropa dengan menurunkan jumlah kuota tersebut. Kebijakan itu bertujuan untuk mendorong distribusi dan produksi konten audiovisual asli Eropa. Negara Nasional dengan demikian bertanggungjawab atas produksi konten audiovisual Eropa dengan memberikan kesempatan pada pegiat audiovisual Eropa untuk berpartisipasi melalui karyanya dalam program televisi.

Sisi lain, klausul dalam Pasal 4 yang menyebutkan: “Negara Nasional harus menjamin stasiun penyiaran menyiarkan produk Eropa, jika dapat dilakukan dan dengan cara yang sesuai, *where practicable and by appropriate means* [...]”, menimbulkan persepsi berbeda Negara Nasional (Wilkins, 1991, h. 207; Levy,

2005, h. 40). Klausul tersebut bermakna stasiun penyiaran tidak diwajibkan untuk mematuhiya dan tidak bersifat mengikat. Terkait klausula ini, Komisi Eropa sendiri mengakui bahwa hal tersebut merupakan sebuah komitmen politik, dan bukan sebuah komitmen hukum. Hal inilah yang menyebabkan pihak Inggris dan Jerman mundur dari kesepakatan dalam Direktif ini. Hanya negara Prancis menyetujuinya (Levy: 40). Bab ketiga, Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Member states shall ensure where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve for European works, within the meaning of Article 6, a majority proportion of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising and teletext services. This proportion having regard to the broadcaster's informational, educational, cultural, and entertainment responsibilities to its viewing public, should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria (Council Directive, 3 October 1989, Official Journal of European Communities, No. L 298/23)

Sedangkan Pasal 5 menjelaskan: stasiun penyiaran harus memenuhi setidaknya 10% waktu penyiaran atau 10% biaya produksi program Eropa berasal dari produser independen. Komisi Eropa bertanggungjawab untuk menjamin hal ini. Oleh karena itu, Negara Nasional diminta untuk melaporkannya setiap dua tahun, termasuk data statistik mengenai terpenuhinya kuota berdasarkan Pasal 4 dan 5. Untuk hal yang mendesak, Negara Nasional diberi kewenangan untuk mengabaikan aturan mengikat tersebut jika memungkinkan, terkait permasalahan linguistik/bahasa. Bab ketiga, Pasal 5 kebijakan Direktif TWF 1989 berbunyi sebagai berikut:

Member States shall ensure, where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve at least 10% of their transmission time, excluding the time appointed to news, sport events, games, advertising and teletext services, or alternately at the discretion of the Member State, at least 10% of their programming budget, for European works created by producers who are independent of broadcasters' informational, educational, cultural and entertainment responsibilities to its viewing public, should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria; it must be achieved by earmarking adequate proportion for recent works, that is to say works transmitted within five years of their production (Council Directive, 3 October 1989, Official Journal of European Communities, No. L 298/23).

Alokasi waktu penyiaran sebesar 10% maupun pembiayaan untuk produksi independen tersebut merupakan hasil dari lobi politik pihak yang

termasuk di dalam pasal tersebut (Levy, 2005, h. 40). Hal ini terkait kondisi produksi konten audiovisual Eropa yang dikuasai oleh stasiun televisi publik. Lobi yang dibuat oleh produser independen tersebut bertujuan untuk mengambil porsi subsidi yang diatur oleh kebijakan tersebut.

Pelaporan atas perkembangan kebijakan terkait distribusi program tersebut dilakukan setiap dua tahun. Sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Eropa pada bulan Oktober 1991 sampai Desember 1993 terhadap pertelevisian terkait kuota tersebut hasilnya mengecewakan (Levy, 2005, h. 40). Uni Eropa menemukan hanya 70 dari 105 saluran televisi memenuhi kuota tersebut. Laporan kedua yang berlangsung pada tahun 1993-1994 menyebutkan, hanya 99 dari 140 saluran televisi memenuhi kuota. Penurunan ini disebabkan oleh perkembangan saluran televisi berbasis satelit. Sebagian besar saluran televisi yang tidak memenuhi kuota tersebut menggunakan izin satelit nondomestik dari Inggris. Laporan pengawasan ketiga yang dilakukan pada tahun 1995-1996 menyebutkan 189 saluran dari 214 saluran televisi yang memenuhi kuota. Pada tahun 1996, laporan dilakukan kembali dan hasilnya adalah penurunan jumlah saluran televisi yang memenuhi kuota tersebut, 142 dari 214 saluran televisi. Laporan itu juga menyebutkan bahwa peningkatan tersebut terjadi di negara-negara Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Belanda dan Portugal. Sedangkan di negara Belgia, Yunani, Luxembourg dan Inggris, jauh dari peningkatan; walaupun jumlah saluran televisi di negara-negara tersebut terjadi peningkatan.

Terkait pembatasan kuota untuk produk audiovisual Eropa, Prancis merupakan negara yang paling menentang aturan ini, sebab pembatasan itu dapat memengaruhi industri konten audiovisualnya. Sisi lain, penolakan Prancis itu memiliki alasan, sebab pertelevisian Prancis pada dasarnya bertujuan untuk promosi kultural. Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan mengenai implikasi kebijakan tersebut di negara Prancis dan respon negara tersebut terhadap penerapan kebijakan itu, khususnya terkait kuota penyiaran.

Permasalahan pertama adalah tatapenyiaran yang mengatur lalu lintas penyiaran di negara-negara Komunitas Eropa. Hal ini yang ditentang oleh pihak Amerika Serikat melalui skema perdagangan dan pelayanan GATS yang berusaha menyertakan konten audiovisual sebagai komoditi perdagangan. Semenjak

perkembangan pertelevisian via teknologi satelit, produk audiovisual dari luar Eropa yang menawarkan konten lebih menarik, dengan mudah masuk ke negara-negara Eropa. Hal ini menimbulkan implikasi melemahnya industri audiovisual domestik Negara Nasional.

Permasalahan kedua adalah kuota yang harus dipenuhi oleh masing-masing Negara Nasional untuk menyiarkan program Eropa yang ditentukan dalam kebijakan Direktif TWF 1989. Kuota yang terlampau besar itu kemudian ditolak oleh Negara Nasional dan salah satunya adalah Prancis, sebab aturan itu dapat melemahkan produksi konten audiovisual domestik. Sisi lain, Prancis memiliki tradisi perlindungan atas produk kultural. Bagian selanjutnya akan diulas bagaimana implikasi kebijakan Direktif TWF 1989 itu pada tingkat negara Prancis dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan sektor pertelevisian.

3.2.3. Komunitas Eropa dan Skema Perdagangan GATS

GATS (*General Agreement on Trade and Services*) yang dimulai pada tahun 1986 merupakan skema perdagangan internasional yang mengatur sektor layanan dan jasa.¹⁵ Pertelevisian termasuk ke dalam skema tersebut. Sisi lain, skema perdagangan ini memosisikan sektor audiovisual Eropa, khususnya pertelevisian Negara Nasional dalam posisi yang tidak menguntungkan. Produk audiovisual akan disertakan ke dalam skema perdagangan bebas tersebut, sehingga produk luar dari Eropa dapat dengan mudah masuk pangsa pasar di Eropa. Situasi inilah yang dikhawatirkan oleh pengambil kebijakan pada tingkat Komunitas Eropa. Skema ini secara tidak langsung mengancam eksistensi konten dan produk audiovisual pada tingkat Negara Nasional (Doyle: 100).

¹⁵ Definisi sektor audiovisual termaktub dalam dokumen WTO tertanggal 15 Juni tahun 1998 tentang pelayanan sektor audiovisual. Dokumen ini mencantumkan sektor tersebut ke dalam subsektor pelayanan komunikasi (*communication service*) yang terdiri dari enam subkategori menurut *United Nations Provisional Central Product of Classification (CPC)*: a. gambar bergerak, termasuk rekaman video dan pelayanan distribusinya (CPC 9611), b. gambar bergerak menggunakan proyektor (CPC 9612), c. pelayanan radio dan televisi (CPC 9613), d. pelayanan transmisi radio dan televisi (CPC 7524), e. perekaman suara (CPC NA), lain-lain (kategori CPC tidak tercantum, melingkupi produk multimedia). Dokumen ini dikeluarkan oleh WTO melalui *Council of Trade and Services* tertanggal 15 Juni 1998, *Audiovisual Services: Background Note by the Secretariat*.

www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/w40.doc

Pada dasarnya, semua negara anggota yang tergabung dalam skema GATS memiliki komitmen spesifik untuk mematuhi skema dalam kesepakatan tersebut, yang terbagi berdasarkan sektornya.¹⁶ Akan tetapi, pada tahun 1994 ketika skema GATS mencapai tahap akhir, hanya 19 negara anggota WTO yang memiliki komitmen untuk menyertakan sektor audiovisual ke dalam skema tersebut (Messerlin, et.al., 2004, 32). Instrumen kebijakan atas konten audiovisual yang dimiliki oleh masing-masing negara menyebabkan kesepakatan dalam bidang jasa dan pelayanan ini mengalami kebuntuan. Anggota WTO lainnya yang dipimpin oleh Komunitas Eropa tetap pada pendiriannya untuk menolak penyertaan sektor audiovisual ke dalam skema tersebut. Negara-negara yang bersetuju atas skema tersebut didominasi oleh negara yang memiliki besaran industri audiovisual yang besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, India dan Hongkong. Sedangkan negara yang menolak memiliki alasan tertentu, misalnya Prancis yang ingin mengurangi pengaruh budaya asing masuk ke negaranya melalui konten kultural. Sedangkan yang lain, misalnya Australia dan Kanada merancang produk audiovisual domestik sebagai instrumen untuk membangun dan memperkuat identitas nasional.

Terkait kebijakan negara-negara anggota GATS dalam sektor audiovisual, beberapa negara memiliki tradisi tersendiri. Terkait pembatasan akses terhadap konten audiovisual, khususnya perfilman, dilakukan oleh negara-negara anggota GATS, seperti kuota perfilman (Mexico, Korea Selatan dan Spanyol), larangan pengalihsuaraan film luar negeri (Mexico), perizinan untuk pengalihsuaraan film luar negeri (misalnya di Spanyol, distributor film mendapat izin untuk mengalihkansuara film luar negeri jika mereka telah membeli beberapa film nasional), pembatasan impor film (misalnya di India, batasan impor film sejumlah 100 film per tahun). Sedangkan negara-negara atau entitas politik yang menerapkan tatapenyiaran, khususnya radio, televisi dan penyiaran lain adalah

¹⁶ Under the Provisional Central Product Classification, CPC 9611 is further divided into: Promotion or advertising services (CPC 96111); Motion picture or video tape production services (CPC 96112); Motion picture or video tape distribution services (CPC 96113); and Other services in connection with motion picture and video tape production and distribution (CPC 96114). CPC 9612 is subdivided into: Motion picture projection services (CPC 96121); and Video tape projection services (CPC 96122). CPC 9613 is subdivided into: Radio services (CPC 96131); Television services (CPC 96132); and Combined programme making and broadcasting services (CPC 96133). CPC 7524 is divided into: Television broadcast transmission services (CPC 75241); and Radio broadcast transmission services (CPC 75242). Lihat Pelayanan Audiovisual. Background Note by the Secretariat, WTO doc. S/C/W/40 of 15 June 1998

Komunitas Eropa, Kanada, dan Australia (Zampetti, 2003, h.6). Sedangkan Prancis merupakan satu-satunya negara di Komunitas Eropa yang menerapkan kebijakan ketat atas distribusi perfilman, dan izin penyiaran.

Penolakan Komunitas Eropa atas penyertaan produk audiovisual tersebut semata-mata karena ketidakjelasan definisi produk audiovisual, khususnya menyangkut apa definisi produk impor atau aturan mengenai asal produk audiovisual (Messerlin, et.al., 2004, h. 35). Bagi Komunitas Eropa, terutama negara Prancis, bagaimana mendefinisikan produk audiovisual asli Prancis itu tidaklah mudah. Misalnya saja, *Centre National de la Cinématographie*, telah merumuskan tiga poin untuk menentukan produk audiovisual asli Prancis: film inisiatif Prancis (*french-initiatives films*) atau 100% karya orang Prancis, film asing yang mayoritasnya adalah Prancis (*foreign majority co-productions*), dan film yang telah disetujui (*approved films*). Mengenai aturan asal film, Fifth Element merupakan salah satu contoh bagaimana mendefinisikan hal tersebut. Film ini merupakan film yang didanai oleh firma asal Prancis, tapi sebagian pengambilan gambar dilakukan di London, Inggris. Film ini mempekerjakan aktor dan aktris yang bukan orang Prancis. Kasus ini kemudian memberi pemaknaan berbeda terkait aturan pendefinisian asal film.

Kemudian, pada tingkat negosiasi GATS, negara-negara anggota dituntut untuk menghilangkan hambatan ekonomi dalam konteks perdagangan sektor audiovisual. Sisi, lain, hal inilah yang menjadi tema perdebatan di kalangan negara, khususnya Komunitas Eropa. Sekali lagi, Prancis mengambil peran untuk melakukan upaya serius agar produk audiovisual tidak masuk ke dalam skema tersebut. Prancis beranggapan bahwa liberalisasi perdagangan atas produk audiovisual dapat mengancam produk domestiknya dari pengaruh yang dinamakannya *Amerikanisasi* terhadap konten kultural, khususnya perfilman (Messerlin, et.al., 2004, h. 35).

Pada tingkat Komunitas Eropa, dalam kesepakatan GATS, pihak Prancis bersikukuh untuk mempertahankan sektor audiovisual untuk tidak dimasukkan ke dalam skema perdagangan tersebut. Kegigihan Prancis tersebut membawa implikasi kevakuman kesepakatan itu, yang berlangsung pada tahun 1986-1994. Komunitas Eropa yang terdiri dari Negara Nasional secara mendasar berbeda

pendapat dengan Prancis yang memiliki tradisi perlindungan atas konten audiovisual domestik. Pihak Inggris misalnya yang bersebrangan dengan Prancis merupakan negara oposisi dalam kesepakatan ini, khususnya ketika Inggris mengkritik pasal 128 dalam Traktat Maastricht tentang definisi budaya (Collins, 1998, h. 177). Inggris menghendaki konten audiovisual dibawa ke dalam konteks perdagangan bebas, sesuai amanat kesepakatan GATS. Suatu kebijakan yang terkait konten kultural dengan demikian bukan hasil dari visi tunggal suatu entitas politik atau masyarakat; namun menurut Collins ia merupakan wujud interaksi berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda dalam konteks pusanan kekuatan dalam suatu komunitas. Pusanan kekuatan tersebut terdiri dari Negara Nasional, Parlemen Eropa dan Komisi Eropa. Melalui pemahaman yang sama, kebijakan penyiaran, khususnya pertelevisian merupakan tanggapan atas permasalahan yang sama, yaitu globalisasi yang turut memengaruhi pelbagai aspek, politik, ekonomi dan budaya Negara Nasional, khususnya Prancis, negara yang memiliki tradisi perlindungan atas konten kultural.

3.3. Implementasi dan Implikasi Kebijakan Direktif Television Without Frontiers 1989 Terhadap Pertelevisian Prancis

Pada tingkat Negara Nasional, implementasi kebijakan Direktif TWF 1989 tidak berjalan baik, khususnya di Prancis, negara yang memiliki tradisi perlindungan konten kultural. Hal ini terkait bagaimana pemerintah Prancis memfungsikan sektor ini untuk membantu dan mendorong produksi produk audiovisual (Levy, 2005, h. 20). Upaya ini bertujuan pula untuk mempromosikan budaya dan program televisi Prancis ke Negara Nasional yang lain dan negara di luar Eropa. Pertelevisian Prancis juga secara tidak langsung mendorong industri perfilman, dengan menyertakan film-film nasional dalam susunan acaranya.

Kemudian, dalam konteks implementasi kebijakan Direktif TWF 1989, pemerintah Prancis melakukan negosiasi ulang mengenai besaran kuota yang harus dipenuhi oleh Negara Nasional. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan produk audiovisual domestik dalam acara televisi, sekaligus mengurangi dominasi kultural produk audiovisual dari luar Eropa di televisi, khususnya dari perfilman dan program televisi Amerika Serikat.

Pelbagai langkah lain kemudian ditempuh oleh pemerintah Prancis untuk melindungi produk audiovisual domestik. Di antaranya adalah mengatur kembali aturan tentang tatapenyiaran, melakukan konvergensi modus dan format pertelevisian, dan memberikan subsidi bagi film berbiaya tinggi maupun bagi pegiat audiovisual independen pada masa François Mitterand (1981-1995), melalui menteri Kebudayaannya, Jack Lang. Sisi lain, upaya pemerintah Prancis untuk melindungi sektor pertelevisian ini bersifat paradoksal, terkait pemberian keistimewaan pada stasiun televisi privat, Canal Plus, dalam bentuk kebebasan penyiaran, pemberian subsidi dan aksesnya terhadap produk perfilman Amerika. Berikut beberapa aturan dalam kebijakan Direktif TWF 1989 yang diadopsikan oleh negara Prancis dan profil lembaga audiovisual yang berwenang mengatur harmonisasi penyiaran pada tingkat nasional, yaitu CSA (*Conseil du Service de l'Audiovisuel*).

3.3.1. CSA (*Conseil du Service de l'Audiovisuel*): Penyiaran dan Subsidi

Pada tahun 1986, secara resmi peran negara dikurangi dalam sektor pertelevisian, khususnya kepemilikan. Lembaga audiovisual CSA (*Conseil du Service de l'Audiovisuel*) kemudian didirikan sebagai bagian dari mandat kebijakan Direktif TWF 1989 (1989) dalam konteks kewenangan lembaga itu untuk melakukan harmonisasi kebijakan TWF pada tingkat nasional. Lembaga ini mengatur perizinan penyiaran, pengawas kewajiban yang dibebankan kepada penyedia penyiaran, pengatur frekuensi penerimaan, maupun kewajiban lainnya. Lembaga audiovisual ini merupakan lembaga pengganti ORTF yang telah dihapuskan keberadaannya pada tahun 1974. Lembaga CSA memiliki tiga tujuan, yaitu memfasilitasi penerapan kebijakan pada tingkat Komunitas Eropa ke negara Prancis, mendorong produksi konten audiovisual nasional, dan menekankan peran negara dalam sektor pelayanan publik. Secara administratif, sektor audiovisual Prancis berada di bawah pengawasan Kementrian Kebudayaan, melalui bagian yang mengurus Pelayanan Hukum dan Informasi Teknis (*Service Juridique et Technique de l'Information*) yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri (Levy, 2005, h. 19).

Wewenang pertama CSA adalah pengaturan penyiaran, terkait program dan acara yang disiarkan oleh stasiun televisi. Kebijakan ini mengatur kuota dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap stasiun televisi. Terkait masalah kuota, setiap stasiun televisi di Prancis diwajibkan untuk menyiarkan program Eropa sebesar 60%. Hal ini berbeda dengan kuota kebijakan TWF yang hanya 50,1 %. Jumlah saluran stasiun televisi dibatasi oleh pemerintah secara ketat. Setiap saluran televisi hanya boleh menyiarkan film feature sejumlah 192 film per tahun (McQuail et. al, 2004, h. 69). Pada hari tertentu, penyiaran film ditiadakan, khususnya hari Rabu, Jum'at dan Sabtu. Jam penayangan film pun dibatasi, antara jam 20.30 dan 20.30. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah penonton di bioskop.

Yang kedua adalah kuota program yang terkait distribusi dan produksi program televisi. Skema kuota ini mengatur saluran televisi untuk menginvestasikan pendapatan mereka kepada produksi konten audiovisual Prancis sebesar 15% dan sebesar 20% untuk produk audiovisual Eropa (Levy, 2005, h. 20). Pilihan yang kedua adalah menginvestasikan pendapatan stasiun televisi sebesar 15% untuk produk audiovisual Prancis dan menyiarkan selama 120 jam produk audiovisual Eropa pada jam tayang khusus. Sebagai tambahan, setiap stasiun televisi diwajibkan untuk memberikan subsidi silang sebesar 3% untuk produksi film Prancis atau Eropa. Kewajiban yang dibebankan kepada stasiun penyiaran itu memberikan ilustrasi bagaimana kesungguhan pemerintah Prancis terhadap masa depan sektor pertelevisian dan menjaga keberlangsungan produksi perfilman.

3.3.2. Pertelevisian Prancis: Konvergensi Modus Penyiaran dan Konversi Format Pertelevisian

Perkembangan teknologi satelit yang berdampak pada perubahan modus penyiaran tidak diiringi oleh adaptasi penyiaran pada tingkat Negara Nasional, khususnya Prancis. Harmonisasi penyiaran yang diamanatkan oleh kebijakan Direktif TWF tidak dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah Prancis. Sikap pemerintah ini bisa diartikan pula sebagai ketidaksiapan menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi, dalam konteks konvergensi modus penyiaran dari analog ke digital dan konversi format pertelevisian.

Yang pertama adalah konvergensi modus penyiaran yang merupakan salah satu upaya CSA untuk mengintegrasikan secara teknis frekuensi pertelevisian. Hal ini sesuai kebijakan Direktif TWF 1989 yang bertujuan mengharmonisasikan pertelevisian pada tingkat Negara Nasional. Konvergensi ini merupakan bentuk harmonisasi atas penggunaan teknologi satelit yang mulai diperkenalkan pada tahun 1980-an.

Sebelum era televisi satelit pada tahun 1980-an, televisi di Eropa menerima sinyal analog melalui stasiun pemancar pemerintah melalui operator resmi (Chalaby: 2009, h.7). Modus penerimaan sinyal ini banyak digunakan di Eropa, namun permasalahan teknis yang kerap muncul adalah interferensi sinyal yang menyebar ke negara tetangga. Kebijakan publik yang mengatur spektrum bagi sinyal pertelevisian maupun alat elektronika sebelumnya dikuasai oleh negara (Cave & Nikimura, 2006, h. 9). Pemerintah mendaftarkan frekuensi penyiaran berbasis analog untuk mengendalikan jumlah maupun identitas stasiun televisi atau alat berbasis elektronik.

Teknik pengaturan spektrum frekuensi ini telah dipergunakan sejak tahun 1906. Terkait pertelevisian, spektrum yang dikontrol sesuai dengan kesepakatan internasional dalam konteks penyiaran (Cave & Nikimura, 2006, h. 9). Pemerintah Negara Nasional kemudian mendaftarkan frekuensi khusus tersebut untuk penggunaan di wilayah yurisdiksi mereka. Sisi lain, konvergensi modus penyiaran itu diabaikan oleh pemerintah Prancis, utamanya terkait stasiun televisi privat yang memiliki pangsa besar, yaitu Canal Plus.

Canal plus tetap mempertahankan modus penyiaran via kabel melalui perantara dekoder untuk menyiarkan program televisinya ke rumah-rumah. Menurut Levy (2005), pertelevisian modus kabel dapat mudah diatur dan diawasi oleh operator terkait dan pemerintah dalam konteks distribusinya. Sisi lain, pertelevisian Negara Eropa lain, seperti Jerman dan Inggris telah mengadopsikan modus penyiaran digital via satelit, melalui skema pertelevisian bersama seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Ketertinggalan teknologi pertelevisian Prancis ini bertambah dalam hal penggunaan format pertelevisian yang berbeda dengan Negara Nasional lainnya.

Yang kedua adalah konversi format pertelevisian, terkait perkembangan televisi berwarna yang pertama kali diperkenalkan pada era de Gaulle tahun 1967 dalam saluran dua (sistem *625 lines*) dan pada tahun 1972, era Pampidou.¹⁷ Sisi lain, perkembangan teknologi pertelevisian berwarna ini terkait perbedaan format pertelevisian yang digunakan oleh industri penyiaran.

Pada tahun 1953, Amerika Serikat memulai siaran televisi berwarna perdananya dan format pertelevisian barunya, NTSC (*National Television System Committee*).¹⁸ Akan tetapi, format ini memiliki kualitas buruk. Untuk merespon perkembangan pertelevisian Amerika itu, insinyur pertelevisian Prancis, mengembangkan format sendiri, yaitu SECAM (*Sequentiel Couleur à Mémoire*, atau "*sequential colour with memory*") yang kemudian diadopsi oleh ORTF. Pada era kepresidenan de Gaulle, format baru ini ditimbang memiliki nilai strategis untuk diperkenalkan ke luar Prancis.

Akan tetapi, usahanya ini tidak membuahkan hasil di Eropa Barat, sebab format PAL (*Phase Alternating Line*), yang telah dikembangkan oleh teknologi Telefunken dari Jerman sebelumnya, lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur, sebab dari segi kualitas lebih baik dari format NTSC.¹⁹ Sedangkan format SECAM banyak digunakan oleh industri pertelevisian Uni Soyet, negara-negara Afrika Barat dan Madagaskar. Ketika sistem *819-line* mulai diperkenalkan, Prancis yang masih menggunakan SECAM semakin terisolasi dari masyarakat Komunitas Eropa, akibat adanya sistem baru tersebut.

Sebagai patokan yang lain adalah format pertelevisian stasiun televisi privat yang memiliki pangsa terbesar, Canal Plus. Sejak didirikan pada tahun 1984, Canal Plus menggunakan format pertelevisian *4:3 aspect ratio* SDTV (*square*). Penggunaan format televisi layar lebar (*wide-screen*) yang berformat *16:9 aspect ratio* SDTV baru diadopsikan pada tahun 1996. Perkembangan format pertelevisian di stasiun privat terbesar Prancis ini dapat dijadikan ukuran bagaimana ketertinggalan pertelevisian Prancis atas perkembangan teknologi pertelevisian.

¹⁷ <http://www.inaglobal.fr/en/television/article/television-history-french-exception>

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Posisi Pertelevisian Eropa dan Dominasi Media Amerika

Tahun 1980-an merupakan periode penting untuk memahami posisiertelevisian Eropa. Pertelevisian tidak lagi dikuasi oleh negara sebagai pengatur layanan publik, namun sektor ini dikuasai oleh firma media maupun nonmedia yang hanya mencari laba dalam konteks komersialisasi. Pada periode ini yang harus dilihat adalah kebangkitan awal sistem ekonomi kapitalis dalam sektorertelevisian. Kebangkitan awal ekonomi tersebut dapat dijelaskan melalui teori World System atau. Indikatornya adalah bagaimana sistem ekonomi masyarakat kapitalis tersebut bertransformasi menjadi suatu sistem ekonomi baru, yaitu neoliberalisme yang menekankan prinsip perdagangan bebas, berkurangnya peran negara dalam perlindungan sektor publik, dan penciptaan iklim kompetitif dalam konteks perdagangan internasional.

Menurut konsep core-periphery Wallerstenian,ertelevisian Eropa berada dalam posisi semi-periphery. Istilah semi-pinggiran untuk mengidentifikasiertelevisian Eropa tidak terkait hubungan antara *core* dan *semi-periphery* yang bersifat pasif dalam konteks dominasi tunggal (*World Empire*), namun hubungan ini bersifat kolaboratif, antara firma media Amerika dan firma media Eropa. Keberadaan media Amerika terkait hubungannya dengan firma media Eropa, bersifat aktif dan kolaboratif. Hal ini bisa dilihat bagaimana penetrasi produk audiovisual Amerika melalui distribusi program televisi Eropa pada tahun 1980-an, pengaruh firma media Amerika melalui keanggotaan Inggris dalam skemaertelevisian bersama, dan dominasi atau penguasaan jaringan satelit oleh firma media Amerika terhadapertelevisian Eropa.

Penguasaan jaringan satelit merupakan salah satu mekanisme operasi sistem ekonomi kapitalis dalam konteks media. Hal ini sesuai dengan karakter sistem ekonomi tersebut yang dijelaskan oleh Wallerstein. Hubungan antaraertelevisian Amerika dan Eropa menurut konsep core-periphery dapat dijelaskan melalui kerjasama kedua entitas dalam konteks distribusi konten kultural.

Menurut Wallerstein, jenis kerjasama ini terkait hubungan antara pemilik *core* (*core owner*) dan pemilik *periphery* (*periphery owner*). Istilah pemilik dan pekerja yang diberikan oleh Wallerstein ini dapat dimaknai sebagai firma media yang mendominasi dan firma media yang ter subordinasi dalam konteks pertelevisian Eropa.

Dari hubungan tersebut, dapat diuraikan bagaimana mekanisme dominasi pertelevisian Amerika (*core*) terhadap pertelevisian Eropa (*semi-periphery*) melalui kerjasama perdagangan dalam konten kultural. Sedangkan pada tingkat Negara Nasional, dalam hal ini Prancis, hubungan antara *core* dan *periphery* terkait kerjasama antara firma media Amerika dan firma media Negara Nasional, dalam hal pembelian lisensi perizinan perfilman (kasus stasiun televisi Canal Plus di Prancis) dan subsidi perfilman "*Plan Lang*" yang dianggap sebagai Amerikanisasi, dan kepemilikan stasiun pertelevisian yang dikuasai oleh firma nonmedia, seperti firma air minum (Canal Plus) dan firma konstruksi (privatisasi TF1 oleh Buoygues).

Berikut beberapa penjelasan terkait dominasi produk audiovisual Amerika, khususnya program televisi, pengaruh firma media Amerika dalam skema pertelevisian bersama dan penguasaan jaringan satelit dalam konteks distribusi konten televisi.

4.1.1. Dominasi Pertelevisian Amerika

Dominasi konten audiovisual Amerika Serikat dalam pasar global media, khususnya di Eropa dapat ditelusuri dari perkembangan pertelevisian Eropa pada tahun 1980-1990-an yang mendapat pasokan program dari industri audiovisual Amerika (Doyle, 2002, h. 90). Kondisi tersebut merupakan bagian dari perkembangan pertelevisian dalam negeri Amerika Serikat sendiri, yang diberi kebebasan oleh pemerintahnya untuk berekspansi ke luar negerinya. Hal tersebut telah diatur dalam sistem perdagangan, sistem finansial maupun aturan sindikasi pertelevisian Amerika pada tahun 1970-1995. Tercatat ada tiga stasiun televisi besar yang didorong oleh pemerintah Amerika untuk berekspansi ke luar, seperti stasiun ABC, CBS dan NBC. Didukung oleh ukuran pasar yang potensial maupun pasar linguistik (bahasa Inggris), program acara dari televisi Amerika mendapat pangsa pasar khusus di Eropa, utamanya di stasiun televisi Inggris.

Untuk memenuhi kebutuhan program televisi, pertelevisian komersial maupun pertelevisian publik di Eropa, mengimpor program televisi asing, baik berkategori film fiksi maupun acara televisi (de Bens, Els & de Smaele, Hedwig, 2001, h. 57). Stasiun televisi publik dan komersial ini sebagian besar mengimpor film dari Amerika Serikat yang jumlahnya mencapai 66,7% dari total program siaran mereka. Sedangkan stasiun televisi publik mengimpor lebih sedikit, yaitu sebesar 40,2%. Dibandingkan dengan stasiun televisi komersial, stasiun televisi publik menyiarkan lebih banyak program televisi dari Eropa, baik dari produk domestik 17,3% maupun dari negara Eropa lain, 13,5%.

Tabel di bawah memperlihatkan bagaimana dominasi produk audiovisual Amerika di pertelevisian Eropa, khususnya film berkategori fiksi. Negara Prancis dan Jerman mengalami penurunan signifikan atas produksi film fiksi, khususnya yang disiarkan di televisi. Sementara Inggris mengalami kenaikan, walaupun setelah itu mengalami penurunan dalam produksi film fiksi. Sementara untuk film berkategori mini-seri, pertelevisian komersial Italia, Rete 4, banyak menyiarkan program ini, khususnya mini-seri telenovela Amerika Latin sebesar 17% dari total penyiarnya (de Bens & de Smaele, 2001, h. 66). Stasiun televisi Italia ini memang mengkhususkan konten acaranya untuk kaum hawa. Sementara pertelevisian Inggris, program mini-serinya terdiri dari produk Amerika Serikat dan Australia, yang berbahasa serumpun. Sedangkan pertelevisian Prancis menyiarkan 10,5% acara yang berasal dari Inggris dan 11,5% acara dari Jerman. Sisi lain, stasiun televisi Jerman dan Inggris justru tidak menyiarkan program mini-seri yang berasal dari Prancis.

Sisi lain, dominasi produk pertelevisian dari luar Eropa, tidak terlepas dari permintaan dari sisi pemirsa Eropa sendiri. Program televisi Amerika lebih disukai oleh pemirsa Eropa, sebab program televisi tersebut menawarkan tema yang lebih menarik, terkait masalah kehidupan, emosi manusia, hubungan konflikual sesama manusia (de Bens & de Smaele, 2001, h. 66). Cinta, kecemburuan, ambisi merupakan tema program televisi Amerika, seperti mini seri *Baywatch* dan *Dallas*.

Asal Film Fiksi di Stasiun Televisi Eropa Tahun 1988-1997

	1988 (%)	1991 (%)	1997 (%)
	29	20	17,5
Amerika Serikat	46	53	57,5
Eropa	19	23	20
• Prancis	6	5	4
• Inggris	4	9	4
• Jerman	3	4	1
• Negara Eropa Lainnya	6	5	5
• Produksi Bersama	-	-	6
Lain-lain	6	4	5

Dikutip dari Els de Bens & Hedwig Smaele, *The Inflow of American Television Fiction on European Broadcasting Channel Revisited*, h. 61.

Permintaan yang meningkat dari pertelevisian Eropa atas produk audiovisual Amerika, berbanding terbalik dengan permintaan produk audiovisual dalam negeri Eropa. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan audiovisual negara-negara Eropa sendiri. Beberapa negara Eropa, seperti Inggris, Belanda, Jerman dan Italia menerapkan liberalisasi atas sektor perfilmannya. Italia dan Jerman memulai liberalisasi perfilman pada tahun 1950-an, Belanda pada tahun 1960-an dan Inggris pada tahun 1980-an

Kebijakan Film Nasional

	I More Protectionist	III More Liberal
More Promotive S	France 1990s Egypt 1960s Mexico 1940 U.S.S.R 1950s	Italy 1950s Britain 1980s Singapore 1990s Netherlands 1960s
Cultural Policy		
More Laissez-faire	II Egypt 1980s India 1980s Japan 1970s U.S. 1940s	IV U.S. 1990s Mexico 1990s Egypt 1940s Germany 1950s

S

Dikutip dari Flibbert, Andrew., J., *Commerce in Culture*, h.20

Stagnasi produksi konten audiovisual Eropa, khususnya pertelevisian tidak terlepas dari dominasi firma media atas sarana distribusi, yaitu satelit. Melalui penguasaan tersebut, distribusi konten pertelevisian tidak tersebar secara merata. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya skema pertelevisian bersama, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

4.1.2. Pertelevisian Satelit dan Dominasi Sistem Distribusi

Penguasaan satelit merupakan elemen kunci untuk menyatukan produk kreatif dan pasar ekonomi dalam skala global. Hal ini tampaknya disadari oleh taipan media seperti, Rupert Murdoch, Sylvio Berlusconi, maupun Henry Luce dari Werner Brothers yang membangun sebuah korporasi media tanpa terkait batas wilayah dan negara melalui penguasaan atas penyiaran, produksi film, penguasaan fasilitas distribusi, seperti satelit dan jaringan kabel pertelevisian. Gabungan korporasi media menurut Sreberny (1991) merebut kontrol, proses distribusi dan produksi dalam skala besar. Firma media seperti Time Warner, gabungan antara Werner Brothers dan Henry Luce pada bulan Maret 1989 misalnya, membangun sebuah korporasi media yang memiliki aset hingga 18 Milyar Dollar dan mempekerjakan hingga 340.000 karyawan, yang kantornya berbasis di Amerika Serikat. Sedangkan pangsa pasarnya adalah Australia, Asia, Eropa, dan Amerika Latin.

Sisi lain, pada tingkat Negara Nasional Komunitas Eropa, misalnya di Prancis, penggunaan teknologi satelit baru dimulai pada tanggal 27 April tahun 1996 oleh stasiun televisi privat, Canal Plus. Menurut Levy (2005), sebelumnya Canal Plus menggunakan modus kabel via dekoder yang dipasang di rumah-rumah untuk dapat menyiarkan program televisi yang dipesan (*pay-TV*). Alasannya adalah pertelevisian modus kabel dapat dengan mudah diawasi oleh operator terkait, namun perkembangan teknologi satelit yang pesat, tidak direspon secara cepat oleh otoritas Negara Nasional maupun firma pertelevisian Negara Nasional.

Saluran televisi satelit kali pertama beroperasi pada tahun 1982 dengan nama *Satellite Television*, sesuai dengan nama perusahaan yang mengoperasikannya (Chalaby, 2005, h. 45). Satelit yang mentransmisikannya adalah Eutelsat, sebuah proyek satelit intergovernmental yang dibuat lima tahun

sebelumnya. Saluran televisi satelit ini menggunakan jaringan kabel operator dan dioperasikan di beberapa negara Eropa yang telah mengatur penggunaan transmisi tersebut. Pada musim panas tahun 1983, perusahaan itu dibeli oleh Rupert Murdoch, salah seorang taipan media Amerika Serikat. Ia kemudian menamakan jaringan pertelevisian satelit barunya tersebut sebagai *Sky Television* yang konten programnya sebagian besar berasal dari Jerman, Belanda dan Belgia. Sejak tahun 1987, lebih dari separuh konten program *Sky Television* merupakan produk asli Eropa. Sisi lain, karena pangsa pasar menurun, yang hanya meraih sekitar 15 juta pelanggan di negara-negara Eropa, dan tanggungan hutang perusahaan yang besar, pada bulan Juni tahun yang sama, *Sky Television* merambah pangsa pasarnya ke negara Inggris.

Bersamaan dengan keputusan *Sky Television* untuk mengalihkan pangsa pasarnya ke Inggris, Richard Branson salah seorang pengusaha Inggris dan pemegang merk dagang ITV meluncurkan proyek televisi satelit Super Channel yang ditujukan untuk pangsa pasar Eropa pada tanggal 30 Januari tahun 1987 (Chalaby, 2005, h. 46). Awalnya, program berbahasa Inggris mendominasi seluruh konten acara, namun ketika Super Channel menemukan masalah yang sama seperti *Sky Television*, konten acara berbahasa Jerman dan Belanda kemudian ditambah dalam konten siarannya. Pertelevisian satelit dalam perkembangannya menjadi daya tarik bagi perusahaan global yang lain di bidang penyiaran, misalnya British Telecom (*Star Channel*) dan WH Smith (*Lifestyle*) dari Inggris. Sisi lain, pengenalan pangsa pasar di Eropa yang kurang jelas menimbulkan kerugian besar bagi sisi operasionalnya. Beberapa perusahaan lain yang mengalami hal serupa adalah The Entertainment Network (TEN) yang beroperasi pada tahun 1984-1985, *Mirror Vision Premiere* yang didirikan oleh Robert Maxwell (1986-1989) dan *Arts Channel* (1988).

Pendapatannya pada tahun 1989 dari penjualan majalah, penerbitan buku, rekaman, produksi film, penguasaan jaringan kabel, dan penjualan video, berkisar 10 Milyar Dollar. Diversifikasi usaha yang dilakukan oleh korporasi media ini meningkatkan pendapatan mereka. Firma media ini merupakan satu contoh bagaimana akses ke pasar global dapat melipatgandakan pendapatan dalam skala yang luas. Tidak hanya itu, penguasaan sarana distribusi media, khususnya satelit,

merupakan upaya strategis untuk menguasai faktor distribusi, dalam konteks pertelevisionan satelit Eropa pada tahun 1980-an.

4.1.3. Integrasi Pertelevisionan Eropa *Vis à Vis* Integrasi Berbasis Kultur

Upaya Komunitas Eropa untuk mengintegrasikan pertelevisionan, berbasiskan kerjasama ekonomi intranegara Nasional. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Direktif Television Without Frontiers yang diresmikan bersamaan dengan skema Pasar Tunggal Komunitas Eropa. Pertelevisionan diarahkan ke dalam skema perdagangan bebas sesuai dengan visi skema Pasar Tunggal tersebut, yaitu menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dalam konteks kerjasama perdagangan dalam negeri Komunitas Eropa, melalui kebebasan mobilitas barang, jasa, kapital, dan manusia. Integrasi perekonomian merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh Komunitas Eropa untuk mendorong integrasi ranah lainnya. Integrasi ekonomi secara otomatis akan mendorong integrasi politik Negara Nasional melalui mekanisme *spill-over*.

Integrasi perekonomian ini disadari oleh Komunitas Eropa sebagai hal utama dalam pembentukan konsep *Welfare State*. Pada tataran hukum, integrasi ekonomi ini sesuai dengan amanat Traktat Roma yang mengikat Negara Nasional dalam suatu visi bersama, yaitu *acquis communautaire*. Traktat Roma hanya terdiri dari satu pilar utama, yaitu ekonomi dan merupakan gabungan dari tiga kerjasama yang dijadikan satu: European Atomic Energy Community (EURATOM), European Coal and Steel Community (ECSC), dan European Economic Community (EEC). Hal ini berbeda misalnya dengan Traktat Maastricht yang merupakan penyempurnaan dari Traktat sebelumnya dan terdiri dari dua pilar tambahan, yaitu Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (Common Foreign and Security Policy) dan Peradilan dan Urusan Dalam Negeri (Justice and Home Affairs).

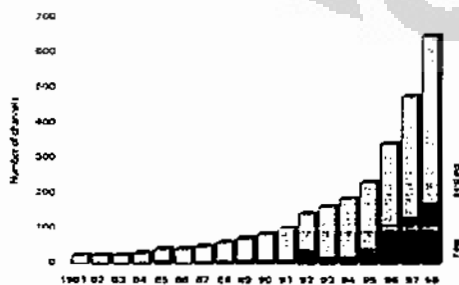
Sisi lain, integrasi ekonomi ini menyentuh sektor yang bersentuhan langsung dengan konten kultural, yaitu pertelevisionan. Bagi Negara Nasional seperti Prancis, integrasi pertelevisionan ini berposisi langsung dengan kebijakan pemerintah Prancis dalam hal perlindungan konten kulturalnya, dalam hal ini perfilman.

Pertelevisian dalam konteks ruang publik terkait fungsi pertelevisian sebagai media penyampai informasi dan bukan sebagai media dalam kerangka komersialisasi. Pada waktu skema pertelevisian bersama terbentuk, Eurikon, program televisi dirancang untuk menginformasikan segala aktifitas Komunitas Eropa. Informasi tersebut kemudian diteruskan melalui stasiun televisi Negara Nasional.

Setelah skema pertelevisian Pan-Eropa itu dibubarkan, belum ada stasiun televisi yang mengakomodasi Komunitas Eropa atas kebutuhan informasi berdasarkan keeropaan. Pertelevisian berbasis kultur kemudian dibentuk untuk mengatasi kelangkaan pertelevisian berbasis nilai dalam konteks pertelevisian Eropa pada tahun tersebut. beberapa inisiatif terkait pembentukan stasiun televisi berbasis kultural kemudian muncul untuk menanggapi pengaruh kultur yang dibawa oleh media asing, khususnya dari Amerika.

4.1.4. Ruang Publik Alternatif: Pertelevisian Berbasis Kultur Arte dan Pembentukan Masyarakat Informasi

Konsep Habermas tentang ruang publik memberikan pemaknaan baru pada tahun tersebut, khususnya semenjak perkembangan stasiun penyiaran yang dikuasai oleh firma asing dari Amerika Serikat. Pembentukan skema stasiun televisi berbasis kultur merupakan inisiatif strategis sebagai basis produksi dan reproduksi opini publik yang bebas nilai dari pemilik otoritas melalui skema pertelevisian bersama. Konsep ruang publik berbasis kultural ini kemudian mengacu visi keeropaan, terkait nilai-nilai yang tidak lekang oleh zaman. Berikut tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah stasiun penyiaran dan stasiun televisi berbasis kultur, Arte.



Dikutip dari Doyle, Gillian. *Media Ownership*. h. 47

Arte atau La Sept merupakan salah satu siaran televisi berbasis kultural yang merupakan kolaborasi antara stasiun televisi Prancis (France 5) dan Jerman

(Arte). Stasiun televisi ini menyiarkan transmisi di saluran lima, saluran yang sama seperti stasiun televisi France 5, namun waktu penyiaran keduanya berbeda (Charlot: 62). France 5 menyiarkan siaran pendidikan pada waktu pagi hingga sore hari. Sedangkan ARTE menyiarkan siaran seni dan budaya pada waktu sore hari.

Pendirian stasiun televisi berbasis kultur merupakan salah satu solusi atas polemik yang panjang, terkait hubungan antara pertelevisian dan kultur di Prancis. Semenjak tahun 1974 sampai lembaga audiovisual ORTF dibubarkan, telah ada keinginan pemerintah Prancis untuk mendirikan stasiun penyiaran berbasis kultural dan pendidikan (Baer & del Corral, 1998, h. 31). Sisi lain, reformasi kebijakan penyiaran pada tahun 1986 tidak juga memberi ruang bagi pendirian stasiun televisi berkonten kultural ini, sebab melalui kebijakan ini, porsi yang sama diberikan untuk pertelevisian publik maupun privat, terkait masalah kuota penyiaran.

Stasiun televisi privat lebih banyak mengambil keuntungan atas kebijakan ini, dibandingkan dengan stasiun televisi publik, dalam hal pendapatan dari sisi komersial. Terlebih privatisasi stasiun televisi TF1, posisi pertelevisian publik terwakili oleh dua stasiun televisi, Antenne 2 yang mencakup wilayah nasional dan FR3 yang mencakupi wilayah regional. Oleh karena itu, pendirian stasiun televisi berbasis kultural ini merupakan suatu upaya strategis untuk mempromosikan kekayaan kultural Prancis dan Eropa serta menangkal pengaruh budaya asing melalui konten audiovisual.

Konsep pertelevisian berbasis budaya yang diusung oleh Arte ini menekankan konsep budaya yang memiliki ragam pemaknaan dalam konteks masyarakat dan peradaban (Baer & del Corral, 1998, h. 10). Konsep ini dapat ditujukan kepada semua tradisi kultural, baik secara teknis dan kepada institusi untuk memberi karakter pada suatu kelompok masyarakat. Skema pertelevisian ini juga memberi wadah bagi pengetahuan individual pada tingkat yang terbatas dan untuk menghadirkan kembali karya seni artistik pada masa lalu dan masa sekarang untuk merumuskan karya seni tersebut pada masa yang akan datang. Sisi lain, secara umum konsep budaya tersebut dipahami secara berbeda oleh negara-negara Nasional. Oleh karena itu, inisiatif stasiun televisi berbasis kultur ini

mengedepankan konsep umum tentang budaya yang bagi beberapa nasional tentu berbeda pemaknaannya (Baer & del Corral, 1998, h. 11). Semua program televisi kemudian dirancang untuk mendukung inisiatif ini. Hal-hal yang tidak memiliki relasi dengan budaya tidak ditayangkan oleh stasiun televisi berbasis kultur ini.

Pembentukan Masyarakat Informasi (*Information Society*) merupakan respon Uni Eropa terhadap perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi internet yang merupakan basis kebebasan produksi dan reproduksi informasi. Oleh karena itu, Uni Eropa menyusun suatu kebijakan yang terkait hal ini dalam kerangka kebijakan Direktif TWF 1989. Kebijakan Direktif TWF sendiri terdiri dari dua hal: pelayanan penyiaran televisi (*television broadcasting services*) yang bersifat linear dan pelayanan masyarakat informasi (*information society services*) yang bersifat nonlinear. Yang pertama diatur dalam kebijakan Direktif TWF 1989 (1989), karena terkait hal penyiaran di mana pemirsa bersifat pasif. Sedangkan yang kedua diatur dalam kebijakan Direktif *e-commerce*, karena terkait langsung dengan metode transaksional di mana pemirsa bersifat aktif mengunduh produk audiovisual yang mereka minati.

Pada bulan Juni 1997, Parlemen Eropa dan Dewan Menteri mengadopsi revisi kebijakan Direktif Television Without Frontiers yang baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang lebih besar dan untuk membarui aturan-aturan sebelumnya. Beberapa poin penting dirumuskan sebagai berikut:

1. Prinsip yurisdiksi: Negara Nasional yang bertanggungjawab atas stasiun televisi, dibatasi oleh lokasi di mana kantor pusat dan tempat program televisi itu dibuat;
2. Acara yang penting untuk publik (seperti siaran olahraga): kebijakan Direktif yang telah direvisi ini mengatur acara yang dipertimbangkan sebagai acara penting untuk publik. Setiap Negara Nasional dapat mendaftarkan acara apa saja yang harus disiarkan dalam bentuk yang belum disensor, walaupun acara itu telah dibeli oleh saluran TV berbayar (*pay-TV*);
3. Belanja *via* televisi (*teleshopping*): modus berbelanja ini terkait aturan periklanan: tayangan belanja *via* televisi yang disiarkan oleh saluran televisi umum, harus memenuhi durasi minimum 15 menit dan dapat dikenali secara jelas acaranya oleh pemirsa. Maksimum tayangan per hari

berjumlah 8 tayangan, dan durasi total tidak boleh melebihi tiga jam per hari;

4. Perlindungan terhadap anak di bawah umur: revisi kebijakan Direktif ini menggarisbawahi perlindungan terhadap anak di bawah umur. Hal ini ditekankan misalnya, Negara Nasional harus menjamin acara yang dapat membahayakan anak di bawah umur dan disiarkan tanpa sensor harus disertakan peringatan dalam bentuk suara atau simbol visual.

Kebijakan yang diresmikan pada tahun 1997 ini mengatur juga pelayanan penyiaran berkonten digital. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perkembangan industri telematika maupun konten audiovisual yang terdiri dari tiga hal:

1. Kepastian hukum: konten digital dan pelayanannya tidak terkait batas wilayah Negara Nasional, stasiun televisi menyiarkan programnya ke negara lain, operator telekomunikasi memberikan pelayanannya tanpa batas, dan bisnis online tidak mengganggu pasar audiovisual Negara Nasional. Regulasi pada tingkat Uni Eropa hanya membuat level-playing-field dalam bentuk aturan kepada penyedia jasa tersebut.
2. Konten: Uni Eropa kaya akan warisan budaya. Uni Eropa kemudian mendorong industri perfilman maupun konten audiovisual yang lain untuk membuat karya yang bersifat multilingual untuk merepresentasikan kekayaan tadi. Sisi lain, konten yang bersifat negatif akan dihambat pada tingkat Uni Eropa.
3. Kompetisi dalam bidang teknologi: pelayanan konten digital bergantung pada teknologi. Oleh karena itu, penguasaan atas teknologi yang kompleks dari waktu ke waktu, diperlukan untuk mengakumulasi dan memanfaatkan potensi ekonomi pasar internal. Uni Eropa akan mengundang peneliti dan perusahaan dari pelbagai penjuru Eropa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembentukan visi teknologi.

Pada tingkat supranasional, kebijakan Direktif TWF telah bertransformasi menjadi sebuah kebijakan yang mengkomodasi sistem ekonomi dominan dan

mengadaptasikan perkembangan teknologi yang demikian pesat, baik teknologi satelit maupun teknologi informasi (internet).

4.2. Pertelevisionian Prancis dan Pergeseran Ruang Publik

Pergeseran ruang publik dalam pertelevisian Prancis terkait preferensi politik suatu pemerintahan dalam melindungi sektor berbasis publik, dalam hal ini pertelevisian. Dua pemerintahan yang dapat diuraikan ini adalah pemerintahan pada era Charles de Gaulle (1958-1969) dan pemerintahan pada era François Mitterand (1981-1995). Pemerintahan de Gaulle yang berhaluan kanan memiliki kebijakan berbeda dengan pemerintahan Mitterand yang berhaluan kiri. Masing-masing memiliki kebijakan pertelevisian. Pada masa Charles de Gaulle, pertelevisian dikuasai secara penuh oleh Negara. Sedangkan pada masa Mitterand, pertelevisian diarahkan ke skema perlindungan konten kultural, walaupun pada masa pemerintahannya ditemukan berbagai kontradiksi, seputar pemberian keistimewaan stasiun privat Canal Plus dan subsidi perfilman berbiaya besar.

Pemerintahan Charles de Gaulle memberi arah kebijakan pertelevisian sesuai dengan proyeksi negara atas sektor pelayanan publik, yang disebut kemudian sebagai etatis (*étatiste*). Negara memiliki peran sebagai pengatur sektor berbasis publik. Sedangkan pada era Mitterand yang berhaluan sosialis misalnya, memiliki karakter proteksi atas hal yang bersifat kultural, dalam hal ini pertelevisian. Sedangkan partai yang berhaluan kanan tidak memiliki karakter tersebut. Oposisi antara partai berhaluan kiri dan kanan ini merupakan bagian dari perdebatan panjang perpolitikan di Prancis (Charlot, 1994, h. 43).

Pada masa Charles de Gaulle (1958-1969), sektor penyiaran di Prancis sepenuhnya berada dalam penguasaan negara (Kuhn, 2005, h. 102). Penguasaan tersebut berbentuk kepemilikan yang bersifat monopolistik atas stasiun televisi dan pengaturan finansial dalam bentuk biaya perizinan dalam kepemilikan televisi. Biaya perizinan ini merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai biaya operasional siaran. Semenjak peristiwa pemberontakan mahasiswa pada bulan Mei tahun 1968 dan pelbagai kritik atas pemerintah atas sektor pertelevisian, biaya perizinan ini mulai dihapuskan.

Menurut Kuhn, hubungan Negara dan sektor pertelevisian pada era de Gaulle dapat dimaknai sesuai konteks politik yang terjadi pada waktu itu.

Pemerintah de Gaulle memperlakukan sektor ini sebagai alat politik dan pembentuk opini publik. Upaya pemerintah ini dapat dikaitkan dengan tiga hal dalam konteks politik. Pertama, de Gaulle memanfaatkan pertelevisian untuk membentuk opini politik pada awal pemerintahannya tahun 1958 dan peristiwa merdekanya Aljazair empat tahun setelahnya. Kedua, pertelevisian digunakan oleh de Gaulle untuk menahan laju pihak oposisi dalam amandemen yang ditujukan padanya, tahun 1962. Yang terakhir, pertelevisian dijadikan pencitraan politik de Gaulle yang merepresentasikan kharisma individu dan aktor politik tertinggi dalam pemerintahan (Kuhn, 2005, h. 103).

Pada masa de Gaulle, Negara tidak hanya menguasai infrastruktur dalam bentuk fisik, namun Negara juga menguasai konten informasi yang terdistribusikan melalui televisi, khususnya pada masa-masa pemilihan jangka pendek dan tujuan politik jangka panjang. Pemerintah mengawasi konten berita yang akan disiarkan. Fungsi televisi sebagai elemen penting akumulasi informasi dipahami betul oleh pemerintahan de Gaulle. Hal ini terkait bagaimana pemerintah ikut mengawasi konten berita yang disiarkan oleh televisi, khususnya siaran berita sore *Cinq Colonnes à la Une*, sebuah program berita pada tahun 1960-an (Kuhn, 2005, h. 110). Pada waktu itu yang menjadi perbincangan dan topik yang hangat adalah peristiwa politik di Aljazair.

Pada tahun 1970-an merupakan periode penting untuk memahami dinamika pertelevisian Prancis. Pada periode ini terjadi peningkatan jumlah kepemilikan televisi. Pada tahun 1969 saja 70% rumah tangga di Prancis memiliki satu set televisi (Kuhn, 2005, h. 124). Sepuluh tahun kemudian, jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 92,7%. Sisi lain, peningkatan jumlah ini tidak mendapat porsi yang sesuai dari pemerintah dalam konteks untuk melakukan reformasi pertelevisian. Setelah era de Gaulle, pertelevisian Prancis masih mewarisi sistem pengaturan yang sama, baik pada masa George Pompidou maupun Valéry Giscard d'Estaing. Sistem biaya perizinan yang semula dihapuskan, diberlakukan kembali oleh kedua pemerintahan ini (Kuhn, 2005, h. 125). Biaya tersebut adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh warga pemilik televisi per tahun. walaupun telah dibentuk saluran ketiga untuk televisi, sistem

pembiayaan ini memperlihatkan bagaimana perkembangan pertelevisian tidak diikuti oleh sistem yang baru.

Pada era pemerintahan François Mitterrand, kesempatan dibuka untuk pengembangan pertelevisian privat. Undang-undang pada tanggal 29 Juli tahun 1982 menyatakan hal tersebut dengan menyebutkan kebebasan komunikasi audiovisual.²⁰ Dua tahun kemudian, Canal Plus memulai siaran perdananya, pada tanggal 4 November tahun 1984. Pada masa Mitterrand ini sistem monopoli terhadap pertelevisian publik pada era sebelumnya bertransformasi menjadi sistem oligopoli terhadap stasiun televisi privat dalam bentuk deregulasi dan privatisasi pertelevisian. Sebagai konsekuensi logis peran negara sebagai pemegang kunci kebijakan sektoral, privatisasi terhadap sektor pertelevisian merupakan bagian dari kebijakan ketat untuk melindungi sektor ini dari pertelevisian nondomestik. Monopoli atas sektor pertelevisian dihapuskan oleh Otoritas Tinggi Komunikasi Audiovisual (*Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle*), lembaga independen sebelum CSA. Aturan kemudian disusun oleh lembaga ini yang ditujukan kepada pertelevisian privat, terkait masalah perizinan, rambu-rambu periklanan televisi, subsidi film dan perlindungan terhadap anak di bawah umur.

Kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh CSA untuk mengatur sisi administratif pertelevisian privat yang berkembang pada akhir tahun 1980-an. Terlebih, kebijakan Direktif TWF 1989 turut membawa implikasi pertelevisian publik maupun privat Prancis secara signifikan. Pertelevisian privat menjadi proyeksi pemerintah Prancis pada masa Mitterrand, sebab pertelevisian ini memiliki nilai strategis dibandingkan dengan pertelevisian publik, dari segi acara, jangkauan geografis, dsb. Oleh karena itu, dukungan dalam bentuk subsidi finansial dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pertelevisian ini.

Tradisi perlindungan terhadap sektor pelayanan berbasis budaya ini kemudian dihadapkan pada globalisasi media yang terjadi pada tahun 1980-an, utamanya sewaktu teknologi pertelevisian satelit berkembang. Sisi lain, pada tingkat supranasional, kebijakan Direktif TWF 1989 mengikat Negara Nasional dalam satu perangkat aturan yang membatasi penyiaran konten audiovisual.

²⁰ Ibid

Prancis dalam hal ini mengalami dilema eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, kebijakan Direktif TWF 1989 yang menekankan liberalisasi perdagangan atas konten audiovisual tidak seiring dengan kondisi pertelevisian Prancis yang mengalami fase stagnan. Dari sisi internal, kondisi pertelevisian Prancis yang mengalami ketidakjelasan itu, khususnya setelah lembaga ORTF dibubarkan, membawa sektor pertelevisian Prancis sebagai basis pelayanan publik untuk kembali dirumuskan.

Pada masa pemerintahan François Mitterand (1981-1995), pertelevisian Prancis berada pada fase penting. Hal ini terkait bagaimana sektor pelayanan publik itu dibebaskan dari penguasaan pemerintah, sesuai amanat Undang-undang jurnalisme tahun 1981 tentang kebebasan sektor komunikasi audiovisual (Kuhn, 2005, h. 147). Otoritas tinggi untuk komunikasi audiovisual kemudian dibentuk untuk mengawasi Negara dari sektor penyiaran dan menghapus perannya terhadap stasiun penyiaran. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1984, stasiun televisi berbayar pertama, Canal Plus memulai siaran perdananya. Kali pertama, banyak orang bersikap pesimis atas hadirnya siaran televisi baru ini, namun inovasi-inovasi yang dilakukan oleh canal Plus membuat stasiun televisi ini menjadi salah satu pemain penting dalam konteks jagad pertelevisian Prancis.

Situasi kondusif pertelevisian ini tidak terlepas dari era pemerintahan sebelumnya yang bercorak *étatiste*. Pada pemerintahan François Mitterand yang berhaluan sosialis, sektor pertelevisian diakomodasi secara baik. Dominasi pemerintahan Republik Kelima berhaluan kanan, Gaullist-Giscardian, perlahan pudar oleh partai berhaluan kiri dalam struktur pemerintahan (Kuhn, 2005, h. 147). Hubungan antara Negara dan sektor pelayanan publik kemudian dibatasi oleh pembentukan organ audiovisual resmi, *Conseil de Service Audiovisuel* yang secara tidak langsung mengurangi peran Negara dalam sektor pertelevisian.

Pada masa pemerintahan Mitterand, sisi lain, stasiun televisi privat mendapat perlakuan istimewa, khususnya Canal Plus yang didirikan pada tahun 1984, setelah pemerintah menguasai sahamnya sebesar 50%. Banyak alasan mengapa pemerintah ingin menguasai stasiun televisi privat ini. Sebagai stasiun televisi privat, Canal Plus menawarkan program yang berbeda dengan stasiun televisi publik seperti TF1, Antenne 2 dan FR3. Program film maupun hiburan

mendominasi jadwal penyiaran stasiun televisi ini. Selain itu, modus penyiaran yang menggunakan jaringan kabel dapat dengan mudah diatur oleh pengelola, sehingga pengawasan dapat dilakukan. Terlebih ptelevision kabel tidak memiliki kendala geografis dalam penyiarannya, dibandingkan dengan ptelevision berbasis satelit. Sebagai stasiun televisi privat, Canal Plus ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai media hiburan dan sebagai media promosi kultural, khususnya melalui film dan acara yang berhubungan dengan identitas nasional Prancis. Jangkauan yang luas dan sifatnya yang fleksibel terhadap arus globalisasi, Canal Plus menjadi stasiun televisi privat pertama berbayar *via* dekoder yang berkembang pesat di Prancis.

Sisi lain, keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap stasiun televisi ini justru bersifat paradoksal, terkait masalah aturan penyiaran dan hubungannya dengan media Amerika dalam hal pembelian lisensi film-film Hollywood. Satu sisi, proteksi kultural yang dilakukan oleh pemerintah berbanding terbalik dengan praktiknya. Hal ini tidak terlepas dari hubungan antara André Rousselet dan François Mitterrand. André merupakan teman dekat, kawan bermain golf, dan sebelumnya pernah menduduki posisi dalam kabinet Mitterrand. Hubungan politik ini menjadikan Canal Plus televisi privat yang mapan, tidak terpengaruh oleh iklim kompetisi yang ketat, pajak yang tinggi untuk konsumsi video rumahan atau pengaruh pasar audiovisual yang lesu pada tahun 1980-an (Messerlin & Cocq, 2003, h. 16).

4.2.1. Canal Plus: Peran Mitterrand dan Relasi Dengan Media Amerika

Canal Plus merupakan stasiun televisi swasta pertama yang mendapat subsidi langsung dari pemerintah Prancis (Regourd, 2002, h. 105). Program siarannya yang terdiri dari film-film Prancis dan perkembangannya yang pesat memberikan pemerintah Prancis alasan untuk melakukan perlindungan atas stasiun penyiaran ini. Pada tahun 2000, stasiun televisi ini mendapatkan 1,2 milyar Franc yang meliputi pembiayaan $\frac{3}{4}$ dari produksi film layar lebarnya yang masing-masing berjumlah sekitar 8,3 juta Franc per film dan 114 film mendapat bantuan tersebut. Total subsidi yang diberikan pemerintah adalah 4,5 milyar Franc atau sekitar 686 juta Euro.

Intervensi negara terhadap sektor yang menyangkut kepentingan publik berbentuk privatisasi stasiun televisi, khususnya stasiun televisi Canal+ dimulai pada era presiden François Mitterand (Levy, 2005, h. 21). Upaya privatisasi ini direalisasikan dalam bentuk penguasaan saham Canal+ sebesar 50% oleh pemerintah Prancis (Chalaby, 2002, h. 48). Yang menjadi alasan pemerintah Prancis melakukan intervensi atas pertelevisian, menurut Levy, adalah pertelevisian kabel tidak memiliki kendala geografis maupun pengaturan yang rumit. Televisi berbasis kabel dapat mudah diatur pengoperasiannya, baik dari sisi teknis maupun konten program.

Canal Plus merupakan stasiun televisi privat berbayar (*Pay-TV*) yang didirikan pada tahun 1984 oleh André Rousselet, pemimpin perusahaan media dan periklanan Havas (Chalaby, 2002, h. 157). Kesuksesannya pada tingkat domestik membuatnya bisa menjalin kerjasama pada bulan Februari tahun 1991 dengan pertelevisian Belgia, Spanyol dan Skandinavia. Pada tahun 1996, Canal Plus menjalin kerjasama dengan Nethold, sebuah perusahaan gabungan antara Richemont Swis, MultiChoice dan perusahaan satelit Afrika Selatan. Berkat kerjasama itu, Canal Plus melengkapi siaran satelitnya dengan multisaluran. Bersama Nethold, Canal Plus menggunakan satelit yang dapat mencapai wilayah Benelux, negara-negara Skandinavia, Eropa Tengah, Italia, dan Yunani. Ekspansi tersebut memberi tambahan pelanggannya sejumlah 1,6 juta pelanggan. Jumlah ini merupakan pencapaian terbesar stasiun penyiaran Eropa. Pada tahun 1997, stasiun televisi ini tidak lagi beroperasi di Jerman, namun tetap beroperasi di Prancis, Belgia, Belanda, Italia, Spanyol, Polandia dan Skandinavia.

Canal Plus menawarkan tayangan alternatif bagi publik Prancis, dibandingkan dengan pertelevisian publik milik pemerintah, TF1, Antenne 2 dan FR3 yang acaranya dianggap membosankan.²¹ Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Canal Plus menjalin kerjasama dengan pemerintah. Stasiun televisi ini mendapat konsesi dari pemerintah Mitterand dalam hal penguasaan televisi berbayar. Sisi lain, André Rousselet secara pribadi mengenal dekat sosok Mitterand. André merupakan teman dekat, kawan bermain golf, dan sebelumnya pernah menduduki posisi dalam kabinet Mitterand.

²¹ <http://www.inaglobal.fr/en/television/article/television-history-french-exception>

Jaringan politik maupun program acara yang menarik menjadikan Canal Plus satu-satunya stasiun yang pada tahun 1980-an menguasai pangsa pasar pertelevisian Prancis. Canal Plus tidak terpengaruh oleh iklim kompetisi yang ketat, pajak yang tinggi untuk konsumsi video rumahan atau pasar audiovisual yang lesu pada tahun tersebut. Penggunaan saluran penyiaran eksklusif dan dekoder televisi dapat mengurangi pengeluaran stasiun televisi ini. Selain itu, modus penyiaran via dekoder dan kabel ini menjangkau semua potensi pasar domestik. Penyiaran berbasis kabel memiliki alasan tertentu. Dibandingkan dengan penyiaran berbasis satelit yang memiliki kendala geografis maupun pengaturan yang rumit, televisi berbasis kabel dapat mudah diatur penyelenggaraannya, baik dari sisi teknis maupun konten program (Levy, 2005, h. 21).

Salah satu keuntungan yang didapat oleh Canal Plus adalah kebebasan aksesnya terhadap film yang baru ditayangkan.²² Umumnya, setiap stasiun televisi hanya diperbolehkan menayangkan film tiga hari dalam seminggu, namun Canal Plus mendapat kebebasan untuk menayangkannya setiap waktu. Jika ada film baru, maka setiap stasiun televisi harus menunggu selama tiga tahun untuk bisa menayangkannya kembali. Sedangkan Canal Plus mendapat keistimewaan untuk dapat menayangkan film baru tersebut hanya berselang satu tahun setelah masa rilisnya.

Pada masa pemerintahan Mitterand, Canal Plus diperbolehkan untuk menayangkan saluran bebas yang tidak teracak selama beberapa jam, sehingga semua televisi rumahan dapat mengaksesnya secara gratis.²³ Hal ini bertujuan untuk secara tidak langsung mempromosikan stasiun televisi ini. Sisi lain, aturan pemerintah menyebutkan bahwa setiap stasiun televisi hanya boleh menayangkan film sejumlah 45% dari seluruh program televisinya. Hal ini kemudian disiasati oleh Canal Plus untuk membuat jenis program baru, seperti tayangan olah raga. Canal Plus kemudian menguasai hak siar tayangan olah raga seperti pertandingan sepak bola, tinju, Rugby, dsb. Pada tahun 1985, pemerintah Mitterand membuka kesempatan bagi pertelevisian privat yang lain untuk berkembang, namun hal ini tidak memengaruhi performa maupun pendapatan Canal Plus. Pada tahun 1987

²² http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1993/05/03/77803/index.htm

²³ Ibid

saja, saham Canal Plus meningkat tajam, yang sebelumnya hanya 275F per saham meningkat menjadi 575F per saham dengan memperoleh keuntungan 100 juta Dollar pada tahun 1988. Pada tahun 1989, pelanggan Canal Plus telah meningkat menjadi 3 juta pelanggan.

Pada pertengahan tahun 1980-an, Canal Plus berupaya untuk memiliki hak siar terhadap tayangan televisi Amerika. Sebagai pendatang baru dalam dunia pertelevisian, Canal Plus justru mendapat hak siar tersebut. Pada tahun 1991, Canal Plus membayar 100 juta Dollar per tahun hanya untuk membeli hak properti film Amerika. Sisi lain, Canal Plus mendirikan rumah produksi film sendiri di Carolco Pictures, sebuah studio independen Amerika yang menghabiskan biaya sebesar 30 uta Dollar, untuk mengurangi pengeluarannya membeli film-film Amerika.

Relasi penting antara Canal Plus dan media Amerika adalah sewaktu Canal Plus menjadi pembeli terbesar film-film Amerika pada tahun 1992. Media Amerika kemudian memanfaatkan peluang ini sebagai sebuah strategi untuk memasuki pasar audiovisual Eropa yang beriklim protektif. Pada saat yang sama, Canal Plus merupakan stasiun televisi yang membantu industri perfilman Prancis. Pemerintah mewajibkan setiap stasiun televisi memberikan subsidi kepada industri perfilman Prancis sebesar 10% dari pendapatannya. Skema subsidi diatur oleh pemerintah terhadap stasiun televisi. Sisi lain, relasi stasiun televisi dengan media Amerika merupakan suatu yang bersifat paradoksal.

Canal Plus kemudian meluaskan pangsa pasarnya ke Inggris, dengan menanamkan investasinya pada saluran televisi olahraga European Sports Network dan mulai mengambil alih pangsa pasar Inggris melalui penguasaan saham TVS sebesar 10%. Pada tahun 1992, Canal Plus bergabung dengan jaringan BskyB, stasiun televisi besar Eropa yang lain dan menjalin kerjasama dalam hal penyiaran digital; televisi berbayar mutisaluran di Eropa. Canal Plus kemudian bergabung dengan jaringan Rupert Murdoch, pemilik korporasi berita dan mereka membangun pelayanan televisi model baru di penjuru Eropa pada tahun 1992.

4.2.2. Jack Lang dan Subsidi Perfilman: Pertelevisian Prancis dan Amerikanisasi

Struktur pembiayaan atas konten audiovisual mengalami perubahan pada tahun 1980-an. Undang-undang keuangan yang diinisiasikan pada tahun 1986 menyebutkan pajak yang harus diberikan oleh stasiun penyiaran, yang awalnya sebesar 4,5% pada tahun 1986 meningkat menjadi 5,5% pada tahun 1987 (Messerlin & Cocq, 2003, h. 12). Pertumbuhan stasiun siaran yang tinggi dan menurunnya pajak tontonan, menjadikan pertelevisian sebagai sektor utama dalam hal pembiayaan perfilman. Pada tahun 2001, pertelevisian memberikan subsidi sebesar 52% untuk sektor perfilman. Sementara pajak tontonan hanya menyumbangkan sebesar 26%. Pertelevisian dengan demikian menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan industri perfilman.

Kebijakan subsidi perfilman pada masa Jack Lang, Menteri Kebudayaan pada masa Mitterand, merupakan bagian strategi pemerintah Prancis atas dominasi pasar audiovisual Amerika terhadap pasar audiovisual domestik. Jack Lang membuat suatu terobosan baru dalam sektor pembiayaan pertelevisian pada tahun 1989, khususnya industri perfilman. Upaya ini terkait dukungan finansial terhadap sektor perfilman yang memiliki prospek bagus dalam pemasaran (Messerlin & Cocq, 2003, h. 16). Film-film berbiaya besar ikut disubsidi oleh pemerintah. Akan tetapi, kebijakan ini justru memerhatikan firma skala besar dan tidak memerhatikan firma independen berskala kecil yang memiliki kapital terbatas.

Subsidi perfilman Prancis meliputi dua hal, yang bersifat otomatis dan yang bersifat tambahan. Yang bersifat otomatis terdiri dari persentase jumlah pendapatan, baik film, televisi dan video. Sedangkan yang kedua bersifat tambahan dalam hal pembiayaan yang bersifat kondisional. Pembiayaan otomatis bertujuan untuk menjamin pasar domestik konten audiovisual. Kebijakan yang diperkenalkan oleh Lang ini tidak hanya berfokus pada produksi penyiaran dalam skala besar, namun juga produksi film yang berbiaya besar untuk menarik pangsa pasar domestik.

Kebijakan yang dirancang oleh Lang, "Plan Lang", ini bertujuan tiga hal: (a) dukungan pemerintah hanya diberikan kepada film yang berbahasa Prancis

(Messerlin & Cocq, 2003, h. 12). Perlindungan atas bahasa Prancis merupakan isu yang penting. Film-film berbahasa Prancis ini tidak hanya bertarget pasar domestik Prancis, namun pasar internasional, (b) pembaruan dan penguatan kerjasama dengan mitra luar, juga peningkatan distribusi film Prancis di pasar internasional, (c) mendukung produksi film Prancis yang memiliki prospek cerah. Dukungan yang bersifat spesifik dilakukan oleh pemerintah untuk film-film berbiaya tinggi, seperti dalam poin kebijakan itu yang menyebutkan: “produksi film Prancis berbiaya besar dan ambisius, baik yang bertemakan baik dan kualitasnya baik, dipertimbangkan sebagai sebuah cara untuk mendapatkan pangsa pasar penonton Prancis”. Tujuan “Plan Lang” ini merepresentasikan independensi perlindungan terhadap konten kultural Prancis. Kebijakan yang dirancang oleh Lang juga memiliki tujuan yang lain, di antaranya adalah perlindungan atas diversitas kultural, melalui subsidi terhadap pegiat audiovisual maupun sineas independen: (a) perhatian pemerintah terhadap film *feature* independen, berbeda dan berkualitas, (b) mendorong produksi film perdana sineas baru yang memiliki pembentukan artistik yang bagus.

Sisi lain, model subsidi tersebut turut membawa kekhawatiran bagi para pegiat audiovisual independen yang tidak termasuk dalam skema subsidi tersebut (Cocq & Messerlin: 16). Antara tahun 1990 sampai tahun 2001, lebih dari 50% subsidi otomatis diberikan untuk film yang memiliki angka produksi 7,6 juta Euro atau lebih, dibandingkan tahun 1989 yang hanya berjumlah 39% saja dari biaya total satu film. Hasilnya adalah, jumlah film-film berbiaya besar ini meningkat empat kali lipat, antara tahun 1988 sampai tahun 1994. Kemudian, firma-firma besar mengambil keuntungan dari pembiayaan ini. Sembilan firma besar mengambil sekitar 70% dana finansial yang dikeluarkan oleh pemerintah atas produksi 39 film yang dibuat pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Beberapa firma tersebut merupakan hasil merger dari beberapa firma, seperti Renn Productions (Pathé Group dan Gaumont) dan beberapa firma ini menjalin kerjasama dengan industri komunikasi, seperti Hachete Première (Lagardère Group), Paradise Group (Vivendi Group dan Générale Image), Films Alain Sarde (Canal+/Studio Canal+), dan Christian Fechner Films (UGC). Dukungan finansial atas firma-firma besar ini merupakan bagian dari perlindungan diversitas kultural, namun hal ini juga

turut membawa implikasi atas Amerikanisasi perfilman Prancis, dalam konteks perfilman Prancis diarahkan menuju komersialisasi pasar.

4.2.3. Dominasi Firma Nonmedia: Kepemilikan Stasiun Penyiaran Prancis

Kepemilikan stasiun penyiaran merupakan suatu yang pelik dalam diskursus pertelevisian Prancis. Contohnya adalah kepemilikan saham Canal Plus yang dikuasai oleh firma air minum, *Compagnie Générale des Eaux*; *Lyonnaise des Eaux* dan Havas. Situasi serupa dialami oleh TF1 yang dikuasai sahamnya oleh firma konstruksi, Bouygues sebesar 39% dan stasiun televisi M6 dikuasai sahamnya oleh firma air minum, *Lyonnaise des Eaux* sebesar 34% (Levy, 2005, h. 20). Kepemilikan silang ini kemudian mencerminkan pertarungan peran antara pihak swasta dan pemerintah dalam penguasaan sektor pertelevisian, walaupun sektor ini secara prinsip telah masuk dalam skema liberalisasi perdagangan. Upaya pemerintah Prancis yang selanjutnya adalah menggabungkan stasiun-stasiun televisi itu ke dalam satu saluran, France Television, walaupun pada akhirnya upaya itu gagal untuk dilakukan.

Terkait kepemilikan stasiun televisi, pertelevisian di Prancis pada tahun 1980-1990-an tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh firma-firma nonmedia dalam pengambilan arah pertelevisian. Stasiun televisi yang dikuasai tersebut diarahkan ke skema komersialisasi. Sisi lain, pertelevisian publik yang masih bertahan tidak dapat menandingi stasiun televisi privat yang semakin memperoleh pangsa pasar yang besar.

4.2.4. Proteksi Kultural: Strategi Lokal *Vis à Vis* Globalisasi

Perlindungan atas konten kultural yang dilakukan oleh pemerintah Prancis merupakan sebuah strategi untuk membendung dampak ekonomi global yang memengaruhi sektor audiovisual domestik dan membendung dominasi pasar audiovisual dari luar Eropa beserta pengaruh kultur yang dibawanya. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini satu sisi bersifat paradoks, terkait dukungan pemerintah terhadap stasiun televisi privat, Canal Plus yang memiliki orientasi pasar.

Sisi lain, dalam konteks implementasi kebijakan Direktif TWF, harmonisasi ptelevision supranasional pada tingkat nasional tidak berjalan baik, khususnya terkait konvergensi penyiaran dari analog ke digital maupun konversi format ptelevision yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan telnologi yang pesat tidak diikuti oleh reformasi kebijakan yang bersifat teknis pada tingkat Negara Nasional. Pada perkembangan selanjutnya, ptelevision Prancis didominasi oleh firma media yang mengarahkan ptelevision dalam skema komersialisasi.

Proteksi kultural yang diterapkan oleh pemerintah Prancis dapat dimaknai sebagai respon ekonomi untuk melindungi ptelevision nasional dari distribusi konten audiovisual Amerika. Prinsip perlindungan ini tidak berdaya di hadapan kekuatan globalisasi yang membawa dampak pada tingkat lokal. Proteksi kultural sendiri dapat dipahami sebagai rangkaian proses perlindungan atas konten kultural yang secara historis memiliki konteks yang berbeda.

Secara historis, tradisi ini dapat dijelaskan melalui perlindungan kultural terhadap karya kreatif seniman pada tanggal 19 Juli 1793, empat tahun setelah Revolusi Prancis tahun 1789.²⁴ sebuah dekrit dirumuskan untuk melindungi karya kreatif seniman, baik itu lukisan, karya patung, tulisan, dsb. Pada masa selanjutnya, yaitu masa Restorasi Ketiga, konsep warisan nasional (*patrimoine nationale*) diperkenalkan untuk mendefinisikan sebuah karya yang masuk dalam bagian perlindungan pemerintah. Negara kemudian memiliki posisi sebagai pelindung warisan nasional juga sebagai pengatur pasar kreatif seniman (*marché de l'art*).

Pada masa selanjutnya, politik kebudayaan Prancis dilanjutkan oleh *Front National*, partai yang berbasiskan ideologi nasionalis pada akhir tahun 1930-an.²⁵ Pada masa ini, negara memiliki misi untuk membawa sektor budaya ke tingkat lebih tinggi, atau lebih dikenal sebagai *popularisation*, yaitu upaya untuk mendekatkan produk budaya ini ke masyarakat luas. Pada masa berikutnya, yaitu masa Revolusi Nasional (*Revolution Nationale*) pada tahun 1940-1942, perlindungan konten kultural direalisasikan ke dalam tiga bentuk kebijakan:

²⁴ Politique Culturelle Française

<http://www.pollens.ens.fr/seminaire/politique-culturelle/politique-culturelle-francaise.pdf>

²⁵ Ibid

desentralisasi, popularisasi (*popularisation*) dan manajemen industri budaya, termasuk di antaranya sektor permuseuman, perfilman, dan seni.

Selanjutnya, pada periode Republik Keempat, upaya pemerintah untuk melindungi konten kultural diteruskan melalui dukungan finansial terhadap sektor perfilman Prancis, yang pada saat itu didominasi oleh perfilman Hollywood. Masa berikutnya adalah masa puncak politik kebudayaan yang ditandai oleh institusionalisasi politik kebudayaan pada tingkat nasional (1959-1981). Pada periode ini yang beroleh peran penting dalam upaya tersebut adalah Menteri Kebudayaan André Malraux (1959-1969) dengan proyek ambisiusnya, *les Maisons de la Culture* (Rumah Budaya) yang dilanjutkan oleh Menteri Kebudayaan selanjutnya, Jacques Duhamel (1971-1973). Pada masa Malraux tugas Kementerian Kebudayaan secara tegas dirumuskan sebagai berikut: "seorang menteri Kebudayaan memiliki misi untuk membuka akses karya-karya kemanusiaan, terlebih lagi karya Prancis, kepada warga Prancis; menjamin karya tersebut dinikmati oleh khalayak luas dalam konteks warisan nasional; mendorong pembentukan karya seni dan semangat untuk memperkayanya" (Hermes: 1996: 28). Pada masa kepemimpinannya, tiga hal yang ditekankan terhadap ranah budaya: demokratisasi, distribusi, dan pembentukan.

Pada tahun 1973-1981, ranah kebudayaan diatur oleh enam menteri yang berbeda. Pada periode ini visi Malraux dan gaya kepemimpinan Duhamel masih terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat (Hermes, 1996, h. 27). Sedangkan pada masa pemerintahan François Mitterand dan Menteri Kebudayaannya, Jack Lang (1981-1993), politik kebudayaan mengalami fase stagnasi, utamanya terkait sektor pertelevisian dan pembiayaan perfilman yang kontroversial.²⁶

²⁶ Pada tanggal 10 Mei 1982, pemerintahan Mitterand mengeluarkan secara resmi sebuah dekret atas nama menteri kebudayaan: Menteri Kebudayaan memiliki misi: memberikan ruang bagi warga Prancis untuk mengembangkan potensinya untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu, memberikan wadah bagi bakat-bakat warga dan menyediakan tempat sesuai pilihan mereka; melindungi warisan budaya nasional, regional, atau beragam komunitas sosial demi kepentingan masyarakat umum; mewadahi karya-karya seni agar bisa dinikmati masyarakat luas; memberikan kontribusi bagi kebudayaan dan seni Prancis dalam suatu dialog terbuka dengan kebudayaan lainnya.

Dikutip dari *L'État et la politique culturelle*

4.2.5. Eksepsi Kultural (*l'exception culturelle*)

Pada masa Mitterand, posisi produk kultural bersifat dilematis, utamanya ketika globalisasi media dan perkembangan pertelevisian satelit mengancam sektor audiovisual, termasuk pertelevisian. Sisi lain, kebijakan audiovisual pada tingkat supranasional mempersempit gerak pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan secara langsung. Kebijakan Direktif TWF 1989 yang berasaskan konsensus *acquis communautaire* tidak hanya menghilangkan kedaulatan nasional dalam hal perlindungan sektor domestik, namun kebijakan ini mempertaruhkan sektor audiovisual dan konten kultural di dalamnya dalam konteks liberalisasi perdagangan pada tingkat global, khususnya pada tingkat GATS. Istilah eksepsi kultural (*l'exception culturelle*) kemudian muncul untuk mengidentifikasi penolakan Komunitas Eropa dan Prancis terhadap penyertaan konten audiovisual dalam skema GATS (Regourd, 2002, h.11).

Istilah ini digunakan untuk merepresentasikan karakter negara Prancis yang bersifat protektif melindungi kekayaan kulturalnya. Sisi lain, pemaknaan baru istilah eksepsi budaya ini dapat ditelusuri pada era pemerintahan Charles de Gaulle dengan istilah yang telah dikenal sebelumnya, yaitu eksepsi Prancis (*l'exception française*). Secara kontekstual, kedua istilah ini dapat dimaknai sebagai representasi yang terbentuk melalui hubungan antara Negara dan Pasar. Pada masa Republik Ketiga, Charles de Gaulle menyebutkan hal ini secara konseptual sebagai *certaine idée de la France* yang dapat dimaknai sebagai keberpihakan terhadap kepentingan publik dan menolak sistem ekonomi liberal dan dominasi kultural Amerika Serikat atas konten audiovisual, khususnya perfilman.

Berdasarkan pemahaman itu, istilah eksepsi budaya mengacu sebuah prinsip untuk mengedepankan kepentingan nasional dan kepentingan umum (*la volonté générale*) dan kepentingan ini bisa dikaitkan juga dengan dimensi sosial. Menurut Regourd (2002), istilah eksepsi budaya juga terkait bagaimana peran politik terhadap pelayanan publik. Menurut Regourd, Prancis membangun sebuah doktrin pelayanan publik sebagai model institusionalisasi sosio-politik yang dengan sendirinya membentuk identitas Prancis. Melalui konstruksi identitas tersebut, kebudayaan ditempatkan ke dalam posisi sentral.

Sisi lain, proteksi kultural yang diterapkan oleh pemerintah Prancis ini tidak berdaya terhadap kekuatan ekonomi neoliberalisme yang mengakar dalam setiap kebijakan Komunitas Eropa pada tahun 1980-an. Hal ini menyebabkan sektor yang sebelumnya masuk ke dalam skema pelayanan publik mulai berkurang dan tergantikan oleh sektor yang masuk ke dalam kerangka komersialisasi, dalam hal ini pertelevisian.

Pada tingkat supranasional, sektor pertelevisian diarahkan ke dalam skema promosi, untuk mengenalkan nilai-nilai kultural antarnegara Nasional maupun ke luar Eropa. Sisi lain, skema perdagangan bebas atas konten pertelevisian dan penciptaan iklim kompetitif dalam konteks perdagangan internasional turut membuka kondisi sektor pertelevisian Negara Nasional sesungguhnya, dalam hal ini Prancis yang tidak siap menghadapi pengaruh globalisasi pada tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, baik dalam hal sarana, dukungan teknis, maupun keseriusan pemerintah untuk melindungi sektor pertelevisiannya.

4.3. Pertelevisian Eropa dan Redefinisi Konsep Ruang Publik

Ruang publik menurut Habermas merupakan sebuah wilayah sosial di mana individu berkumpul dan mendiskusikan dan mengidentifikasi problem sosial. Melalui diskusi tersebut terbentuk kemudian suatu tindakan politik (*praxis* dan *lexis*). Ruang publik ini memediasi antara ruang privat dan ruang publik otoritas, dalam konteks ini negara, atau penegak hukum, dan kelas dominan (Habermas, 1989, h. 30). Konsep ruang publik yang dirumuskan oleh Habermas ini terkait bagaimana opini publik tidak dikendalikan oleh otoritas penguasa dan tidak diarahkan ke dalam aktifitas ekonomi. Ruang publik secara konseptual merupakan tempat produksi dan sirkulasi wacana yang secara mendasar pula merupakan kritik atas otoritas. Ruang publik kemudian berbeda dari ranah ekonomi dan bukan terkait relasi pasar, namun ruang ini merupakan relasi yang bersifat diskursif, sebuah tempat untuk berdebat dan membebaskan diri, dan bukan tempat untuk menjual dan membeli (Habermas, 1989, 57).

Pertelevisian merupakan ruang publik terkait fungsinya sebagai tempat produksi informasi, pertelevisian dapat dijadikan sebuah model ruang publik partisipatoris dalam konteks perkembangan masyarakat televisual dan informasi.

Program televisi, seperti berita, diskusi, feature maupun dokumenter dalam televisi merupakan sumber informasi yang dapat direproduksi menjadi sebuah opini publik atau kepentingan politik. Rumusan Habermas tentang konsep ruang publik ini merupakan pelengkap teori demokrasi dan menjadi titik pijakan untuk memahami karakter pertelevisian Eropa dan konsep ruang publik.

Terkait ruang publik dalam pertelevisian, Dahlgren (1995) memformulasikan empat kategori pembentukan ruang publik dalam pertelevisian, yaitu: struktur sosial, institusi media, interaksi sosiokultural dan konten media. Kategori pertama menekankan struktur sosial dapat menciptakan aspek lain dalam konsep ruang publik melalui dinamika pada tingkat kesepakatan masyarakat yang bersifat institusional, interaksinya, dan representasi. Dahlgren kemudian menekankan dimensi yang luas untuk bisa memahami pembentukan ruang publik ini, termasuk pengaruh politik, ekonomi dan aspek hukum dalam pembentukan ruang publik ini (Dahlgren, 1995, h. 18). Yang kedua adalah media institusi yang terkait institusi atau organisasi yang membiayai sektor pertelevisian, baik pemerintah yang juga berfungsi sebagai pengontrol maupun pihak independen yang memberikan kebebasan komunikasi. Yang ketiga adalah interaksi sosiokultural yang terkait bagaimana fungsi media sebagai perekat warga negara dalam hal pembentukan identitas (Ibid: 23). Yang keempat adalah konten media yang terkait upaya warga negara untuk memahami representasi yang terkandung dalam media dan sikap kritis warga negara.

Pertelevisian Negara Nasional dalam konteks ini tereduksi ke dalam skema bersama pertelevisian, melalui kebijakan Direktif Television Without Frontiers yang mengikat Negara Nasional untuk mengharmonisasikan pertelevisiannya. Negara tidak lagi memiliki peran dalam penguasaan sektor pertelevisian, melainkan institusi supranasional, yaitu Komisi Eropa. Sikap resistensi Negara Nasional, khususnya Prancis terhadap kebijakan itu merupakan sebuah fase transisional dalam penerapan kebijakan pertelevisian supranasional tersebut. Yang terjadi pada tingkat nasional adalah peran firma media untuk mengakumulasi laba melalui stasiun televisi privat. Oleh karena itu, Komunitas Eropa merumuskan sebuah upaya untuk mengintegrasikan pertelevisian Negara Nasional, walaupun

upaya ini mengandung resiko ekonomi, dengan menempatkan sektor pertelevisian ke dalam skema perdagangan internasional dan penciptaan iklim kompetitif.

Pertelevisian Eropa dalam konteks kategori pertama merupakan bagian dari kebijakan sektoral Komunitas Eropa untuk mengarahkan sektor ini ke dalam skema promosi dan komersial. Kebijakan ini tersusun melalui kebijakan Direktif Television Without Frontiers yang mengikat Negara Nasional dalam satu skema ekonomi berdasarkan *acquis communautaire*. Peran Negara tereduksi dalam pengambilan kebijakan ini. Pertelevisian yang semula bersifat layanan publik pada tingkat Negara Nasional diposisikan ke dalam skema layanan publik supranasional.

Terkait kategori kedua, pembiayaan sektor pertelevisian dilimpahkan kepada institusi supranasional sebagai penerima mandat untuk memberikan kebebasan akses informasi. Negara dalam hal ini tereduksi kembali perannya, yang semula pengontrol arus informasi dan tergantikan oleh institusi supranasional melalui kebijakan Direktif TWF 1989. Akses kebebasan informasi ini kemudian menjadi landasan dalam pembentukan Masyarakat Informasi (Information Society), dalam revisi kebijakan TWF pada tahun 1997.

Kategori ketiga mengacu fungsi pertelevisian dalam kerangka kebijakan TWF 1989, yang berfungsi sebagai perekat sosial antara warga satu dengan warga lainnya yang berasal dari lain Negara Nasional. Tujuannya adalah menciptakan diversitas kultural melalui pertelevisian bersama, guna merumuskan kembali konsep keeropaan dan menghilangkan kebanggaan yang bersifat primordial.

Kategori keempat terkait fungsi lain media sebagai media refleksi dan menumbuhkan kesadaran kritis warga Eropa. Representasi yang ditayangkan oleh media tidak harus dipandang sebagai suatu yang reflektif dan kritis, namun bagaimana sikap warga negara itu diwujudkan ke dalam suatu bentuk keterlibatan yang bersifat partisipatoris dalam konteks visi kebijakan Direktif TWF 1989 dan kerangka keeropaan yang telah ditegaskan oleh Komisi Eropa, sebagai konten yang memiliki dimensi ekonomi dan kultural.

BAB V KESIMPULAN

Kebijakan Direktif Television Without Frontiers (89/552/EEC) merupakan cetak-biru kebijakan audiovisual Komunitas Eropa yang diresmikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1989. Kebijakan ini bertujuan untuk melengkapi skema Pasar Tunggal dan mengharmonisasi tatapenyiaran pada tingkat Negara Nasional. Kebijakan ini merupakan respon atas kondisi pertelevisian global dan perkembangan teknologi satelit pada tahun 1980-an. Para pengambil kebijakan kemudian dituntut untuk segera merealisasikan aturan, dalam konteks tatapenyiaran, dukungan finansial dan penguatan basis identitas nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim kompetitif sektor audiovisual dalam konteks perdagangan global, sehingga produk tersebut dapat berkembang, khususnya dari konten kultural dari luar Eropa.

Sisi lain, dalam konteks kebijakan pada tingkat Komunitas Eropa, dimensi sistem ekonomi neoliberal memberi bentuk kebijakan Direktif TWF 1989. Dimensi tersebut antara lain, pembentukan pasar terbuka (*open market*), minimalisasi peran negara (deregulasi), arah kebijakan yang bersifat promotif, dan pembentukan pasar yang kompetitif. Adopsi sistem ekonomi ini terkait harmonisasi sektor pertelevisian Komunitas Eropa pada tingkat global, khususnya pada tingkat skema perdagangan layanan dan jasa, GATS (*General Agreement on Trade and Services*) yang berlangsung pada tahun 1986-1994. Penyusunan kebijakan Direktif TWF 1989 merupakan respon atas kondisi ini, walaupun sektor audiovisual itu tidak jadi disertakan ke dalam skema perdagangan tersebut.

Pada saat yang sama, skema pertelevisian bersama yang terbentuk sebelum kebijakan Direktif TWF 1989, belum mampu mengakomodasi pangsa pasar pertelevisian negara-negara Eropa, terkait permasalahan linguistik dalam program televisi yang berbeda. Stasiun televisi yang bergabung ke dalam skema tersebut justru mengedepankan aspek nasionalismenya yang tercermin dalam program televisi berbahasa sesuai asal stasiun televisi tersebut. Kebijakan Direktif TWF 1989 kemudian mengakomodasi kepentingan Negara Nasional untuk mempromosikan konten audiovisualnya ke negara-negara Eropa yang lain.

Pada tahap implementasinya pada tingkat Negara Nasional, kebijakan Direktif TWF 1989 mengatur tatapenyiaran sesuai yurisdiksinya, mengatur skema subsidi, distribusi konten audiovisual, periklanan, dan perlindungan terhadap anak di bawah umur. Pasal yang terkait definisi penyiaran kemudian mendapat tanggapan oleh pihak Amerika Serikat. Aturan yang tercermin dalam pasal tersebut dianggap melanggar prinsip kebebasan menerima informasi dalam konteks penyiaran. Aturan yang bersifat ambivalen itu tercermin dalam kasus program televisi TNT & Cartoon Network yang kemudian dibawa pada tingkat Peradilan Eropa. Aturan selanjutnya yang menjadi permasalahan bagi Negara Nasional adalah penerapan kuota yang dianggap terlalu besar. Penerapan kuota ini bertujuan untuk mendukung produksi konten audiovisual Eropa. Sisi lain, kebijakan ini pada tingkat Negara Nasional dapat mengancam sektor audiovisual domestik.

Pada tingkat Negara Nasional, kebijakan Direktif TWF 1989 tentang penyiaran dan kuota mendapat resistensi dari Negara Nasional, khususnya Prancis yang gigih memertahankan prinsip proteksi kulturalnya pada tingkat GATS. Sistem ekonomi neoliberal yang menekankan aspek komersialisasi dalam kebijakan Direktif itu dianggap oleh pemerintah Prancis dapat mengancam sektor audiovisualnya, terlebih terhadap dominasi konten audiovisual dari Amerika Serikat.

Implementasi kebijakan pada tingkat nasional akhirnya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kebijakan Direktif pada tingkat supranasional tersebut secara tidak langsung mengikat Negara Nasional untuk segera menerapkannya dalam bentuk harmonisasi dan konvergensi modus penyiaran. Prancis kemudian melakukan langkah strategis untuk melindungi sektor pertelevisiannya yang akan diarahkan oleh Komisi Eropa ke dalam skema perdagangan global, dengan menyusun skema subsidi terhadap stasiun televisi dan kuota penyiaran yang mewajibkan stasiun televisi Negara Nasional menyiarkan produk Eropa.

Prancis sebagai salah satu negara yang memiliki tradisi proteksi ketat atas konten kultural, justru memberi kesempatan bagi firma-firma besar perfilman untuk menguasai pangsa pasar audiovisual domestik melalui kebijakan subsidi film berbiaya besar yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan era Mitterrand, Jack

Lang dan pemberian keistimewaan bagi stasiun televisi privat, Canal Plus. Tradisi proteksi kultural ini kemudian mengalami deklinasi sejak masa pemerintahan Charles de Gaulle yang menerapkan prinsip *dirigiste*. Pada era Francois Mitterand tradisi perlindungan kultural ini mengalami hal yang sebaliknya. Hal ini kemudian merepresentasikan bagaimana pemerintah pada tingkat Negara Nasional tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi global yang menuntut skema kebijakan baru terhadap pertelevisian.

Secara konseptual, pertelevisian merupakan arena produksi dan reproduksi informasi yang membentuk opini publik berdasarkan semangat demokrasi. Konsep ruang publik ini menurut Habermas dapat terseret ke dalam arus komersialisasi dan berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi. Pertelevisian sebagai basis pembentukan opini publik itu dalam konteks historisnya mengalami fase stagnan, khususnya pada masa Charles de Gaulle yang memanfaatkan pertelevisian publik untuk membentuk opini pemerintah, khususnya dalam peristiwa politik di Aljazair. Pada masa pemerintahan Mitterand, peran negara kemudian diminimalisasi melalui undang-undang penyiaran yang disusun pada tahun 1982. Sisi lain, upaya tersebut justru dinodai oleh pemerintah Prancis dengan memberi keistimewaan kepada stasiun televisi komersial, Canal Plus.

Kebijakan Direktif TWF 1989 merefleksikan bagaimana respon pengambil kebijakan pada tingkat supranasional terhadap globalisasi dan perkembangan teknologi. Pemerintah Negara Nasional, khususnya Prancis mengalami hal serupa. Upaya yang dilakukan keduanya merupakan bentuk strategi, walaupun dalam praktiknya ditemukan berbagai kontradiksi dan mengindikasikan ketidaksiapan negara Prancis menyongsong globalisasi, khususnya dalam sektor pertelevisian.

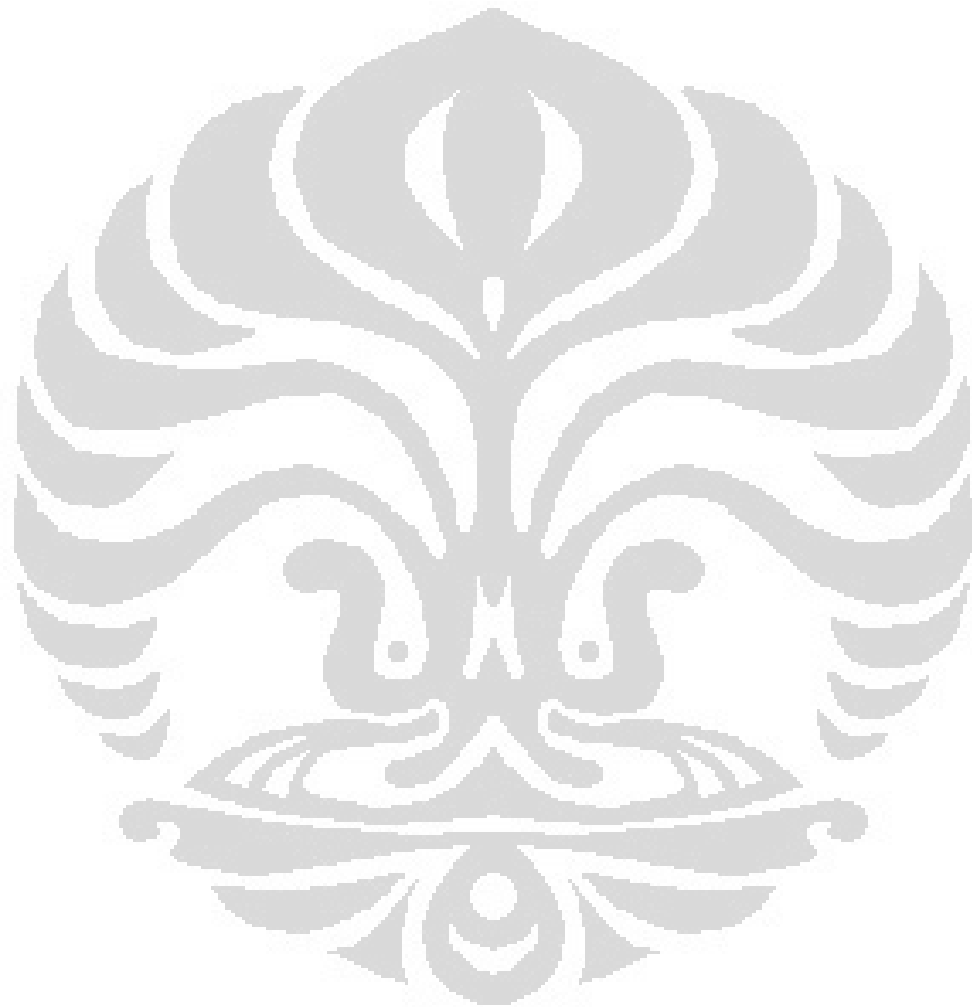
Skema pertelevisian berbasis kultur kemudian dibentuk untuk memberi tayangan alternatif dan sebagai basis informasi yang memuat nilai-nilai keeropaan dalam program televisi. Sebagai basis informasi, stasiun berbasis budaya ini merupakan wadah strategis untuk membentuk opini publik yang netral dan tidak terkait komersialisasi atas konten audiovisual. Sisi lain, upaya ini memang tidak memberikan hasil maksimal, terkait bagaimana opini publik itu bertransformasi menjadi tindakan politik dalam konteks pertelevisian.

Oleh karena itu, revisi kebijakan Direktif TWF 1989 selanjutnya menekankan aspek pembentukan opini publik berbasis kebebasan menerima dan menyiarkan informasi berbasis konten digital dalam konteks teknologi informasi. Revisi kebijakan Direktif TWF 1989 ini menghasilkan skema pembentukan Masyarakat Informasi (*Information Society*) sebagai respon terhadap globalisasi dan arus informasi yang datang dari mana saja. Pembentukan skema ini merupakan upaya penting di tengah pembentukan opini publik berbasis media audiovisual yang dikuasai oleh korporasi media pada tingkat global.

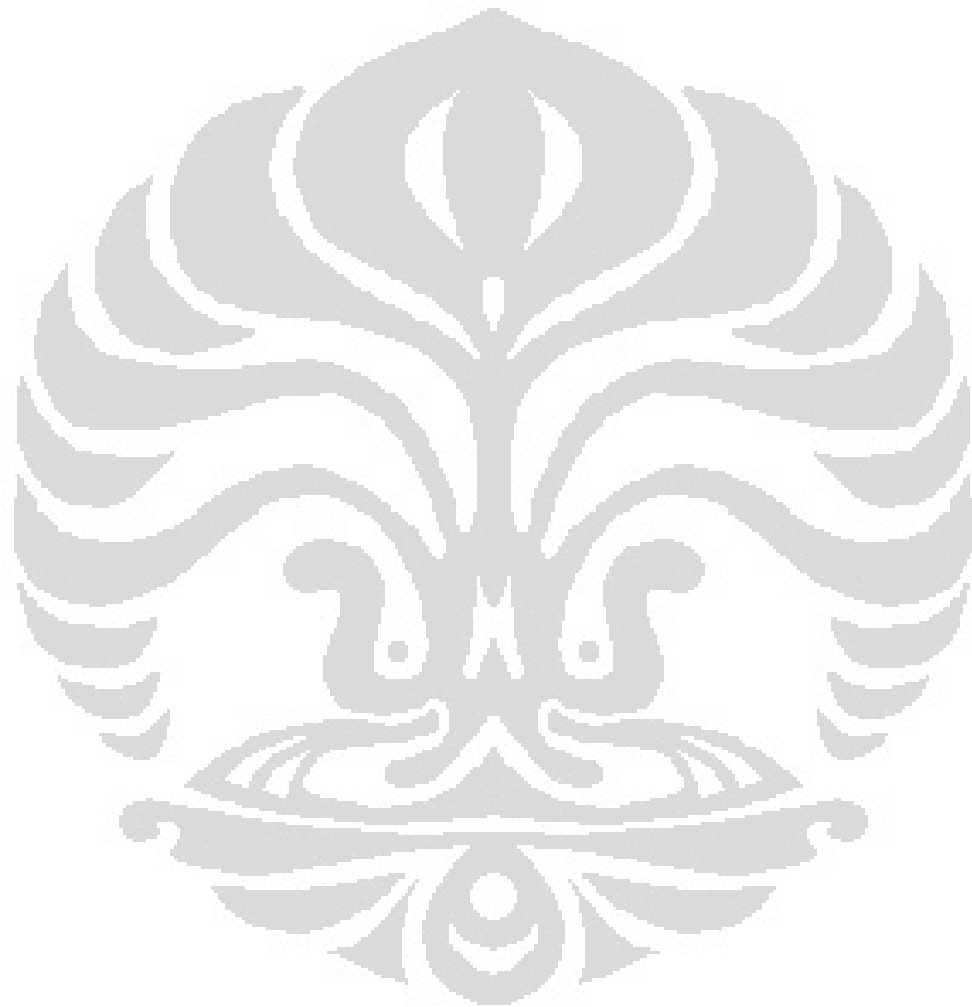
Yang terakhir, penelitian ini bermanfaat untuk memahami kaitan pertelevisian dan konsep ruang publik. Terkait dengan kontesaknya di Indonesia, penelitian ini bisa menjelaskan bagaimana dominasi media global dapat memengaruhi kondisi pertelevisian nasional dalam hal produksi dan distribusi produk pertelevisian, film maupun konten kultural yang lain. Resistensi negara Prancis terhadap dominasi produk dari luar dapat menjadi sebuah pelajaran bagaimana negara memiliki peran sentral dalam perlindungan terhadap pertelevisian. Hal ini dapat dijadikan rancangan untuk Indonesia agar merumuskan kembali prinsip perlindungan pertelevisian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

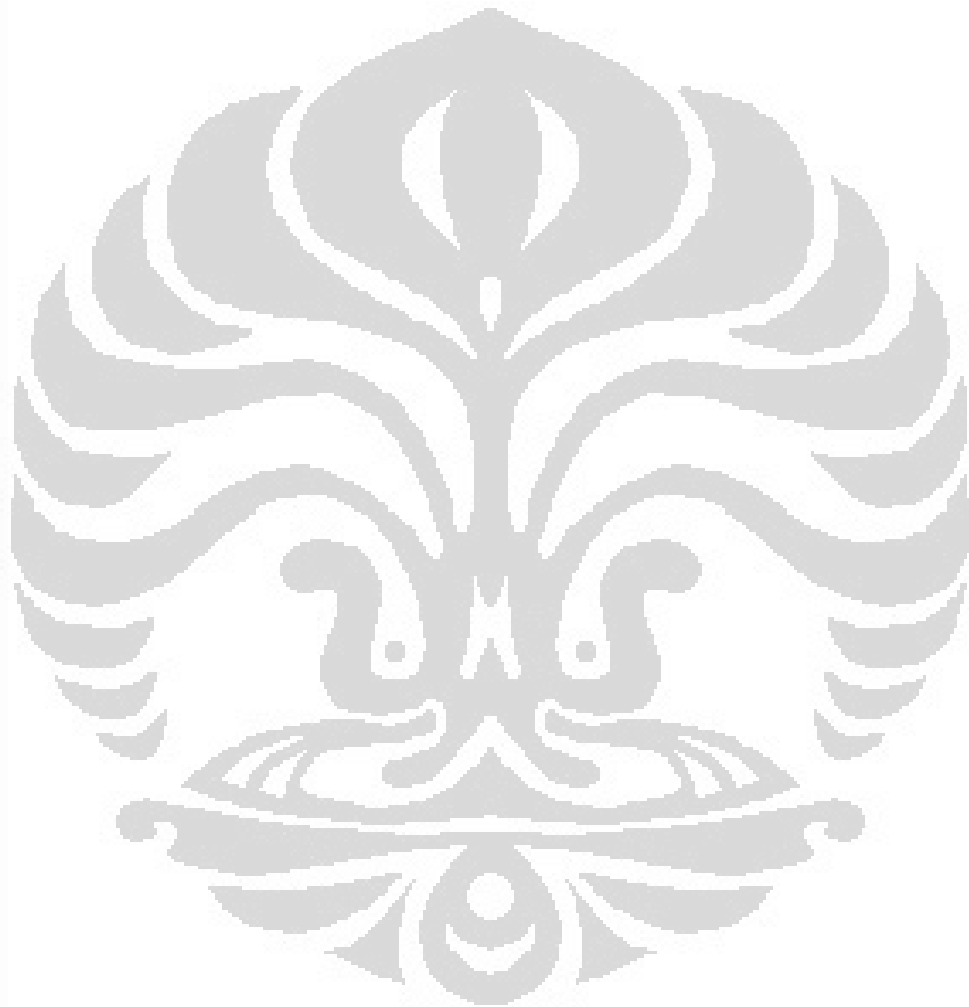
- A. White, Livingstone. 2001. "Reconsidering Cultural Imperialism Theory". *Transnational Broadcasting Studies*. No.6. Spring/Summer.
- Baer, Jean-Michel & del Corral, Miraglos. 1998. "Cultural Programs on European Public Television Channels: Comparative Approach Recommendations". Study Undertaken for UNESCO and European Commission.
- Bens, Els de 7 Smaele, Ludwig. 2001. "The Inflow of American Television Fiction on American Broadcasting Channels Revisited". *European Journal of Communication*. Vol. 16(1). Pp. 51-76.
- Cave, Martin & Nakamura, Kiyoshi (eds.). 2006. *Digital Broadcasting: Policy Practices in the Americas, Europe and Japan*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Cerny, Phillip, G, et. al. (eds.). 2005. *Internalizing Globalization: the Rise of Neoliberalism and the Decline National Varieties of Capitalism*. London: Palgrave.
- Charlot, Jean. 1994. *La Politique en France*. Paris: INÉDIT.
- Chalaby, Jean, K. 2002. *The Gaulle Presidency and the Media*. New York, Palgrave: Macmillan.
- , 2009. *Transnational Television in Europe: Reconfiguring Global Communications Networks*. New York: IB Tauris & Co. Ltd.
- (ed.). 2005. *Transnational Television Worldwide: Towards a New Media Order*. New York: IB Tauris & Co. Ltd.
- Conley, Janet, L. 1993. "Hollywood Last Hurrah: Television Without Frontiers Directive May Close Borders to European Community Broadcasting Market". *The Journal of International Business Law*, Vol. 14, Issue 1.
<http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume14/issue1/Conley14U.Pa.J.Int%27IBus.L.87%281993%29.pdf>
- Collins, Richard. 1998. *From Satellite to Single Market: New Communication Technology and European Public Television*. New York: Routledge.



- Dahlgren, Peter & Sparks, Colin. 1991. *Communication and Citizenship: Journalism and the Public Sphere*. New York: Routledge.
- De Bens, Els & Smaele, Ludwig. 2001. "The Inflow American Television on European Broadcasting". *The European Journal of Communication*. Vol 16 (1): 51-76.
- Doyle, Gillian. 2002. *Media Ownership*. London: SAGE Publications.
- , 2002. *Understanding Media Economics*. London: SAGE Publications.
- Flibbert, Andrew, J. 2007. *Commerce in Culture: States and Markets in the World Film Trade*. New York: Palgrave Macmillan.
- Girard, Augustin. 1996. "La politique Culturelle d'André Malraux à Jack Lang: Ruptures et Continuités, Histoire de Modernisation". *Hermes*, No. 20.
- Gordon, Phillip, H. & Meunier, Sophie. 2001. "Globalization and French Cultural Identity". In *French Politics, Culture and Society*, Vol.19, No.1, Spring.
- Human Development Report 2004: Cultural Liberty in Today's Divers World*. London. United Nations Development Programme.
- Kelly, Mary., Gianpietro, Mazzoleni., & McQuail, Denis (eds.). *The Media in Europe: Euromedia Handbook (3rd Edition)*. London: SAGE Publications.
- Kuhn, Raymond (ed.). 2005. *Broadcasting and Politics in Western Europe*. London: Frank Cass.
- Lerner, Wendy, dalam De Goede, Marieke (ed.). 2006. *International Political Economy and Post structural Politics*. Amsterdam: Palgravs McMillan.
- Messerlin, Patrick & Cocq, Emmanuel. 2003. "French Audiovisual Policy: Impact on the Trade Negotiations". Report. Hamburg Institute of Economics.
- Messerlin, Patrick. et. al. 2004. *The Audiovisual Services Sector in the GATS Negotiations*. Washington and Paris: the American Enterprise Institute & Groupe d'Economie Mondiale de Sciences-Po.
- McQuail, Denis et. al., 2004. *The Media in Europe: Euromedia Handbook*. London: SAGE Publications.



- Mirlesse, Alexandre & Anglade, Arthur. 2006. "Quelle Politique Culturelle Pour la France". Débat HEC-ENS à l'Ecole Normale Supérieure, 26 Avril.
- Moran, Albert. 1996. *Film Policy: International, National and Regional Perspective*. New York: Routledge.
- Levy, David. 2005. *Europe's Digital Revolution: Broadcasting Regulation, the EU and the Nation State*. New York: Routledge.
- Regourd, Serge. 2002. *L'exception Culturelle*. Paris: PUF.
- Sreberny, Annabelle, dalam Curran, James & Gerevitch, Michael (eds.). 1991. *The Global and the Local in International Communication*.
- Sparks, Colin. 2007. *Globalization, Development and the Mass Media*. London: SAGE Publications Ltd.
- Stake, Robert, E. 2010. *Qualitative Research*. New York: Guilford Press.
- Theiler, Tobias. "Why the European Union Failed to Europeanize Audiovisual Policy." In: *Constructing Europe's Identity: The External Dimension*, edited by Lars-Erik Cederman. Boulder & London: Lynne Rienner, 2001.
- Wallerstein, Immanuel. 2004. *World System Analysis*. Duke University Press.
- Wallerstein, Immanuel & Hopkins, Terence, K. 1982. *World System Analysis: Theory and Methodology*. London: SAGE Publications.
- Wilkins, Kelly. 1991. "Television Without Frontiers: An EEC Broadcasting Premiere". *Boston College International and Comparative Law Review*. Vol. 14(1).
<http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1342&context=iclr&sei-redir=1#search=%22television+without+frontiers++date%22>
 (diunduh pada tanggal 12 Juni 2011, pukul 22.30 WIB).
- Zampetti, Americo Beviglia. 2003. "WTO Rules in the Audiovisual Sector". Report: Hamburg Institute of International Economics.



Website

Council Directive, "Television Without Frontiers Directive", 3 Oktober 1989
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:298:0023:0030:EN:PDF>
(diunduh pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 12.41 WIB)

The European Convention on Human Rights and its Five Protocols
<http://www.hri.org/docs/ECHR50.html>
(diunduh pada tanggal 16 Juni, pukul 13.50 WIB)

Traktat Roma (1957)
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf
(diunduh pada tanggal 12 Juni 2011, pukul 13.40 WIB)

Traktat Maastricht (1992)
<http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf>
(diunduh pada tanggal 23 Mei 2011, pukul 21.35 WIB)

EC Consultation on Television Without Frontiers Directive
<http://www.fub.it/files/ECconsultationontheTelevisionWithoutFrontiersDirective.pdf>
(diunduh pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 20.30 WIB)

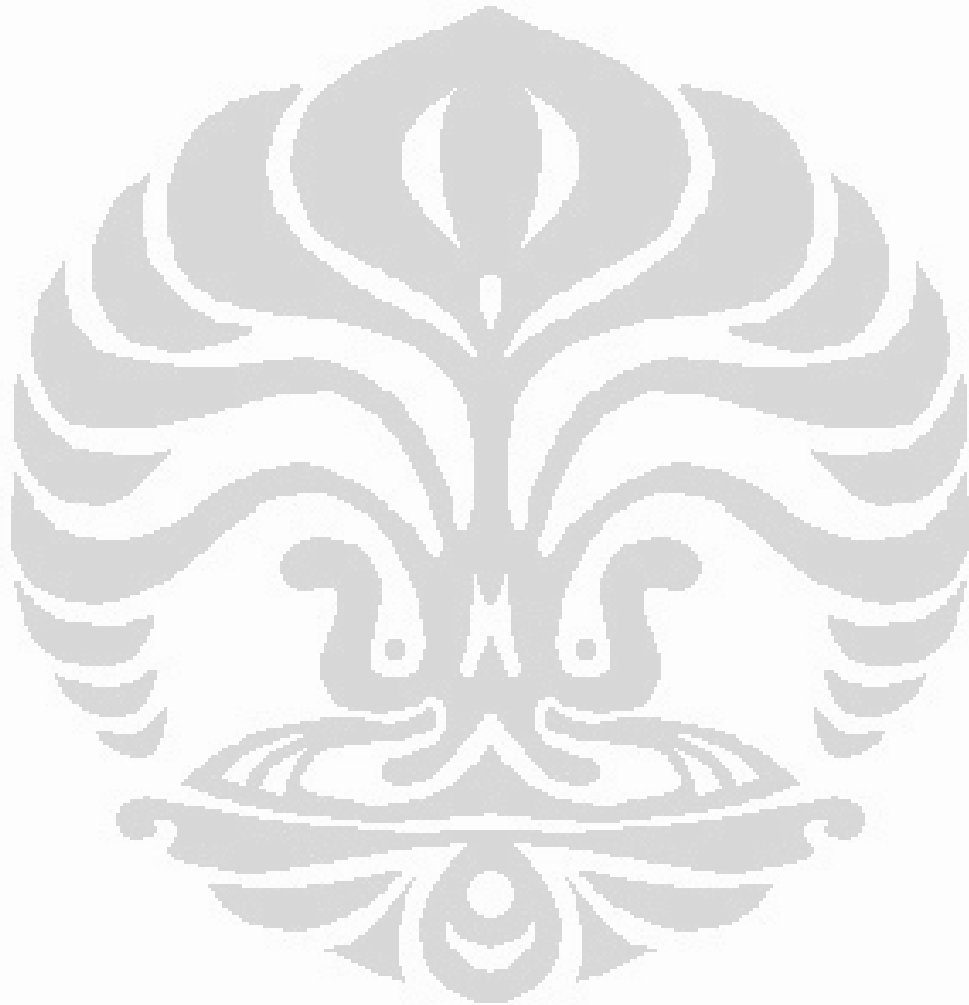
Audiovisual Services: Background Note by the Secretariat.
www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/w40.doc
(diakses tanggal 24 Maret 2011 pukul 17.05 WIB)

Audiovisual Policy
http://europa.eu/pol/av/index_en.htm
(diakses tanggal 2 April 2011 pukul 12.30 WIB)

Politique Culturelle en France
<http://www.pollens.ens.fr/seminaire/politique-culturelle/politique-culturelle-francaise.pdf>
(diakses tanggal 4 April 2011 pukul 23.45 WIB)

Official Journal of the European Communities 18.12.2000, EN C 364/10
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en//FTU_4.17.5.pdf
(diakses tanggal 4 April 2011 pukul 12.00 WIB)

Institute Nationale de l'Audiovisuel, Television History and French Exception
<http://www.inaglobal.fr/en/television/article/television-history-french-exception>



II

(Acts whose publication is not obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DIRECTIVE

of 3 October 1989

on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities

(89/552/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Articles 57 (2) and 66 thereof,

having regard to the proposal from the Commission⁽¹⁾,

in cooperation with the European Parliament⁽²⁾,

having regard to the opinion of the Economic and Social Committee⁽³⁾,

Whereas the objectives of the Community as laid down in the Treaty include establishing an even closer union among the peoples of Europe, fostering closer relations between the States belonging to the Community, ensuring the economic and social progress of its countries by common action to eliminate the barriers which divide Europe, encouraging the constant improvement of the living conditions of its peoples as well as ensuring the preservation and strengthening of peace and liberty;

Whereas the Treaty provides for the establishment of a common market, including the abolition, as between Member States, of obstacles to freedom of movement for services and the institution of a system ensuring that competition in the common market is not distorted;

Whereas broadcasts transmitted across frontiers by means of various technologies are one of the ways of pursuing the objectives of the Community; whereas measures

should be adopted to permit and ensure the transition from national markets to a common programme production and distribution market and to establish conditions of fair competition without prejudice to the public interest role to be discharged by the television broadcasting services;

Whereas the Council of Europe has adopted the European Convention on Transfrontier Television;

Whereas the Treaty provides for the issuing of directives for the coordination of provisions to facilitate the taking up of activities as self-employed persons;

Whereas television broadcasting constitutes, in normal circumstances, a service within the meaning of the Treaty;

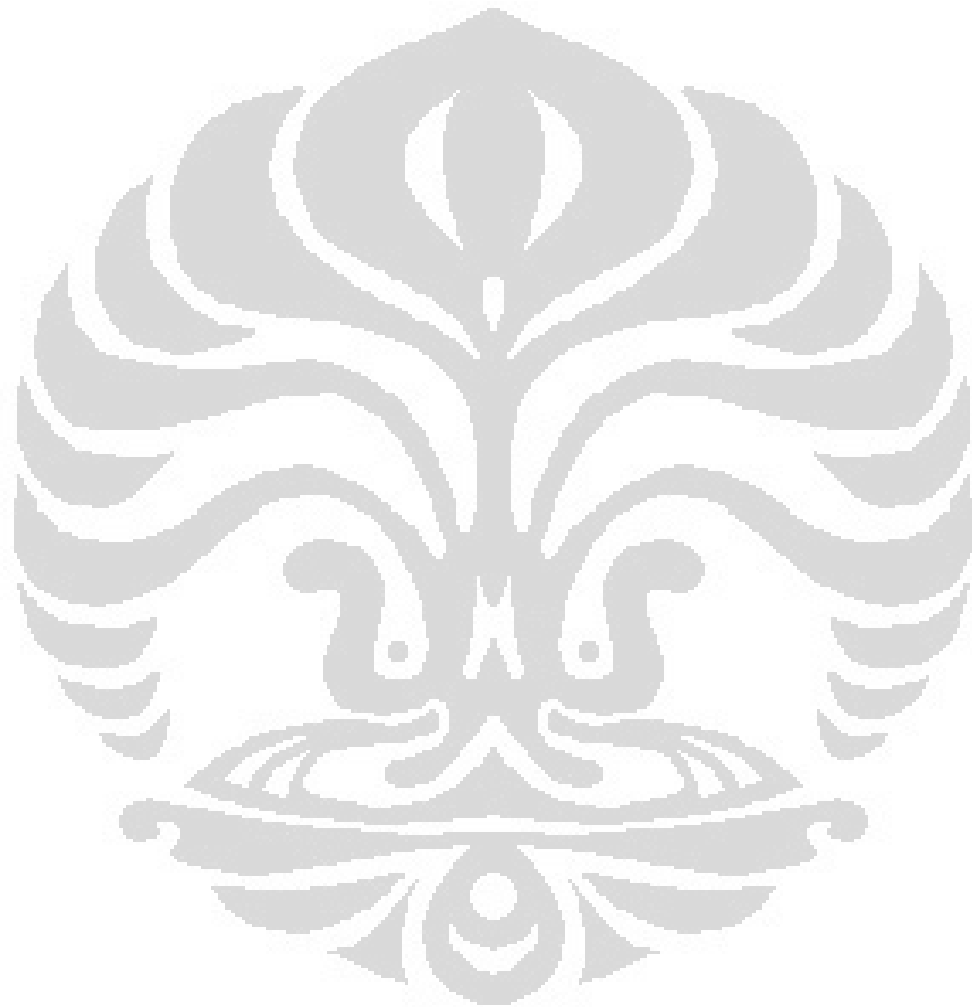
Whereas the Treaty provides for free movement of all services normally provided against payment, without exclusion on grounds of their cultural or other content and without restriction of nationals of Member States established in a Community country other than that of the person for whom the services are intended;

Whereas this right as applied to the broadcasting and distribution of television services is also a specific manifestation in Community law of a more general principle, namely the freedom of expression as enshrined in Article 10 (1) of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ratified by all Member States; whereas for this reason the issuing of directives on the broadcasting and distribution of television programmes must ensure their free movement in the light of the said Article and subject only to the limits set by paragraph 2 of that Article and by Article 56 (1) of the Treaty;

(1) OJ No C 179, 17. 7. 1986, p. 4.

(2) OJ No C 49, 22. 2. 1988, p. 53, and OJ No C 158, 26. 6. 1989.

(3) OJ No C 232, 31. 8. 1987, p. 29.



Whereas the laws, regulations and administrative measures in Member States concerning the pursuit of activities as television broadcasters and cable operators contain disparities, some of which may impede the free movement of broadcasts within the Community and may distort competition within the common market;

Whereas all such restrictions on freedom to provide broadcasting services within the Community must be abolished under the Treaty;

Whereas such abolition must go hand in hand with coordination of the applicable laws; whereas this coordination must be aimed at facilitating the pursuit of the professional activities concerned and, more generally, the free movement of information and ideas within the Community;

Whereas it is consequently necessary and sufficient that all broadcasts comply with the law of Member State from which they emanate;

Whereas this Directive lays down the minimum rules needed to guarantee freedom of transmission in broadcasting; whereas, therefore, it does not affect the responsibility of the Member States and their authorities with regard to the organization — including the systems of licensing, administrative authorization or taxation — financing and the content of programmes; whereas the independence of cultural developments in the Member States and the preservation of cultural diversity in the Community therefore remain unaffected;

Whereas it is necessary, in the common market, that all broadcasts emanating from and intended for reception within the Community and in particular those intended for reception in another Member State, should respect the law of the originating Member State applicable to broadcasts intended for reception by the public in that Member State and the provisions of this Directive;

Whereas the requirement that the originating Member State should verify that broadcasts comply with national law as coordinated by this Directive is sufficient under Community law to ensure free movement of broadcasts without secondary control on the same grounds in the receiving Member States; whereas, however, the receiving Member State may, exceptionally and under specific conditions provisionally suspend the retransmission of televised broadcasts;

Whereas it is essential for the Member States to ensure the prevention of any acts which may prove detrimental to freedom of movement and trade in television programmes or which may promote the creation of

dominant positions which would lead to restrictions on pluralism and freedom of televised information and of the information sector as a whole;

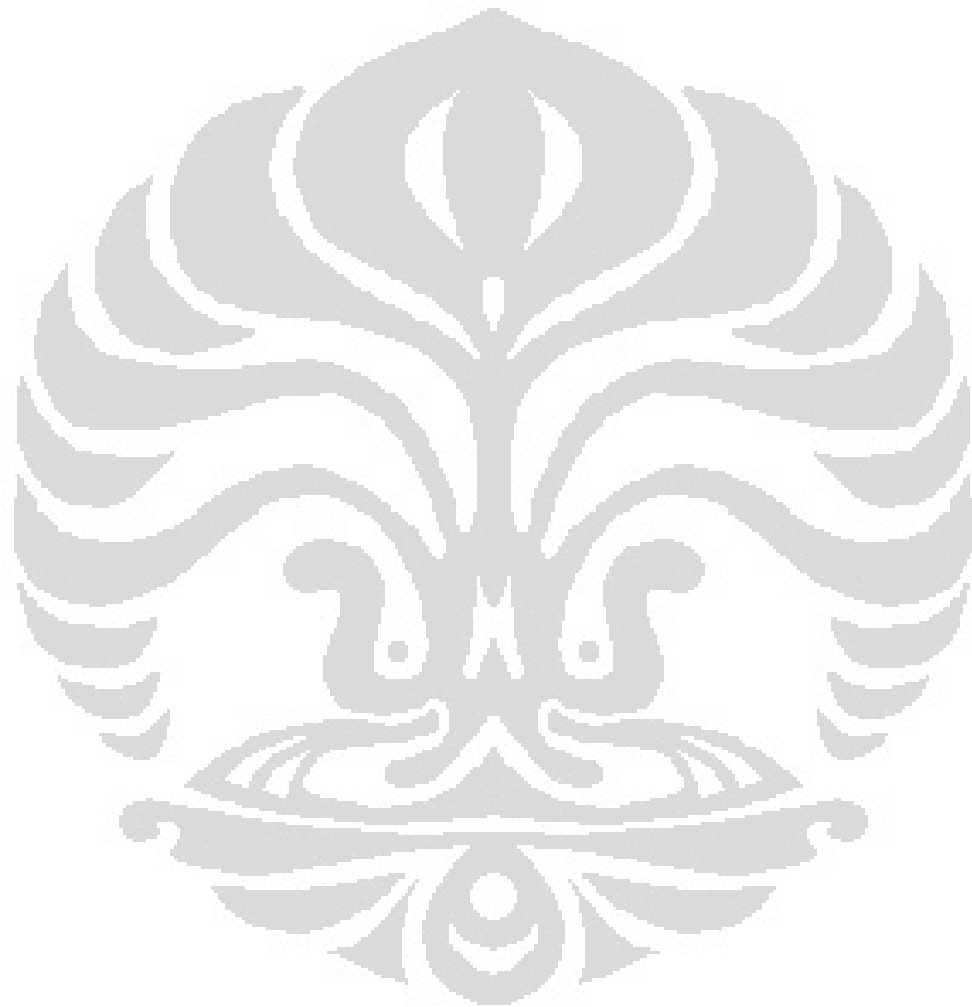
Whereas this Directive, being confined specifically to television broadcasting rules, is without prejudice to existing or future Community acts of harmonization, in particular to satisfy mandatory requirements concerning the protection of consumers and the fairness of commercial transactions and competition;

Whereas co-ordination is nevertheless needed to make it easier for persons and industries producing programmes having a cultural objective to take up and pursue their activities;

Whereas minimum requirements in respect of all public or private Community television programmes for European audio-visual productions have been a means of promoting production, independent production and distribution in the abovementioned industries and are complementary to other instruments which are already or will be proposed to favour the same objective;

Whereas it is therefore necessary to promote markets of sufficient size for television productions in the Member States to recover necessary investments not only by establishing common rules opening up national markets but also by envisaging for European productions where practicable and by appropriate means a majority proportion in television programmes of all Member States; whereas, in order to allow the monitoring of the application of these rules and the pursuit of the objectives, Member States will provide the Commission with a report on the application of the proportions reserved for European works and independent productions in this Directive; whereas for the calculation of such proportions account should be taken of the specific situation of the Hellenic Republic and the Portuguese Republic; whereas the Commission must inform the other Member States of these reports accompanied, where appropriate by an opinion taking account of, in particular, progress achieved in relation to previous years, the share of first broadcasts in the programming, the particular circumstances of new television broadcasters and the specific situation of countries with a low audio-visual production capacity or restricted language area;

Whereas for these purposes 'European works' should be defined without prejudice to the possibility of Member States laying down a more detailed definition as regards television broadcasters under their jurisdiction in accordance with Article 3 (1) in compliance with Community law and account being taken of the objectives of this Directive;



Whereas it is important to seek appropriate instruments and procedures in accordance with Community law in order to promote the implementation of these objectives with a view to adopting suitable measures to encourage the activity and development of European audio-visual production and distribution, particularly in countries with low production capacity or restricted language area;

Whereas national support schemes for the development of European production may be applied in so far as they comply with Community law;

Whereas a commitment, where practicable, to a certain proportion of broadcasts for independent productions, created by producers who are independent of broadcasters, will stimulate new sources of television production, especially the creation of small and medium-sized enterprises; whereas it will offer new opportunities and outlets to the marketing of creative talents of employment of cultural professions and employees in the cultural field; whereas the definition of the concept of independent producer by the Member States should take account of that objective by giving due consideration to small and medium-sized producers and making it possible to authorize financial participation by the coproduction subsidiaries of television organizations;

Whereas measures are necessary for Member States to ensure that a certain period elapses between the first cinema showing of a work and the first television showing;

Whereas in order to allow for an active policy in favour of a specific language, Member States remain free to lay down more detailed or stricter rules in particular on the basis of language criteria, as long as these rules are in conformity with Community law, and in particular are not applicable to the retransmission of broadcasts originating in other Member States;

Whereas in order to ensure that the interests of consumers as television viewers are fully and properly protected, it is essential for television advertising to be subject to a certain number of minimum rules and standards and that the Member States must maintain the right to set more detailed or stricter rules and in certain circumstances to lay down different conditions for television broadcasters under their jurisdiction;

Whereas Member States, with due regard to Community law and in relation to broadcasts intended solely for the national territory which may not be received, directly or indirectly, in one or more Member States, must be able to lay down different conditions for the insertion of advertising and different limits for the volume of advertising in order to facilitate these particular broadcasts;

Whereas it is necessary to prohibit all television advertising promoting cigarettes and other tobacco products including indirect forms of advertising which,

whilst not directly mentioning the tobacco product, seek to circumvent the ban on advertising by using brand names, symbols or other distinctive features of tobacco products or of undertakings whose known or main activities include the production or sale of such products;

Whereas it is equally necessary to prohibit all television advertising for medicinal products and medical treatment available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the broadcaster falls and to introduce strict criteria relating to the television advertising of alcoholic products;

Whereas in view of the growing importance of sponsorship in the financing of programmes, appropriate rules should be laid down;

Whereas it is, furthermore, necessary to introduce rules to protect the physical, mental and moral development of minors in programmes and in television advertising;

Whereas although television broadcasters are normally bound to ensure that programmes present facts and events fairly, it is nevertheless important that they should be subject to specific obligations with respect to the right of reply or equivalent remedies so that any person whose legitimate interests have been damaged by an assertion made in the course of a broadcast television programme may effectively exercise such right or remedy.

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

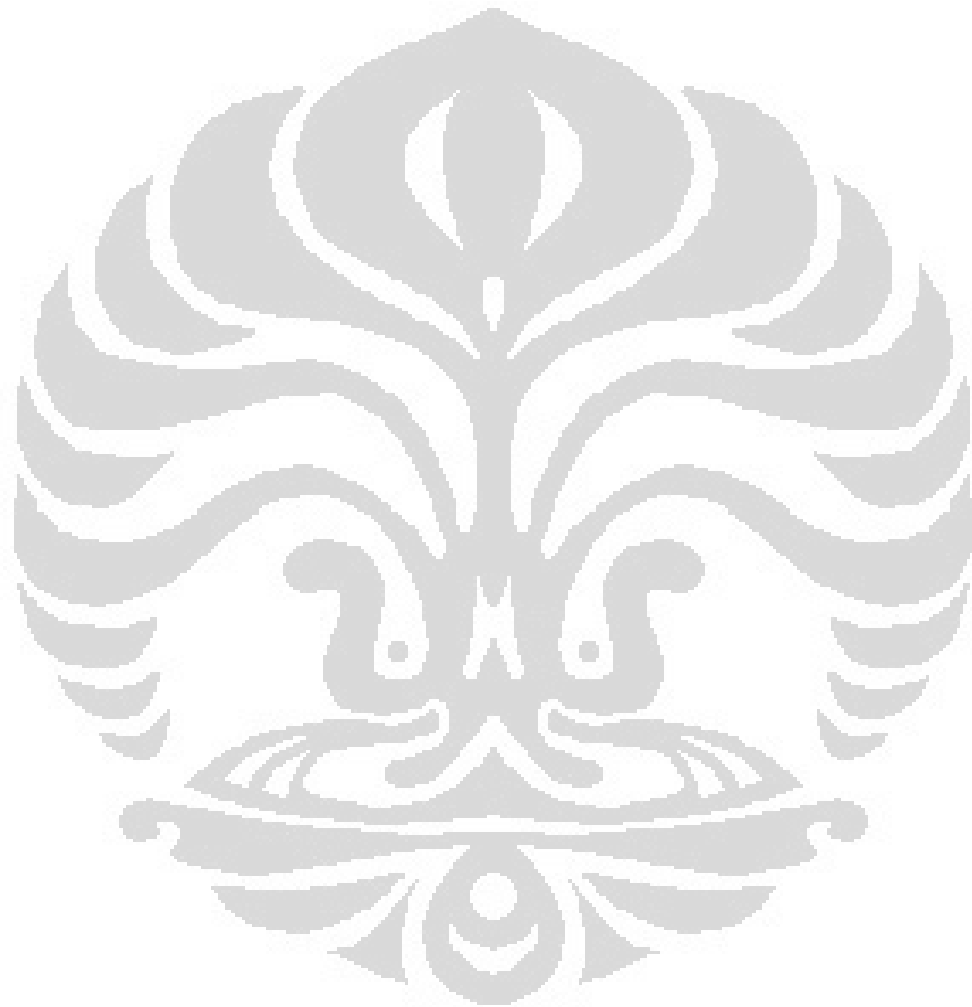
CHAPTER I

Definitions

Article 1

For the purpose of this Directive:

- (a) 'television broadcasting' means the initial transmission by wire or over the air, including that by satellite, in unencoded or encoded form, of television programmes intended for reception by the public. It includes the communication of programmes between undertakings with a view to their being relayed to the public. It does not include communication services providing items of information or other messages on individual demand such as telecopying, electronic data banks and other similar services;
- (b) 'television advertising' means any form of announcement broadcast in return for payment or for similar consideration by a public or private undertaking in connection with a trade, business, craft or profession in order to promote the supply of goods or services, including immovable property, or rights and obligations, in return for payment.



Except for the purposes of Article 18, this does not include direct offers to the public for the sale, purchase or rental of products or for the provision of services in return for payment;

- (c) 'surreptitious advertising' means the representation in words or pictures of goods, services, the name, the trade mark or the activities of a producer of goods or a provider of services in programmes when such representation is intended by the broadcaster to serve advertising and might mislead the public as to its nature. Such representation is considered to be intentional in particular if it is done in return for payment or for similar consideration;
- (d) 'sponsorship' means any contribution made by a public or private undertaking not engaged in television broadcasting activities or in the production of audio-visual works, to the financing of television programmes with a view to promoting its name, its trade mark, its image, its activities or its products.

CHAPTER II

General provisions

Article 2

1. Each Member State shall ensure that all television broadcasts transmitted

- by broadcasters under its jurisdiction, or
- by broadcasters who, while not being under the jurisdiction of any Member State, make use of a frequency or a satellite capacity granted by, or a satellite up-link situated in, that Member State,

comply with the law applicable to broadcasts intended for the public in that Member State.

2. Member States shall ensure freedom of reception and shall not restrict retransmission on their territory of television broadcasts from other Member States for reasons which fall within the fields coordinated by this Directive. Member States may provisionally suspend retransmissions of television broadcasts if the following conditions are fulfilled:

- (a) a television broadcast coming from another Member State manifestly, seriously and gravely infringes Article 22;
- (b) during the previous 12 months, the broadcaster has infringed the same provision on at least two prior occasions;
- (c) the Member State concerned has notified the broadcaster and the Commission in writing of the alleged

infringements and of its intention to restrict retransmission should any such infringement occur again;

- (d) consultations with the transmitting State and the Commission have not produced an amicable settlement within 15 days of the notification provided for in point (c), and the alleged infringement persists.

The Commission shall ensure that the suspension is compatible with Community law. It may ask the Member State concerned to put an end to a suspension which is contrary to Community law, as a matter of urgency. This provision is without prejudice to the application of any procedure, remedy or sanction to the infringements in question in the Member State which has jurisdiction over the broadcaster concerned.

3. This Directive shall not apply to broadcasts intended exclusively for reception in States other than Member States, and which are not received directly or indirectly in one or more Member States.

Article 3

1. Member States shall remain free to require television broadcasters under their jurisdiction to lay down more detailed or stricter rules in the areas covered by this Directive.

2. Member States shall, by appropriate means, ensure, within the framework of their legislation, that television broadcasters under their jurisdiction comply with the provisions of this Directive.

CHAPTER III

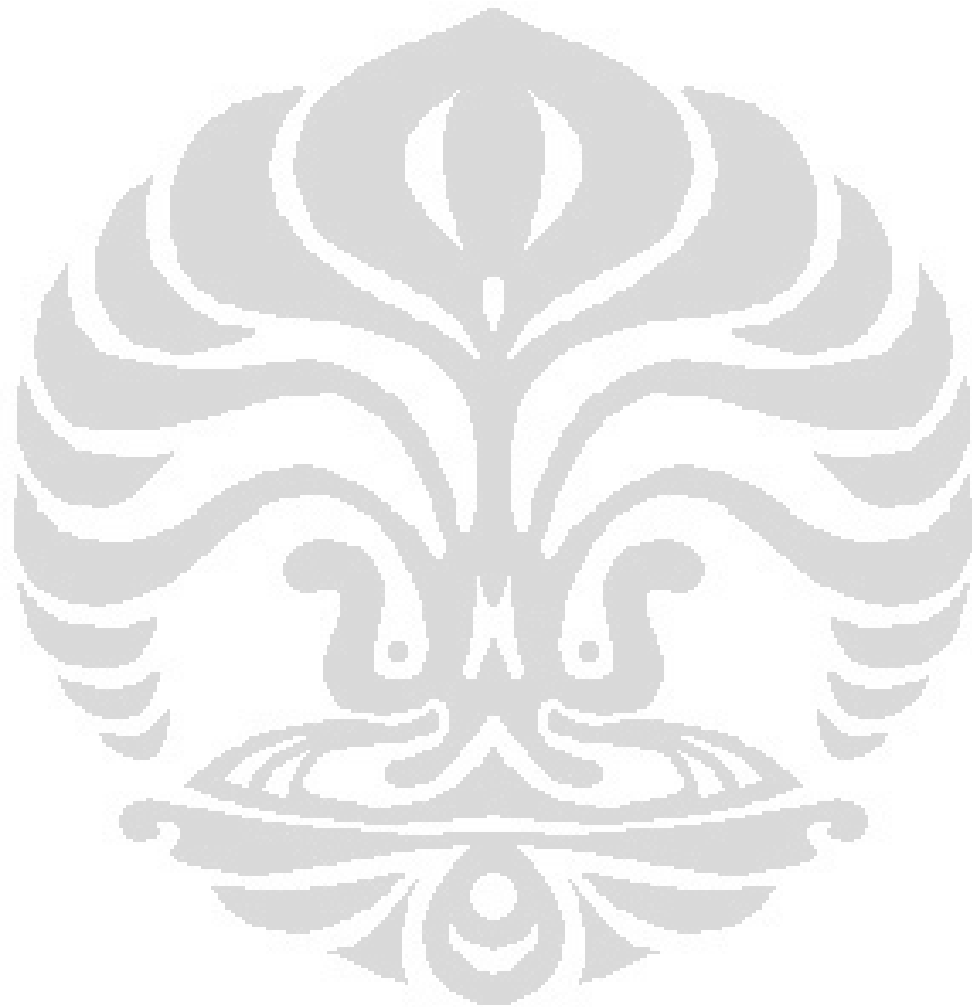
Promotion of distribution and production of television programmes

Article 4

1. Member States shall ensure where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve for European works, within the meaning of Article 6, a majority proportion of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising and teletext services. This proportion, having regard to the broadcaster's informational, educational, cultural and entertainment responsibilities to its viewing public, should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria.

2. Where the proportion laid down in paragraph 1 cannot be attained, it must not be lower than the average for 1988 in the Member State concerned.

However, in respect of the Hellenic Republic and the Portuguese Republic, the year 1988 shall be replaced by the year 1990.



From 3 October 1991, the Member States shall provide the Commission every two years with a report on the application of this Article and Article 5.

That report shall in particular include a statistical statement on the achievement of the proportion referred to in this Article and Article 5 for each of the television programmes falling within the jurisdiction of the Member State concerned, the reasons, in each case, for the failure to attain that proportion and the measures adopted or envisaged in order to achieve it.

The Commission shall inform the other Member States and the European Parliament of the reports, which shall be accompanied, where appropriate, by an opinion. The Commission shall ensure the application of this Article and Article 5 in accordance with the provisions of the Treaty. The Commission may take account in its opinion, in particular, of progress achieved in relation to previous years, the share of first broadcast works in the programming, the particular circumstances of new television broadcasters and the specific situation of countries with a low audiovisual production capacity or restricted language area.

The Council shall review the implementation of this Article on the basis of a report from the Commission accompanied by any proposals for revision that it may deem appropriate no later than the end of the fifth year from the adoption of the Directive.

To that end, the Commission report shall, on the basis of the information provided by Member States under paragraph 3, take account in particular of developments in the Community market and of the international context.

Article 5

Member States shall ensure, where practicable and by appropriate means, that broadcasters reserve at least 10 % of their transmission time, excluding the time appointed to news, sports events, games, advertising and teletext services, or alternately, at the discretion of the Member State, at least 10 % of their programming budget, for European works created by producers who are independent of broadcasters. This proportion, having regard to broadcasters' informational, educational, cultural and entertainment responsibilities to its viewing public, should be achieved progressively, on the basis of suitable criteria; it must be achieved by earmarking an adequate proportion for recent works, that is to say works transmitted within five years of their production.

Article 6

1. Within the meaning of this chapter, 'European works' means the following:

(a) works originating from Member States of the Community and, as regards television broadcasters falling

within the jurisdiction of the Federal Republic of Germany, works from German territories where the Basic Law does not apply and fulfilling the conditions of paragraph 2;

(b) works originating from European third States party to the European Convention on Transfrontier Television of the Council of Europe and fulfilling the conditions of paragraph 2;

(c) works originating from other European third countries and fulfilling the conditions of paragraph 3.

2. The works referred to in paragraph 1 (a) and (b) are works mainly made with authors and workers residing in one or more States referred to in paragraph 1 (a) and (b) provided that they comply with one of the following three conditions:

(a) they are made by one or more producers established in one or more of those States; or

(b) production of the works is supervised and actually controlled by one or more producers established in one or more of those States; or

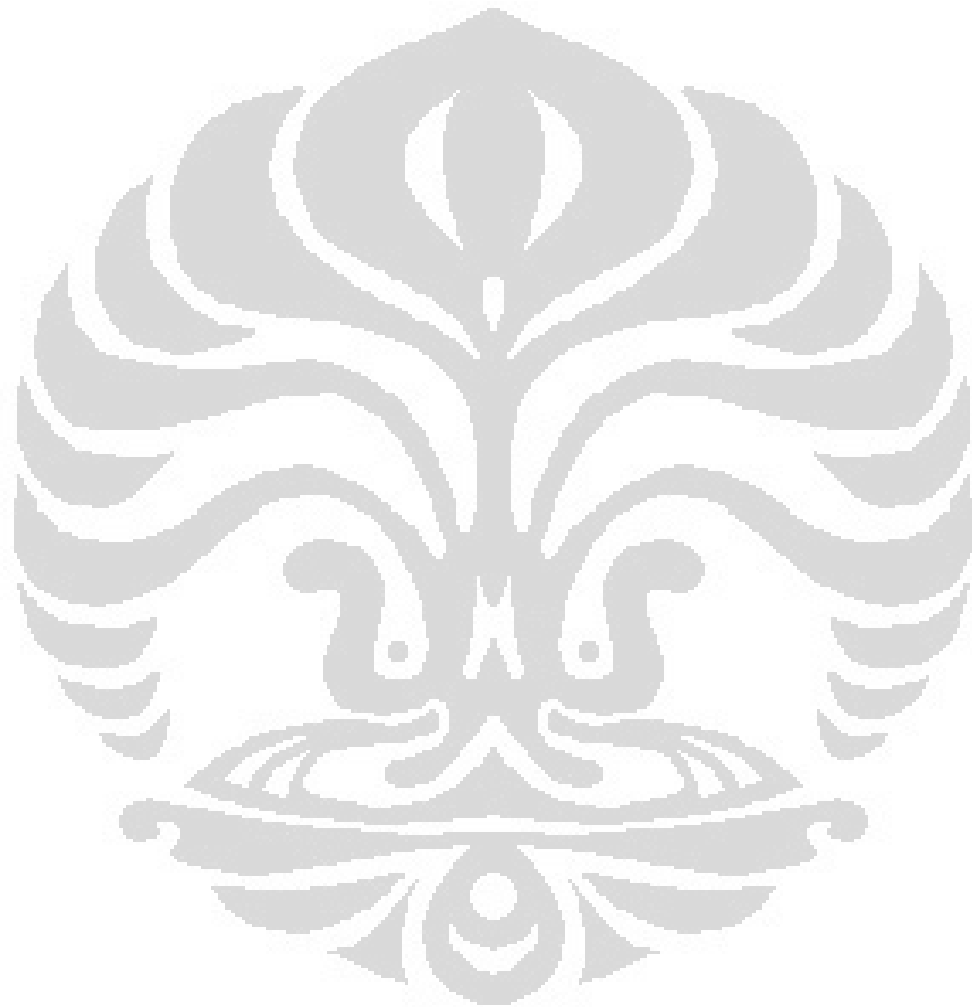
(c) the contribution of co-producers of those States to the total co-production costs is preponderant and the co-production is not controlled by one or more producers established outside those States.

3. The works referred to in paragraph 1 (c) are works made exclusively or in co-production with producers established in one or more Member State by producers established in one or more European third countries with which the Community will conclude agreements in accordance with the procedures of the Treaty, if those works are mainly made with authors and workers residing in one or more European States.

4. Works which are not European works within the meaning of paragraph 1, but made mainly with authors and workers residing in one or more Member States, shall be considered to be European works to an extent corresponding to the proportion of the contribution of Community co-producers to the total production costs.

Article 7

Member States shall ensure that the television broadcasters under their jurisdiction do not broadcast any cinematographic work, unless otherwise agreed between its rights holders and the broadcaster, until two years have elapsed since the work was first shown in cinemas in one of the Member States of the Community; in the case of cinematographic works co-produced by the broadcaster, this period shall be one year.



Article 8

Where they consider it necessary for purposes of language policy, the Member States, whilst observing Community law, may as regards some or all programmes of television broadcasters under their jurisdiction, lay down more detailed or stricter rules in particular on the basis of language criteria.

Article 9

This chapter shall not apply to local television broadcasts not forming part of a national network.

CHAPTER IV

Television advertising and sponsorship

Article 10

1. Television advertising shall be readily recognizable as such and kept quite separate from other parts of the programme service by optical and/or acoustic means.
2. Isolated advertising spots shall remain the exception.
3. Advertising shall not use subliminal techniques.
4. Surreptitious advertising shall be prohibited.

Article 11

1. Advertisements shall be inserted between programmes. Provided the conditions contained in paragraphs 2 to 5 of this Article are fulfilled, advertisements may also be inserted during programmes in such a way that the integrity and value of the programme, taking into account natural breaks in and the duration and nature of the programme, and the rights of the rights holders are not prejudiced.
2. In programmes consisting of autonomous parts, or in sports programmes and similarly structured events and performances comprising intervals, advertisements shall only be inserted between the parts or in the intervals.
3. The transmission of audiovisual works such as feature films and films made for television (excluding series, serials, light entertainment programmes and documentaries), provided their programmed duration is more than 45 minutes, may be interrupted once for each complete period of 45 minutes. A further interruption is allowed if their programmed duration is at least 20 minutes longer than two or more complete periods of 45 minutes.
4. Where programmes, other than those covered by paragraph 2, are interrupted by advertisements, a period of at least 20 minutes should elapse between each successive advertising break within the programme.

5. Advertisements shall not be inserted in any broadcast of a religious service. News and current affairs programmes, documentaries, religious programmes, and children's programmes, when their programmed duration is less than 30 minutes shall not be interrupted by advertisements. If their programmed duration is of 30 minutes or longer, the provisions of the previous paragraphs shall apply.

Article 12

Television advertising shall not:

- (a) prejudice respect for human dignity;
- (b) include any discrimination on grounds of race, sex or nationality;
- (c) be offensive to religious or political beliefs;
- (d) encourage behaviour prejudicial to health or to safety;
- (e) encourage behaviour prejudicial to the protection of the environment.

Article 13

All forms of television advertising for cigarettes and other tobacco products shall be prohibited.

Article 14

Television advertising for medicinal products and medical treatment available only on prescription in the Member State within whose jurisdiction the broadcaster falls shall be prohibited.

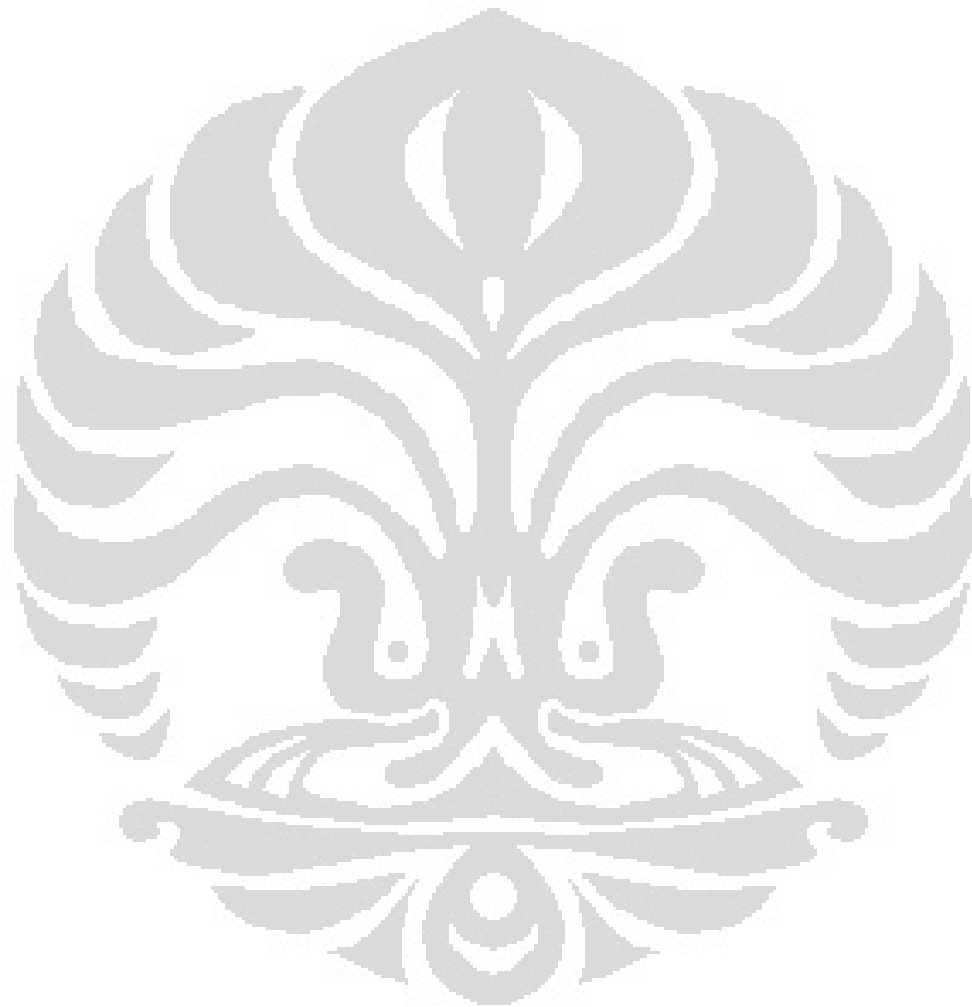
Article 15

Television advertising for alcoholic beverages shall comply with the following criteria:

- (a) it may not be aimed specifically at minors or, in particular, depict minors consuming these beverages;
- (b) it shall not link the consumption of alcohol to enhanced physical performance or to driving;
- (c) it shall not create the impression that the consumption of alcohol contributes towards social or sexual success;
- (d) it shall not claim that alcohol has therapeutic qualities or that it is a stimulant, a sedative or a means of resolving personal conflicts;
- (e) it shall not encourage immoderate consumption of alcohol or present abstinence or moderation in a negative light;
- (f) it shall not place emphasis on high alcoholic content as being a positive quality of the beverages.

Article 16

Television advertising shall not cause moral or physical detriment to minors, and shall therefore comply with the following criteria for their protection:



it shall not directly exhort minors to buy a product or a service by exploiting their inexperience or credulity ;
it shall not directly encourage minors to persuade their parents or others to purchase the goods or services being advertised ;

it shall not exploit the special trust minors place in parents, teachers or other persons ;

it shall not unreasonably show minors in dangerous situations.

Article 17

Sponsored television programmes shall meet the following requirements :

- 1) the content and scheduling of sponsored programmes may in no circumstances be influenced by the sponsor in such a way as to affect the responsibility and editorial independence of the broadcaster in respect of programmes ;
- 2) they must be clearly identified as such by the name and/or logo of the sponsor at the beginning and/or the end of the programmes ;
- 3) they must not encourage the purchase or rental of the products or services of the sponsor or a third party, in particular by making special promotional references to those products or services.

Television programmes may not be sponsored by natural or legal persons whose principal activity is the manufacture or sale of products, or the provision of services, the advertising of which is prohibited by Article 3 or 14.

News and current affairs programmes may not be sponsored.

Article 18

The amount of advertising shall not exceed 15 % of the daily transmission time. However, this percentage may be increased to 20 % to include forms of advertisements such as direct offers to the public for the sale, purchase or rental of products or for the provision of services, provided the amount of spot advertising does not exceed 15 %.

1. The amount of spot advertising within a given one-hour period shall not exceed 20 %.

2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1, forms of advertisements such as direct offers to the public for the sale, purchase or rental of products or for the provision of services shall not exceed one hour per day.

Article 19

Member States may lay down stricter rules than those in Article 18 for programming time and the procedures for

television broadcasting for television broadcasters under their jurisdiction, so as to reconcile demand for televised advertising with the public interest, taking account in particular of :

- (a) the role of television in providing information, education, culture and entertainment ;
- (b) the protection of pluralism of information and of the media.

Article 20

Without prejudice to Article 3, Member States may, with due regard for Community law, lay down conditions other than those laid down in Article 11 (2) to (5) and in Article 18 in respect of broadcasts intended solely for the national territory which may not be received, directly or indirectly, in one or more other Member States.

Article 21

Member States shall, within the framework of their laws, ensure that in the case of television broadcasts that do not comply with the provisions of this chapter, appropriate measures are applied to secure compliance with these provisions.

CHAPTER V

Protection of minors

Article 22

Member States shall take appropriate measures to ensure that television broadcasts by broadcasters under their jurisdiction do not include programmes which might seriously impair the physical, mental or moral development of minors, in particular those that involve pornography or gratuitous violence. This provision shall extend to other programmes which are likely to impair the physical, mental or moral development of minors, except where it is ensured, by selecting the time of the broadcast or by any technical measure, that minors in the area of transmission will not normally hear or see such broadcasts.

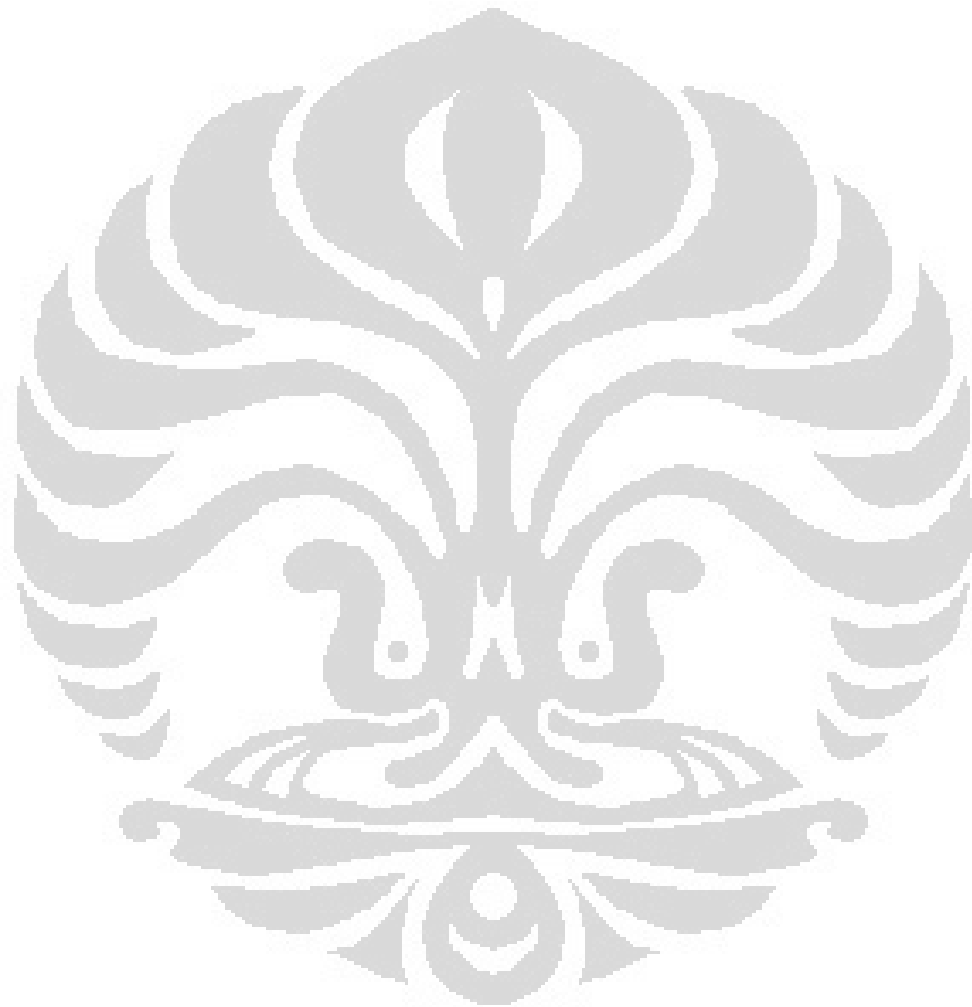
Member States shall also ensure that broadcasts do not contain any incitement to hatred on grounds of race, sex, religion or nationality.

CHAPTER VI

Right of reply

Article 23

1. Without prejudice to other provisions adopted by the Member States under civil, administrative or criminal law, any natural or legal person, regardless of nationality,



whose legitimate interests, in particular reputation and good name, have been damaged by an assertion of incorrect facts in a television programme must have a right of reply or equivalent remedies.

2. A right of reply or equivalent remedies shall exist in relation to all broadcasters under the jurisdiction of a Member State.

3. Member States shall adopt the measures needed to establish the right of reply or the equivalent remedies and shall determine the procedure to be followed for the exercise thereof. In particular, they shall ensure that a sufficient time span is allowed and that the procedures are such that the right or equivalent remedies can be exercised appropriately by natural or legal persons resident or established in other Member States.

4. An application for exercise of the right of reply or the equivalent remedies may be rejected if such a reply is not justified according to the conditions laid down in paragraph 1, would involve a punishable act, would render the broadcaster liable to civil law proceedings or would transgress standards of public decency.

5. Provision shall be made for procedures whereby disputes as to the exercise of the right of reply or the equivalent remedies can be subject to judicial review.

CHAPTER VII

Final provisions

Article 24

In fields which this Directive does not coordinate, it shall not affect the rights and obligations of Member States resulting from existing conventions dealing with telecommunications or broadcasting.

Article 25

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than 3 October 1991. They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the fields governed by this Directive.

Article 26

Not later than the end of the fifth year after the date of adoption of this Directive and every two years thereafter, the Commission shall submit to the European Parliament, the Council, and the Economic and Social Committee a report on the application of this Directive and, if necessary, make further proposals to adapt it to developments in the field of television broadcasting.

Article 27

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 3 October 1989.

For the Council

The President

R. DUMAS



KRONOLOGI PERTELEVISIAN PRANCIS

1928: Perusahaan alat hitung membangun laboratorium riset yang dipimpin oleh insinyur elektronik René Barthélémy

April 14, 1931: Barthélémy mendemonstrasikan transmisi radio televisi pertamanya di hadapan publik Prancis

April 26, 1935: Penyiaran secara resmi televisi oleh stasiun televisi Paris-PTT Vision

November 1935: Instalasi transmiter di atas menara Eiffel

September 1939: Penghentian penyiaran akibat Perang Dunia II

May 7, 1943 - August 16, 1944: Penyiaran oleh stasiun televisi Jerman Fernsehsender di seluruh penjuru Paris

October 1944: Penyiaran diteruskan berkat kemenangan kelompok *Liberation*

February 4, 1949: Radiodiffusion française (RDF) menjadi Radiodiffusion-Télévision française (RTF)

June 29, 1949: Siaran berita Prancis pertama First television newscast

July 30, 1949: Aturan kepemilikan televisi

April 10, 1950: Transmitter regional di kota Lille

June 2, 1953: Penobatan Ratu Inggris Elizabeth II yang disiarkan di lima negara Eropa, termasuk Prancis

February 1959: Berdasarkan keputusan pemerintah, RTF menjadi institusi komersial dan industri publik

April 8, 1964: Peryaan saluran televisi dua

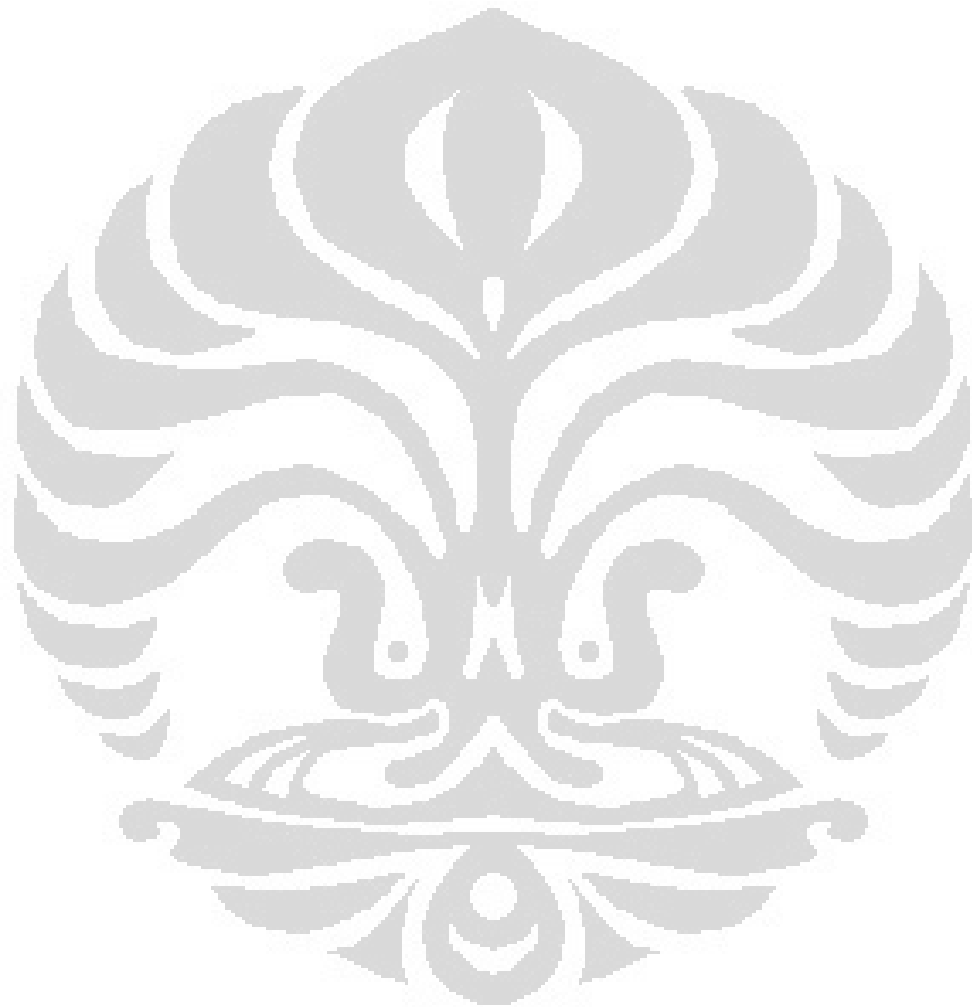
June 27, 1964: Aturan yang mengubah RTF menjadi ORTF

October 1, 1967: Televisi berwarna pertama mengudara di saluran kedua

May 13-June 23, 1968: Demonstrasi besar di ORTF

October 1, 1968: Penayangan iklan produk di saluran satu

December 31, 1972: Peluncuran saluran tiga



August 7, 1974: Aturan yang menghapus ORTF, digantikan oleh tujuh perusahaan publik, termasuk TF1, Antenne 2, FR3 yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1975.

July 29, 1982: UU komunikasi audiovisual menandai monopoli negara terhadap penyiaran dan pembentukan *Autorité de la communication audiovisuelle*

November 3, 1982: Peluncuran TV berbasis kabel

November 4, 1984: Peluncuran stasiun televisi privat pertama Prancis, Canal +

February-March 1986: Peluncuran stasiun televisi La Cinq dan TV6

September 30, 1986: Aturan tentang kebebasan komunikasi yang mengganti Otoritas Tinggi Penyiaran (*Haute Autorité*) oleh CNCL (*Commission nationale de la communication et des libertés*) dan memberikan mandat untuk privatisasi TF1

February 23, 1987: CNCL mengalihkan lisensi TV6 (Publicis/NRJ) kepada M6 (CLT/Lyonnaise des eaux).

April 4, 1987: TF1 dimiliki oleh group Bouyges

October 28, 1988: Peluncuran satelit penyiaran TDF1

January 17, 1989: UU mengganti CNCL menjadi CSA (*Conseil supérieur de l'audiovisuel*)

August 1989: UU yang menggabungkan Antenne 2 dan FR3 dalam satu atap, dengan nama baru France-Télévision pada tahun 1992

April 12, 1992: Stasiun Televisi La Cinq berhenti beroperasi.

September 28, 1992: Arte mulai beroperasi di saluran lima

December 1994: peluncuran La Cinqième di saluran lima yang berbagi dengan Arte

April 27, 1996: Peluncuran secara komersial pelayanan satelit digital Canal

August 1, 2000: UU yang menyatukan stasiun televisi France Télévisions (France 2, France 3 La Cinqième) menjadi France 5

March 31, 2005: Peluncuran televisi digital DTT (Digital Terrestrial Television).

